

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI
PROGRAM USAHA EKONOMI KELURAHAN SIMPAN PINJAM (UEK-
SP) SIDOMULYO KELURAHAN SIDOMULYO BARAT KECAMATAN
TUAH MADANI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



**FEBRI NADIA
NPM: 177110143**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PEKANBARU
2021**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis atas kehadiran Allah SWT, karena berkat dan rahmat-Nya lah penulis bisa menyelesaikan skripsi penelitian dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Sidomulyo Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru” ini. Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau.

Penghormatan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis tujukan kepada kedua orang tua tercinta, (Ayahanda Edi Putra dan Ibunda Rina Wati) yang dengan caranya sendiri selalu memotivasi penulis dalam segala pencapaian dan kesuksesan yang penulis raih pada saat ini. Curahan kasih sayang, cinta kasih, dan doa yang beliau berikan menjadi kekuatan yang besar dalam upaya meraih cita-cita penulis. Keberhasilan ini sepenuhnya penulis persembahkan kepada kedua orang tua yang luar biasa hebat dan menjadi panutan bagi penulis. Semoga ini dapat memberikan kebahagiaan serta kebanggaan.

Melalui kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama proses perkuliahan hingga pembuatan skripsi ini, di antaranya:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi,SH., MCL Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M. Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau

3. Kepada Ibu Lilis Suriani, S.Sos., M.Si Sebagai Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
4. Ibu Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan masukan-masukan demi kesempurnaan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh keluarga besar Sekretariat Program Pemberdayaan Kelurahan (PPK) Kota Pekanbaru yang telah membantu penulis dalam kelancaran skripsi ini.
6. Seluruh keluarga besar Kantor Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (Uek-Sp) Sidomulyo Kelurahan Sidomulyo Barat yang telah bersedia memberikan waktu dan tenaga nya untuk kelancaran skripsi ini.
7. Terkhusus dan teristimewa kepada kedua orang tua saya ayahanda Edi Putra dan ibunda Rina Wati serta kakak kandung saya Novita Sari beserta abang ipar Muhammad Hanafi turut juga adek kandung saya Hafizh Rinaldi dan terakhir ponakan comel saya Fariz Zefa Alfarizqi.
8. Kepada Rido Idham yaitu patner diskusi saya dan selalu memberikan bantuan, saran serta semangat dalam proses pembuatan skripsi ini
9. Kepada Sahabat saya terkasih FS08, Marjusan, Ade, Boy, Zaki, Resa, Ayu, dan Feni yang sudah memberikan saya dukungan dan support sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik
10. Kepada Sahabat saya yang tercinta genk 99, Pradilla Susanti, Ghina Sonia, Loly Putri Utama, serta Rizka Fadia Haya yang telah membantu memberikan masukan, hiburan serta saran kepada penulis sehingga

skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik dan semoga kita bisa wisuda bareng.

11. Rekan-rekan Himia Publik FISIPOL UIR dan orang terkasih yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya yang senantiasa memberikan nasihat, saran, masukan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
12. Teman-teman seperjuangan jurusan Administrasi Publik kelas D 2017 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
13. Dan teruntuk yang tersayang BTS yang telah memberikan semangat kepada saya sehingga saya lebih bersemangat lagi mengerjakan skripsi ini.
14. Dan untuk diri sendiri yang telah berupaya semaksimal mungkin, terima kasih karena telah berjuang sampai akhir, tetap berupaya positif walaupun keadaan negatif.

Pekanbaru, 05 April 2021

Penulis,

Febri Nadia

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA KONPREHENSIF	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACK	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	30
C. Tujuan dan Kegunaan peneliti	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	32
A. Studi Kepustakaan.....	32
1. Konsep Administrasi	32
2. Konsep Organisasi.....	35
3. Konsep Manajemen	39
4. Konsep Kebijakan Publik	42
5. Konsep Implementasi	45
6. Konsep Implementasi Kebijakan.....	46
7. Konsep Pemberdayaan	59
B. Kerangka Pikir	61
C. Konsep Operasioanl	63
D. Operasioanl Variabel.....	64
BAB III METODE PENELITIAN	66
A. Tipe Penelitian.....	66
B. Lokasi Penelitian	66
C. Informant dan Key Informant	67

D. Teknik Penarikan Sampling	68
E. Jenis dan Sumber Data	68
F. Teknik Pengumpulan Data	69
G. Teknik Analisis Data	71
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN.....	73
A. Keadaan Ringkas Lokasi Penelitian	73
B. Sejarah Ringkas Kecamatan Tuah Madani	77
C. Sejarah Ringkas Kelurahan Sidomulyo Barat.....	78
D. Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Sidomulyo ..	81
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	90
A. Identifikasi Responden.....	90
B. Pembahasan Peneliti Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Impelementasi Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Sidomulyo Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru	92
BAB VI PENUTUP	130
A. Kesimpulan	130
B. Saran.....	132
DAFTAR KEPUSTAKAAN	134
DAFTAR LAMPIRAN	136

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	Jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin Kota Pekanbaru 2019-2020.....	3
I.2	Lokasi Dan Alokasi Dana Usaha Kelurahan T.A 2005-2014.....	13
I.3	Laporan Laba Rugi UEK-SP Se Kota Pekanbaru Tahun 2020	18
I.4	Usaha-usaha yang di danai oleh UEK-SP Sidomulyo dari tahun 2006-2020	23
I.5	Fasilitas yang dimiliki UEK-SP Sidomulyo Desember 2020	24
I.6	Jumlah anggota dan dana yang telah bergulir dari tahun 2019-2020	26
I.7	jumlah gender pemanfaat yang meminjam di kantor UEK-SP Sidomulyo sampai September 2021	26
I.8	Besaran Tunggakan UEK-SP Sidomulyo Barat dari tahun 2019 sampai dengan 2020.....	27
II.1	Operasionalisasi Variabel penelitian tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) SidomulyoKelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru	65
III.1	Informant dan Key Informant	68
IV.1	Jumlah Kecamatan dan Persentase Penduduk yang ada di Kota Pekanbaru.....	75
IV.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani	80
IV.3	Jumlah Tempat Ibadah Yang Berada Dilingkungan Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru	81
V.1	Identifikasi Key Informan	90



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
I.1 Struktur Kelembagaan UEK-SP Sidomulyo.....	11
II.2 Kerangka Pikir Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Sidomulyo Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.....	62
IV.1 Struktur Organisasi Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Sidomulyo Kelurahan Sidomulyo Barat	83
V.1 Gambat Model Implementasi Edward III	93

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar wawancara peneliti tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Sidomulyo Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru (untuk keyinforman Lurah Sidomulyo Barat)..... 137
2. Daftar wawancara peneliti tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Sidomulyo Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru (untuk keyinforman Pendamping Kelurahan)..... 143
3. Daftar wawancara peneliti tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Sidomulyo Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru (untuk keyinforman Ketua pengelola UEK-SP Sidomulyo)..... 149
4. Daftar wawancara peneliti tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Sidomulyo Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru (untuk keyinforman Tata Usaha pengelola UEK-SP Sidomulyo) 160
5. Daftar wawancara peneliti tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Sidomulyo Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru (untuk keyinforman Kasir pengelola UEK-SP Sidomulyo)..... 166
6. Daftar wawancara peneliti tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Sidomulyo Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru (untuk keyinforman Staff Analisis Kredit pengelola UEK-SP Sidomulyo)..... 172
7. Daftar wawancara peneliti tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Sidomulyo Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru (untuk informan Pemanfaat/Masyarakat)..... 178

8.	Dokumentasi peneliti tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Sidomulyo Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.....	186
9.	Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR No: 514/UIR-Fs/Kpts/2021 Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa Dekan Fisipol UIR	195
10.	Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR No: 2506 /E-UIR/27-FS/2021 Tentang Mohon Rekomendasi Riset	196
11.	Surat Rekomendasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau No: 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/42512 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi	197
12.	Surat Rekomendasi Dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Pemerintah Kota Pekanbaru No: 071/BKBP-SKP/1779/2021 Tentang Rekomendasi Peneliti Dan Pengmpulan Data (Survey)	198
13.	Surat Rekomendasi Dari Program Pemberdayaan Kelurahan Kota Pekanbaru No: 033/PPK/VIII/2021 Tentang Tindak Lanjut Dari Surat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau	199
14.	Surat Keterangan Dari Kantor UEK-SP Sidomulyo Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani No: 023/UEK-SP/SDMB/IX/2021 Tentang Izin Riset Serta Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi.....	200
15.	Surat Keterangan Kecamatan Tuah Madani No: 400/KTM-KESSOS/32/2021 Tentang Izin Riset Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi	201

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konfrehensif yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Febri Nadia
NPM : 177110143
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Sidomulyo Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, seluruh persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar dan telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI

Dengan pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak maupun juga

Pekanbaru, 26 November 2021

Pelaku Pernyataan,


Febri Nadia

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI
PROGRAM USAHA EKONOMI KELURAHAN SIMPAN PINJAM (UEK-
SP) SIDOMULYO KELURAHAN SIDOMULYO BARAT KECAMATAN
TUAH MADANI KOTA PEKANBARU**

Oleh :

Febri Nadia

ABSTRAK

Program usaha ekonomi kelurahan merupakan program yang dibikin oleh pemerintah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan meminjam dana usaha di kelurahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam (UEK-SP) Sidomulyo Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. penelitian ini dilakukan di kantor UEK-SP Sidomulyo di kelurahan Sidomulyo Barat. Tipe penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang peneliti gunakan yaitu analisis deskriptif dengan menggunakan metode triangulasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam (UEK-SP) yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program usaha ekonomi kelurahan simpan pinjam (UEK-SP) sidomulyo Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru sudah terlaksana tetapi belum optimal karena yang menjadi titik kelemahan dalam UEK-SP Sidomulyo ini yaitu salah satunya belum adanya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat terkait mengembalikan dana pinjaman. Saran yang dapat diberikan adalah dengan diadakannya sosialisasi serta pembinaan kepada masyarakat sehingga mereka memahami tanggung jawab masing-masing.

. Kata Kunci : Ekonomi, Implementasi, Program UEK-SP

**FACTORS THAT AFFECT THE IMPLEMENTATION OF THE ECONOMIC
BUSINESS PROGRAM OF SAVING AND LOANS (UEK-SP) SIDOMULYO
WEST SIDOMULYO VILLAGE, TUAH MADANI DISTRICT OF
PEKANBARU CITY**

By :

Febri Nadia

ABSTRACT

The village economic business program is a program created by the government to improve the community's economy by borrowing business funds from the village. This study aims to determine the factors that influence the implementation of the economic business program in the Sidomulyo Village Savings and Loans (UEK-SP) Sidomulyo Village West Sidomulyo Village, Tuah Madani District, Pekanbaru City. This research was conducted at the UEK-SP Sidomulyo office in the West Sidomulyo village. This type of research uses qualitative research with data collection techniques, namely interview, observation, and documentation techniques. While the data analysis that the researchers uses is descriptive analysis using the triangulation method. The factors that influence the implementation of the savings and loan village economic business program (UEK-SP) are communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Based on the results of the study, the factors that influence the implementation of the economic business program in the Sidomulyo Village Savings and Loans (UEK-SP) Sidomulyo Village, West Sidomulyo Subdistrict, Tuah Madani Subdistrict, Pekanbaru City have been implemented but are not optimal because one of the weaknesses in UEK-SP Sidomulyo is one of them. there has been no socialization given to the community regarding returning loan funds. Suggestions that can be given are holding socialization and coaching to the community so that they understand their respective responsibilities.

Keywords: Economics, Implementation, UEK-SP Program

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang tergolong penduduknya banyak dan wilayah kekuasaannya luas. Sebagai negara yang menyanggah status negara berkembang, Indonesia punya tekad untuk mensejahterakan seluruh rakyatnya dari Sabang sampai Merauke, dari pusat hingga pelosok tanah air, dan dari wilayah perkotaan hingga wilayah perdesaan.

Kota Pekanbaru sebagai salah satu kota yang ada di Indonesia yang mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang begitu cepat dalam pembangunan berbagai bidang, membuat kota ini harus siap menghadapi segala bentuk resiko yang akan muncul, salah satunya mengenai kemiskinan perkotaan.

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang global. Menurut Schuman dalam Anwas (2013:83) kemiskinan di tingkat global terjadi fenomena perbandingan antara 20:80, yaitu 20% penduduk dunia menguasai 80% kekayaan dunia. Akibatnya, 20% penduduk tadi akan mengendalikan penduduk lainnya yang besarnya 80%. Ini artinya dunia ini hanya di nikmati 20% penduduk dunia dan sebagian besar penduduk dunia (80%) dapat digolongkan pada kelompok masyarakat relatif miskin.

Secara umum kemiskinan dapat digolongkan dalam empat jenis yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan structural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan absolut merupakan tingkat ketidakberdayaan individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum mulai pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan berkerja.

Kemiskinan relatif adalah terkait dengan kesenjangan distribusi pendapatan rata-rata distribusi, dimana pendapatnya berada pada posisi di atas garis kemiskinan, namun relatif lebih rendah dibandingkan pendapatnya masyarakat sekitarnya. Kemiskinan skruktural adalah kondisi miskin yang disebabkan kebijakan pemerintah dalam pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan kesenjangan pendapatan. Kemiskinan kultural adalah terkait faktor sikap individu atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti malas, boros, tidak kreatif sehingga menyebabkan miskin.

Dalam Anwas (2013:85) masalah kemiskinan ini sangat terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Strategi pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui penguatan untuk memberdayakan dan kegiatan pemberdayaan. Pemberdayaan dalam menuntaskan kemiskinan dapat dilakukan dengan cara mengubah *mind set* indivudi dan masyarakat untuk berdaya dan mandiri. Pemberdayaan juga dapat dilakukan dengan berbagai aktivitas yang dapat meningkatkan partisipasi individu dan masyarakat.

Masalah kemiskinan merupakan permasalahan yang selalu terjadi dan harus menjadi perhatian serius dari pemerintah. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai merupakan salah satu solusi dalam upaya menjawab permasalahan kemiskinan perkotaan.

Tabel I.1: Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kota Pekanbaru 2019-2020

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin
1.	2019	28,60	2,52
2.	2020	30,40	2,62

Sumber data: Pekanbaru Dalam Angka 2021

Dijelaskan pada Tabel I.1 di atas, bahwa jumlah penduduk miskin Kota Pekanbaru pada tahun 2020 lebih meningkat daripada tahun 2019. Dijelaskan dalam Katalog BPS Kota Pekanbaru yang berjudul Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Pekanbaru 2019/2020 pengentasan kemiskinan ini telah diupayakan oleh pemerintah dengan berbagai macam program yang telah direncanakan baik di level nasional, provinsi maupun kabupaten kota. Namun, pandemi covid 19 yang pada awal tahun 2020 berhasil memukul perekonomian di masyarakat yang berada disekitar garis kemiskinan untuk turun menjadi dibawah garis kemiskinan.

Siagian mengemukakan bahwa pemberdayaan sumber daya manusia adalah upaya yang dilakukan untuk menggali dan membangkitkan segenap potensi yang ada dalam diri manusia itu agar dapat member manfaat bagi diri dan lingkungannya. Sesungguhnya manusia punya potensi adakalanya potensi itu bangkit dengan sendirinya adakala potensi itu bangkit perlu digerakkan.

Konsep pemberdayaan bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat. Pembangunan tidak lagi berpusat pada pemerintah tetapi juga dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

Salah satu upaya pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat adalah melalui program pemberdayaan Kelurahan yang merupakan salah satu wujud nyata dari percepatan pembangunan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, program ini berlandaskan pada Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia. yang mana dipimpin oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagai Ketua, dibantu dengan Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Wakil Ketua, dan mengikutsertakan sebagai anggota :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Sosial
3. Menteri Kesehatan
4. Menteri Pendidikan Nasional
5. Menteri Pertanian
6. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah
7. Menteri Keuangan
8. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
10. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS
11. Kepala Badan Pusat Statistik
12. Sekretaris Komite Penanggulangan Kemiskinan Didukung Staf yang secara Fungsional terdiri atas berbagai unsur forum lintapelaku

Untuk mengatasi hal ini pemerintah Kota Pekanbaru mulai mengulirkan Program Usaha Ekonomi Kelurahan sejak tahun 2005

berdasarkan Agenda Nasional (Propenas) dan Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor 592/IX/2004 dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan Provinsi Riau melalui Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS/132/III/2005 tanggal 31 Maret 2005 mengeluarkan kebijakan untuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa/Kelurahan (PPD/K) yang dituangkan secara jelas dalam pedoman umum dan petunjuk teknis serta menunjuk lokasi penerima bantuan dana usaha/kelurahan. Adapun jenis kegiatan PPD/K pada sadarnya kegiatan yang mendukung upaya pemerintah Provinsi Riau untuk menanggulangi masalah kemiskinan, kebodohan, dan infrasturktur(K2I).

Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Kelurahan Kota Pekanbaru adalah melalui Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP). Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) ini merupakan salah satu program pemerintah yang mengurangi dan mengentaskan kemiskinan, yaitu melalui pemberian dana pinjaman modal bagi pengusaha menengah ke bawah.

Program Pemberdayaan Kelurahan yang disingkat menjadi PPK ini adalah program hibah yang diberikan secara bergulir dalam bentuk uang, barang dan jasa yang berasal dari pemerintah Kota Pekanbaru sebagai upaya pengembangan masyarakat Kelurahan melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dengan dukungan sumber daya manusia, kesempatan dalam

pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.

Dalam Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2015 BAB III pasal 4 dan pasal 5 menjelaskan Penyelenggaraan Program Pemberdayaan Kelurahan dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru. Dalam menjalankan tugasnya, Badan Pemberdayaan, Masyarakat dan Keluarga Berencana bertanggungjawab langsung Kepada Wali Kota Pekanbaru

Dalam implementasinya jenis kegiatan pada Program Pemberdayaan Kelurahan meliputi kegiatan bidang ekonomi mikro melalui Dana Usaha Kelurahan yang dikelola oleh Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP).

Adapun proses kegiatan dalam Program Pemberdayaan Kelurahan pada hakekatnya memiliki tiga dimensi, yaitu :

1. Memberdayakan masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan kegiatan pembangunan, melaksanakannya secara terbuka (transparan) dan penuh tanggung jawab.
2. Memberikan dukungan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri.
3. Menyediakan Dana Usaha Desa/Kelurahan untuk pinjaman yang murah dan mudah guna pengembangan ekonomi masyarakat desa/kelurahan

Prinsip dana usaha Kelurahan sangat terbuka untuk membiayai segala jenis kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat, terutama kegiatan yang

melibatkan banyak masyarakat miskin, meningkatkan kesempatan berusaha serta memiliki potensi untuk berkembang dan berkelanjutan yang meliputi :

1. Kegiatan ekonomi yang dapat menunjang peningkatan pendapatan masyarakat desa/Kelurahan serta mendorong pengembangan aktifitas ekonomi produktif
2. Kegiatan usaha ekonomi produktif yang dapat memperluas kesempatan berusaha dan pengembangan usaha bagi kelompok masyarakat miskin. (pedoman PPD).

Sasaran utama penerima Program Pemberdayaan Kelurahan adalah Kelurahan yang memiliki relatif lebih banyak penduduk miskin. Berdasarkan petunjuk teknis PPK Kota Pekanbaru, tujuan dilaksanakannya program pemberdayaan kelurahan Kota Pekanbaru secara khusus adalah untuk, yaitu :

1. Mendorong berkembang perekonomian masyarakat kelurahan
2. Meningkatkan dorongan berusaha bagi anggota masyarakat yang berpenghasilan rendah
3. Meningkatkan pengembangan usaha dan penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat kelurahan
4. Mengurangi ketergantungan masyarakat dari rentenir
5. Meningkatkan peranan masyarakat dalam pengelola dana usaha kelurahan
6. Meningkatkan kebiasaan gotong royong dan gemar menabung secara tertib
7. Meningkatkan peranan perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Kelurahan
8. Memenuhi kebutuhan sarana/prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat kelurahan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 18B bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saling daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sentuhan otonomi daerah harus mampu merata di Indonesia dan tak terkecuali Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru sendiri sudah melaksanakan Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) sejak dari tahun 2005. Dalam portal resmi Pemerintah Kota Pekanbaru Provinsi Riau disampaikan oleh Koordinator Daerah (Korda) Program Pemberdayaan Kelurahan dibawah koordinasi langsung bagian Pemberdayaan Masyarakat Setda Pekanbaru yaitu Selamat Sukarso, S.Ag menyampaikan bahwa

“Terdapat 58 Kelurahan yang mendapatkan Program Pemberdayaan Kelurahan berupa Dana Usaha Kelurahan dari tahun 2005-2014 sebanyak 29,1 milyar. Sampai 2020 sudah berkembang menjadi 36,8 milyar.” (diakses 13 Maret 2021)

Dengan demikian, peneliti tertarik ingin melihat pelaksanaan Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Sidomulyo di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.

Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam selanjutnya disingkat UEK-SP adalah lembaga keuangan mikro (LKM) yang dibentuk oleh kelurahan melalui musyawarah untuk mengelola Dana Usaha Kelurahan (DUK) dan dana yang berasal dari kegiatan simpan pinjam masyarakat.

Kelurahan Sidomulyo Barat Kota Pekanbaru merupakan salah satu penerima Program Pemberdayaan Kelurahan (PPK) yang menerima bantuan Dana Usaha Kelurahan seperti Kelurahan lain yang menerima Program Pemberdayaan Kelurahan (PPK) ini. Maka melalui rapat ditingkat Kelurahan Sidomulyo Barat, LPM, Wakil Perempuan dan yang terkait dalam pemerintahan Kelurahan terbentuklah lembaga khusus yaitu Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP). Lembaga ini didirikan terhitung sejak akhir 2005 yang diberi nama Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam(UEK-SP) Sidomulyo.

Tujuan didirikannya Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) ini adalah sebagai tindak lanjut dari kebijakan dan program pemerintah dalam upaya proses mempercepat tingkat pertumbuhan dan peningkatan ekonomi masyarakat dengan memberikan pinjaman modal usaha bagi usaha ekonomi masyarakat menengah kebawah, dari dan oleh masyarakat.

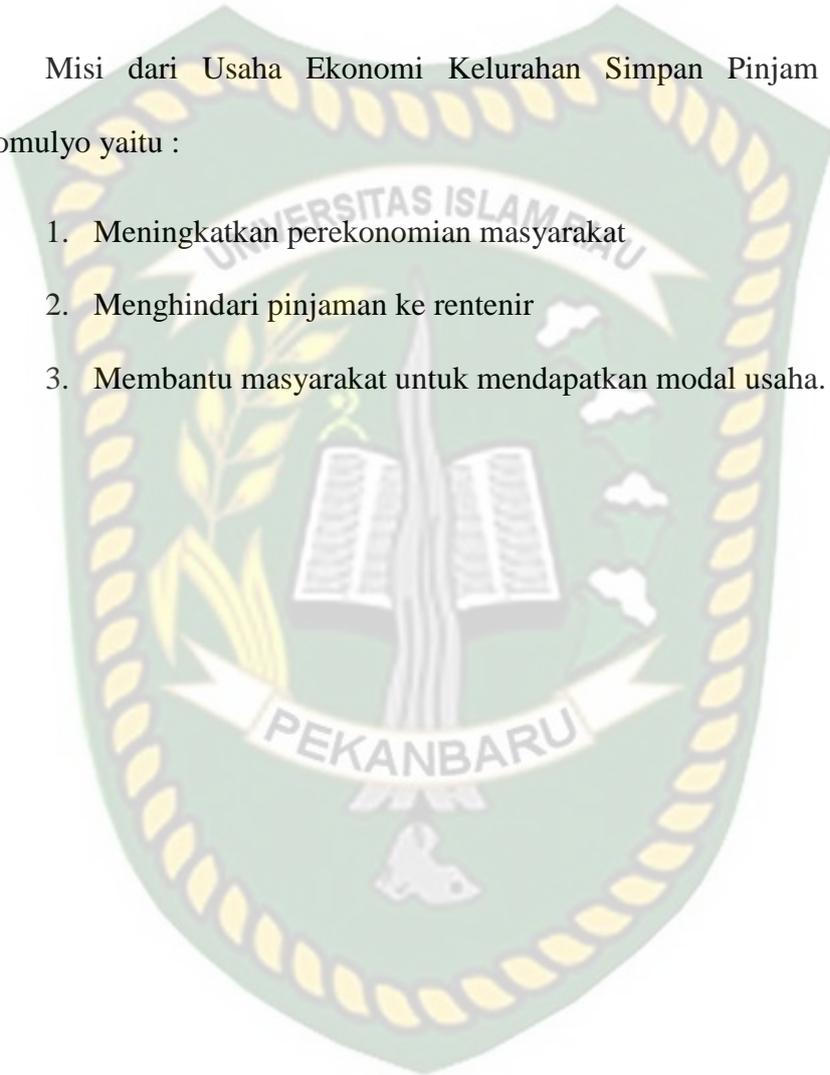
Bentuk riil dari program ini adalah untuk melayani masyarakat pengusaha kecil yang ingin mendapatkan pinjaman modal dari kantor Kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru. Dengan demikian, Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) yang ada di beberapa kelurahan di Kota Pekanbaru adalah salah satu alternatif lembaga keuangan bukan bank yang dapat memberikan perhatian kepada masyarakat miskin atau ekonomi lemah yang menginginkan modal bantuan usaha.

Adapun visi dan misi dari Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Sidomulyo ini yaitu :

Visi dari Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Sidomulyo yaitu “Memberikan Pinjaman Ke Masyarakat Agar Bisa Membantu Usaha Kecil dan Menengah”.

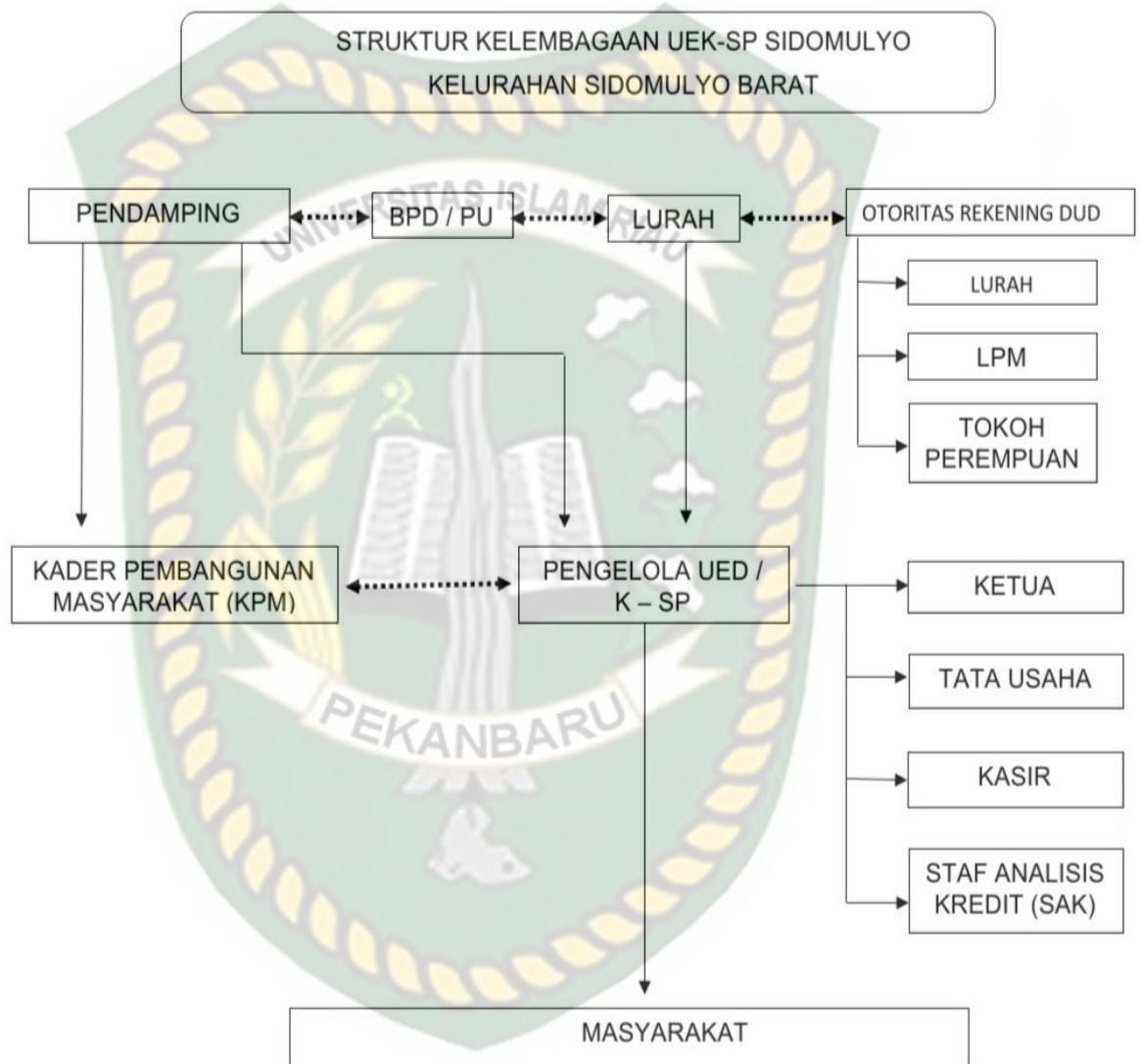
Misi dari Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Sidomulyo yaitu :

1. Meningkatkan perekonomian masyarakat
2. Menghindari pinjaman ke rentenir
3. Membantu masyarakat untuk mendapatkan modal usaha.



Adapun struktur dari kelembagaan didalam Usaha Ekonomi Kelurahan

Simpan Pinjam (UEK-SP) Sidomulyo ini antara lain:



Gambar I.1: Struktur Kelembagaan UEK-SP Sidomulyo Kelurahan Sidomulyo Barat.

Sumber Gambar: Kantor UEK-SP Sidomulyo 2021

Dari gambar struktur kelembagaan UEK-SP Sidomulyo Kelurahan Sidomulyo Barat tersebut, dijelaskan bahwa Pendamping Desa, Bpu/Pu dan Lurah memiliki hubungan yang saling berkoordinasi untuk melakukan dan melaksanakan tugasnya yaitu mengawasi berjalannya program UEK-SP tersebut. Sedangkan 3 otoriter pemegang Dana Usaha Kelurahan UEK-SP ini yaitu Lurah, Lpm, dan Tokoh Perempuan. Sementara Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) dengan pengelola UEK-SP harus berkoordinasi serta berdampingan dalam menjalankan tugasnya untuk membantu mensosialisasikan program ini kepada masyarakat. Adapun pengelola UEK-SP terdiri dari Ketua, Tata Usaha, Kasir dan Staf Analisis Kredit (Sak). Pengelola UEK-SP bersentuhan langsung dengan masyarakat atau pemanfaat yang ingin meminjam dana untuk usahanya.

Program ini dijalankan langsung oleh pengelola Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam itu sendiri yang terdiri dari Ketua, Tata Usaha, Kasir, dan Staf Analisis Kredit (SAK) dan diawasi langsung oleh Pendamping Desa, Pengawasan Umum dan Lurah Sidomulyo Barat. yang mana sasaran langsung dari program ini adalah masyarakat yang memiliki usaha dan membutuhkan dana usaha untuk memperbaiki atau membantu usahanya.

Tabel I.2 : Lokasi Dan Alokasi Dana Usaha Kelurahan T.A 2005-2014

No	Kelurahan	Dana Usaha Kelurahan (DUK)		Tahun	Sumber Dana
		Alokasi	Terserap		
1	2	3	4	5	6
1.	Muara Fajar	Rp. 500.000.000	Rp 500.000.000	2005	APBD Prov
2.	Umbansari	Rp 500.000.000	Rp. 500.000.000	2005	APBD Prov
3.	Simpang Baru	Rp 550.000.000	Rp 550.000.000	2005	APBD Kota
4.	Sidomulyo Barat	Rp 550.000.000	Rp 550.000.000	2005	APBD Kota
	Jumlah	Rp. 2.100.000.000	Rp 2.100.000.000		
5.	Kulim	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	2006	APBD Prov
6.	Sail/Bencah Lesung	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	2006	APBD Prov
	Jumlah	Rp 1.000.000.000	Rp 1.000.000.000		
7.	Simpang Tiga	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	2007	APBD Kota
8.	Tangkerang Tengah	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	2007	APBD Kota
9.	Kampung Tengah	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	2007	APBD Prov
10.	Pesisir	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	2007	APBD Prov
11.	Tanjung Rhu	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	2007	APBD Prov
12.	Lembah Damai	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	2007	APBD Prov
13.	Merabti Pandak	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	2007	APBD Prov
	Jumlah	Rp 3.500.000.000	Rp 3.500.000.000		
14.	Kampung Melayu	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	2008	APBD Kota
15.	Tangkerang Selatan	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	2008	APBD Kota
16.	Maharatu	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	2008	APBD Kota
17.	Labuh Baru Timur	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	2008	APBD Prov
18.	Tampan	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	2008	APBD

					Prov
19.	Padang Bulan	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	2008	APBD Prov
20.	Kampung Bandar	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	2008	APBD Prov
	Jumlah	Rp 3.500.000.000	Rp 3.500.000.000		
21.	Lembah Sari	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	2009	APBD Prov
22.	Tebing Tinggi Okura	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	2009	APBD Prov
23.	Palas	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	2009	APBD Kota
24.	Sukamulia	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	2009	APBD Kota
25.	Sumahilang	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	2009	APBD Prov
26.	Tanah Datar	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	2009	APBD Prov
27.	Tangerang Barat	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	2009	APBD Kota
	Jumlah	Rp 3.500.000.000	Rp 3.500.000.000		
28.	Tangerang Utara	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	2010	APBD Prov
29.	Labuh Baru Barat	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	2010	APBD Prov
30.	Air Hitam	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	2010	APBD Prov
31.	Sidomulyo Timur	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	2010	APBD Kota
32.	Rejosari	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	2010	APBD Kota
33.	Tangerang Timur	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	2010	APBD Kota
	Jumlah	Rp 3.000.000.000	Rp 3.000.000.000		
34.	Tuah Karya	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	2011	APBD Kota
35.	Delima	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	2011	APBD Prov
36.	Rumbai Bukit	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	2011	APBD Prov
37.	Limbangan	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	2011	APBD Kota
38.	Kedung Sari	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	2011	APBD Kota
	Jumlah	Rp 2.500.000.000	Rp 2.500.000.000		

39.	Wonorejo	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	2012	APBD Prov
40.	Pulau Karomah	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	2012	APBD Prov
41.	Tangerang Labuai	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	2012	APBD Prov
42.	Limbungan Baru	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	2012	APBD Kota
43.	Sri Meranti	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	2012	APBD Kota
44.	Sekip	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	2012	APBD Kota
	Jumlah	Rp 3.000.000.000	Rp 3.000.000.000		
45.	Sukajadi	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	2013	APBD Prov
46.	Jadirejo	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	2013	APBD Prov
47.	Kota Baru	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	2013	APBD Prov
48.	Sukaramai	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	2013	APBD Prov
49.	Sago	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	2013	APBD Prov
50.	Kampung Baru	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	2013	APBD Kota
51.	Sukamaju	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	2013	APBD Kota
52.	Cinta Raja	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	2013	APBD Kota
	Jumlah	Rp 4.000.000.000	Rp 4.000.000.000		
53.	Kampung Dalam	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	2014	APBD Kota
54.	Padang Terubuk	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	2014	APBD Kota
55.	Kota Tinggi	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	2014	APBD Kota
56.	Simpang Empat	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	2014	APBD Kota
57.	Rintis	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	2014	APBD Kota
58.	Harjosari	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000	2014	APBD Kota
	Jumlah	Rp 3.000.000.000	Rp 3.000.000.000		
	Total	Rp 29.100.000.000	Rp 29.100.000.000		

Sumber: Kantor PPK Kota Pekanbaru 2021

Berdasarkan tabel diatas, berikut adalah lokasi dan alokasi dana kelurahan dari tahun 2005 sampai dengan 2014 yang telah digulirkan ke 58 kelurahan yang ada di Pekanbaru. Pada awal program ini dijalankan tahun 2005, Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Sidomulyo menerima bantuan dana awal sebesar Rp.550.000.000 yang dianggarkan dari APBD Kota. dimana dana yang digulirkan diberikan secara bertahap untuk Kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru. Adapun perputaran modal yang terjadi di kantor UEK-SP Sidomulyo dari awal pelaksanaan sampai dengan September 2021 yaitu sebesar Rp. 4.056.550.000. Dijelaskan oleh salah satu pegawai UEK-SP Sidomulyo bahwa jumlah dana awal sebesar Rp. 550.000.000 dan sudah kembali modal.

Dalam Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Kelurahan Kota Pekanbaru menjelaskan tentang persyaratan sebagai pemanfaat dana usaha Kelurahan program UEK-SP yaitu dengan kriteria sebagai berikut :

1. Warga Kelurahan yang telah berdomisili tetap di Kelurahan minimal 3 tahun.
2. Tercatat sebagai anggota aktif UEK-SP.
3. Memiliki usaha atau rencana usaha.
4. Dinilai layak oleh analisis kredit baik secara administrasi maupun usaha.
5. Peminjam perorangan diwajibkan menggunakan agunan.
6. Peminjam melalui kelompok dengan peminjam lebih dari Rp. 1.000.000 per anggota, maka diwajibkan menggunakan agunan, sedangkan untuk nilai pinjaman dengan nilai maksimal Rp.1.000.000 per anggota, agunan dapat diganti dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Tanggung Renteng oleh Kelompok (sesuai dengan Kesepakatan Tanggung Renteng Kelompok).
7. Surat pernyataan tanggung renteng harus dibuat diatas kertas bermaterai dengan menyebutkan sumber dana yang akan digunakan

untuk tanggung renteng, ditandatangani oleh seluruh anggota peminjam.

8. Pendamping Kelurahan wajib memfasilitasi seluruh peminjam dalam proses verifikasi. Untuk peminjam dengan nilai lebih dari Rp. 20.000.000 sampai dengan Rp. 30.000.000 harus ada rekomendasi dari Koordinator Daerah dalam penentuan kelayakan usahanya.
9. Maksimal pinjaman ke lembaga UEK-SP adalah Rp. 30.000.000 dan batas maksimal ini dapat disepakati di kelurahan untuk memperkecil, misalnya maksimal Rp. 10.000.000.
10. Peminjam dinilai baik (pengembalian tepat waktu, tidak pernah menunggak) dapat diberikan tambahan pinjaman.
11. Untuk membantu usaha yang sudah berkembang dengan baik pengelola UEK-SP, pendamping Kelurahan hendaknya dapat memfasilitasi peminjam tersebut kelembagaan keuangan lainnya.
12. Lurah yang akan meminjam dana UEK-SP harus memiliki usaha dan mendapat rekomendasi dari BPPMKB dan Koordinator Daerah
13. Pendamping daerah tidak dibenarkan menggunakan dan meminjam dana UEK-SP.

Bentuk kegiatan pembagian jasa dalam UEK-SP Sidomulyo ini tidak hanya itu saja tetapi ada juga untuk kegiatan sosial, dibagikan kembali manfaat/anggota dengan nama Musyawarah Kelurahan Pertanggung jawaban Tahunan (MKPT) yang dilaksanakan sekali setahun di setiap kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru.

Dari Musyawarah Kelurahan Pertanggung jawaban Tahunan (MKPT) ini yaitu berbagi dengan masyarakat dan berdiskusi dengan pemanfaat apa saja yang dibutuhkan. Dan membantu mereka yang tidak mempunyai modal usaha di Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) inilah mereka dipinjamkan modal usaha untuk mengembangkan usahanya.

Dari hasil wawancara sementara penulis dengan pengelola UEK-SP Sidomulyo mengenai pencapaian yang diterima oleh UEK-SP di Kelurahan

Sidomulyo Barat dari tahun 2005 sampai dengan sekarang yaitu membantu dan memberikan kesejahteraan bagi pemanfaat dan berbagi dengan masyarakat sekitar.

Pencapaian lain yang didapat oleh UEK-SP Sidomulyo yaitu UEK-SP Sidomulyo ini termasuk kedalam peringkat 15 besar dari 58 Kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru dilihat dari Sisa Hasil Usaha (SHU).

Tabel I.3: Laporan Laba Rugi UEK-SP Se Kota Pekanbaru Tahun 2020

NO	UEK-SP	KELURAHAN	SHU
1.	UEK-SP TUAH KARYA	Tuah Karya	Rp 73.478.930
2.	UEK-SP FAJAR KEHIDUPAN	Muara Fajar	Rp 49.175.452
3.	UEK-SP MAJU BERSAMA	Tanjung Rhu	Rp 44.648.320
4.	UEK-SP PANAM LESTARI	Simpang Baru	Rp 43.660.958
5.	UEK-SP MITRA BERSAMA	Tebing Tinggi Okura	Rp 40.100.741
6.	UEK-SP DAMAI SEJAHTERA	Lembah Damai	Rp 38.385.707
7.	UEK-SP KAMPUNG TENGAH	Kampung Tengah	Rp 36.368.809
8.	UEK-SP LEMBAH SARI MAKMUR	Lembah Sari	Rp 35.370.248
9.	UEK-SP INDAH SAGO	Sago	Rp 35.268.236
10.	UEK-SP CAHAYA UMBASARI	Umbasari	Rp 33.216.494
11.	UEK-SP SIMPANG TIGA	Simpang Tiga	Rp 31.314.361
12.	UEK-SP SIDOMULYO BARAT	Sidomulyo Barat	Rp 30.388.573
13.	UEK-SP AIR HITAM GEMILANG	Air Hitam	Rp 26.802.772
14.	UEK-SP MERANTI JAYA	Meranti Pandak	Rp 22.792.581
15.	UEK-SP LBB SAKINAH	Labuh Baru Barat	Rp 20.806.597
16.	UEK-SP KEDUNG SARI	Kedung Sari	Rp 20.643.177
17.	UEK-SP BERKAH ILAHI	Tangkerang Selatan	Rp 20.327.143
18.	UEK-SP AMANAH MANDIRI	Sidomulyo Timur	Rp 19.472.767
19.	UEK-SP RUMBAL BERSATU	Rumbai Bukit	Rp 19.100.536
20.	UEK-SP SUKAJADI	Sukajadi	Rp 17.840.365
21.	UEK-SP LIMBAR JAYA	Limbangan Baru	Rp 15.872.329
22.	UEK-SP SAIL JAYA	Bencah Lesung	Rp 15.084.038
23.	UEK-SP KULIM PERMAI	Mentangor	Rp 12.450.200
24.	UEK-SP SIMPANG EMPAT MAKMUR	Simpang Empat	Rp 12.359.998

25.	UEK-SP SEKIP BERJAYA	Sekip	Rp	11.760.642
26.	UEK-SP BUNGA TANJUNG	Pesisir	Rp	11.517.336
27.	UEK-SP WONER BINA JAYA	Winorejo	Rp	11.171.576
28.	UEK-SP HARJOSARI	Harjosari	Rp	1.022.986
29.	UEK-SP HARAPAN BERSAMA	Kampung Melayu	Rp	9.160.502
30.	UEK-SP PRIMADANA SEJAHTERA	Pulau Karamah	Rp	8.270.250
31.	UEK-SP LIMBUNGAN JAYA	Limbungan Baru	Rp	7.300.798
32.	UEKS-SP HARAPAN JAYA	Tangkerang Utara	Rp	6.008.979
33.	UEK-SP BULAN PURNAMA	Padang Bulan	Rp	5.869.144
34.	UEK-SP MAHARATU JAYA	Maharatu	Rp	5.333.200
35.	UEK-SP LBT SEJAHTERA	Labuh Baru Timur	Rp	4.163.722
36.	UEK-SP TUNAS MANDIRI	Rintis	Rp	403.387
37.	UEK-SP BANDAR BERTUAH	Kampung Bandar	Rp	3.232.475
38.	UEK-SP SUMA MANDIRI	Sumahilang	Rp	3.143.548
39.	UEK-SP SRIKANDI MANDIRI	Delima	Rp	2.217.849
40.	UEK-SP TUAH BERSAMA	Jadirejo	Rp	2.002.232
41.	UEK-SP TERUBUK BERJAYA	Padang Terubuk	Rp	1.994.549
42.	UEK-SP TAMPAN LESTARI	Tampan	Rp	1.047.450
43.	UEK-SP LABAUAI MANDIRI	Tangkerang Labuai	Rp	810.606
44.	UEK-SP SUKAMAJU BINA SEJAHTERA	Sukamaju	Rp	728.353
45.	UEK-SP CINTA RAJA SEJATI	Cintaraja	Rp	603.000
46.	UEK-SP BERSAMA SEJAHTERA	Tangkerang Tengah	Rp	570.410
47.	UEK-SP MAHKOTA JATI	Kampung Baru	Rp	516.268
48.	UEK-SP KOTA BARU	Kota Baru	Rp	489.744
49.	UEK-SP SUKAMULIA LESTARI	Sukamulia	Rp	361.444
50.	UEK-SP MEKAR SARI	Rejosari	Rp	266.000
51.	UEK-SP TANAH BERLIAN	Tanah Datar	Rp	111.244
52.	UEK-SP RESTU BUNDA	Sukaramai	Rp	(284.100)
53.	UEK-SP KOTA TINGGI JAYA	Kota Tinggi	Rp	(770.367)
54.	UEK-SP MERANTI SEPAKAT	Sri Meranti	Rp	(1.420.892)
55.	UEK-SP TIMUR JAYA	Tangkerang Timur	Rp	(2.007.039)
56.	UEK-SP PALAS MANDIRI	Palas		-
57.	UEK-SP BINTANG PELITA BAROKAH	Kampung Dalam		-
58.	UEK-SP TAMBAR JAYA	Tangkerang Barat		-

Sumber data: Kantor Program Pemberdayaan Kelurahan (PPK) Kota Pekanbaru
2021

Berdasarkan hasil wawancara sementara dengan bapak Selamat selaku bagian Pemberdayaan Masyarakat Setda Pekanbaru yaitu menjelaskan bahwa adapun kriteria yang dinilai untuk melihat peringkat dari SHU (Sisa Hasil Usaha) dari tiap UEK-SP yang ada di Kelurahan Kota Pekanbaru dilihat dari yaitu :

1. Kelembagaan, aktif/tidak aktif program tersebut dilihat dari tingkat Kelurahan seperti LPM, Tokoh Perempuan, atau Lurah nya sendiri. Selanjutnya pengelola dilihat dari otoritas dana usaha kelurahan, ketika aktif itu sudah bagus dan terlebih adanya kantor .
2. Laporan keuangan, dilihat apakah kas ditangan tidak melebihi angka satu juta perbulan, tunggakan pemanfaat max 6% dan perguliran masyarakat dilakukan setiap bulan sesuai dengan prosedur program.
3. SHU (Sisa Hasil Usaha), tingkat pendapatan SHU mampu memberikan tortibusi pengelola, otoritas, serta masyarakat dikelurahan.
4. Partisipasi masyarakat, keaktifan masyarakat ketika ada musyawarah kelurahan, mendukung program dengan menjadi anggota UEK-SP dengan menetapkan simpanan pokok/wajib, serta bagi pemanfaat menjalankan keajiban sebagai pemanfaat dengan membayar angsuran tepat waktu.

Dapat dilihat pada Tabel I.2 bahwa Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Sidomulyo berada pada urutan yang ke 12 dari 58 kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru. dijelaskan oleh ibu Indra Susanti selaku Asisten Data pada Program Pemberdayaan Kelurahan.d Kordinator Daerah Kota Pekanbaru mengatakan :

“untuk UEK-SP yang strip (-) itu UEK-SP nya sudah tidak aktif lagi jadi tidak ada kegiatan begitu, sementara yang minus itu, itulah yang kakak katakan tadi kalau seandainya UEK-SP itu tidak bisa menekan biaya operasional, ibarat kata tingkat pengembalian ada, orang yang membayar tidak ada sementara biaya operasional mereka wajib mengeluarkan setiap bulan, minimal untuk membuat laporan karnakan UEK-SP itu masing-masing wajib membuat laporan ke sekretariat setiap bulan, nah tentu itu butuh biaya operasional membeli kertasnya,

membeli tinta printernya, untuk menjilidnya tentu butuh biaya, nah sementara kalau tidak ada pengembalian, tidak ada pembayaran dari masyarakat tentu terpakai modal itulah makanya sampai minus, jadi pendapatan tidak ada sementara biaya ada”.

(Wawancara: 24 Agustus, Selasa Pukul 09.47 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara sementara penulis dengan salah satu pengelola UEK-SP Sidomulyo yaitu dengan ibu Erlina Lubis selaku tata usaha dalam struktur kelembagaan UEK-SP Sidomulyo mengatakan

“Dana yang ada dibagi menjadi 55% untuk insentif, 10% untuk biaya operasional dan 35% ini untuk sisa hasil usaha yang kemudian dari 35% ini ada pembagian lagi yaitu 30% untuk dikembalikan kerekening untuk tambahan modal atau cadangan modal dan 5% untuk kebutuhan hadiah atau acara-acara yang ada. Dan cadangan modal yang ada sama kami sekarang sudah cukup banyak yaitu Rp.80.000.000 dari mulai dan sudah pernah diambil untuk benah benah kantor atau lainnya, sebenarnya boleh uang itu di ambil tapi sedapat mungkin jangan diambil ”

(Wawancara: Kamis 27 Mei 2021 pukul 10.48 WIB).

Dalam Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Kelurahan Kota Pekanbaru menjelaskan tentang agunan, yaitu sebagai berikut :

1. Keamanan agunan menjadi tanggungjawab pengelola UEK-SP.
2. Pengelola UEK-SP wajib menyediakan tempat penyimpanan dokumen agunan, biayan yang timbul dibebankan pada dana operasional UEK-SP dan atau dana operasional kelurahan.
3. Letak agunan dibolehkan diluar kelurahan, dengan syarat biaya pemeriksaan ditanggung calon peminjam
4. Pengelola UEK-SP wajib membuat daftar inventaris agunan dan dipegang oleh pengelola UEK-SP dan Pemenintah Kelurahan.
5. Agunan dalam bentuk barang bergerak yang dapat diterima adalah berupa kendaraan roda empat, roda dua yang mempunyai nilai ekonomi dengan menyerahkan Surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
6. Nilai agunan barang bergerak dihitung pada akhir jatuh tempo.

7. Besarannya nilai pinjaman dengan agunan barang bergerak adalah maksimal 40% dari nilai agunan yang dihitung pada akhir peminjaman/akhir jatuh tempo.
8. Besarannya nilai pinjaman dengan agunan barang tidak bergerak adalah maksimal 50% dari nilai agunan.
9. Agunan barang bergerak bila terjadi kehilangan masih dalam jamina pinjaman maka peminjam harus mengganti agunan yang hilang dengan agunan yang baru atau melunasi pinjaman.
10. Penetapan nilai agunan dilakukan oleh analisis kredit berdasarkan kriteria yang berlaku dilingkungan masyarakat setempat.
11. Mekanisme peminjaman BPKB yang diagunkan untuk kegiatan perpanjangan STNK dan pembayaran pajak, harus dinyatakan secara tertulis antara peminjam dengan pengelola UEK-SP yang diketahui oleh Pemegang Otoritas Kelurahan dan setelah itu harus dikembalikan paling lambat 3 hari setelah pengurusan.
12. Surat pernyataan kesanggupan tanggung renteng bagi kelompok masyarakat miskin.

Dalam UEK-SP Sidomulyo ini memiliki agunan dalam peminjaman dana yaitu agunan terendah pada tahun 2008 yaitu BPKB, dan untuk peminjaman dana sebesar Rp.1.000.000 yaitu agunannya adalah KK. Selama berjalannya program UEK-SP ini ada beragam agunan sebagai penjamin dari pemanfaat yaitu diantaranya ada SKGR, sertifikat dan yang paling banyak yaitu BPKB. Didalam Kelurahan Sidomulyo Barat ini tidak ada agunan yang ditarik oleh pengelola UEK-SP tersebut.

Sejauh ini usaha-usaha masyarakat yang telah dibantu oleh Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Sidomulyo yaitu dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel I.4: Usaha-Usaha Yang Di Danai Oleh UEK-SP Sidomulyo
dari tahun 2006-2020**

No	Jenis Usaha	Orang
1.	Perdagangan	487
2.	Petani	29
3.	Perkebunan	1
4.	Perikanan	9
5.	Peternakan	2
6.	Industry kecil	11
7.	Jasa (transportasi, sewa kosan, pengjahit konveksi)	148
	Jumlah	687

Sumber data: laporan UEK-SP Sidomulyo 2021

Berdasarkan pada Tabel I.4 diatas, bisa dilihat bahwasanya keseluruhan orang yang telah mengikuti Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Sidomulyo di Kelurahan Sidomulyo Barat ini dari tahun 2006 sampai dengan 2020 sebanyak 687 orang. yang terdiri dari berbagai jenis usaha seperti perdagangan, petani, perkebunan, perikanan, peternakan, industry kecil maupun jasa seperti transportasi, sewa kosan maupun pengjahit konveksi. Dan yang paling banyak meminjam dana yaitu dari jenis usaha perdagangan.

Adapun fasilitas yang terdapat didalam kantor pengelola UEK-SP Sidomulyo ini yaitu:

Tabel I.5: Fasilitas yang dimiliki UEK-SP Sidomulyo Desember2020

No	Jenis Inventaris	Jumlah
1.	Meja	9
2.	Kursi Putar	3
3.	Komputer	2
4.	File Kabinet	1
5.	Fil Box	1
6.	TV	1
7.	Printer	2
8.	Papan Pengumuman	1
9.	Laptop	1
10.	Dispenser	2
11.	Kipas Angin	2
12.	Rak Dispenser	1
13.	Perlengkapan Makan	20

Sumber Data : UEK-SP Sidomulyo2021

Dijelaskan pada Tabel I.5 diatas, ada beberapa jenis meja yang ada di kantor UEK-SP ini yaitu meja komputer, meja kasir, meja printer, dan meja kantor. Dan selain printer ada juga jenis printer canon IP2770. Ini semua merupakan fasilitas kantor yang dimiliki UEK-SP Sidomulyo di Kelurahan Sidomulyo Barat.

Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Kelurahan Kota Pekanbaru menjelaskan tentang verifikasi usulan kegiatan untuk peminjaman dana usaha kelurahan program UEK-SP meliputi:

- A. Ruang lingkup verifikasi :
 - a. Verifikasi meliputi pemeriksaan administrasi dan kelengkapan proposal serta pemeriksaan lapangan
 - b. Pelaksanaan tugas verifikasi difasilitasi oleh Analisis Kredit
 - c. Prndamping Kelurahan memfasilitasi secara aktif dalam setiap tahapan proses verifikasi
 - d. koordinator Daerah (KORDA) memastikan pelaksanaan verifikasi usulan kegiatan sesuai dengan mekanisme PPK.

B. Alur Kegiatan Verifikasi

- a. Calon pemanfaat mengajukan proposal rencana usaha pemanfaat (RUP)
- b. Pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi rencana usulan pemanfaat (RUP) oleh analisis kredit
- c. Kalau ada hal-hal yang dirasakan belum lengkap, maka analisis kredit memberikan kesempatan kepada calon pemanfaat untuk memperbaiki proposalnya.
- d. Perbaikan RUP oleh pemanfaat
- e. Pemeriksaan kembali terhadap RUP yang telah diperbaiki.
- f. Suvey lapangan
- g. Pemberian hasil verifikasi oleh analisis kredit kepada otoritas, pengawas, KPM, pengelola dan Pendamping Kelurahan.
- h. Rapat khusus rekomendasi akhir oleh otoritas, pengawas, KPM, pengelola dan Pendamping Kelurahan.
- i. Pemberian umpan balik kepada calon pemanfaat
- j. Selanjutnya dibawa ke MK II atau MK Perguliran.

C. Tahapan verifikasi

- a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi usulan meliputi :
 - Kartu Tanda Penduduk
 - Kartu Keluarga
 - Proposal Usulan Peminjam
 - Fotocopy Agunan (kecuali masyarakat miskin)
 - Surat pernyataan tanggung renteng untuk masyarakat usaha yang berkelompok
 - Surat rekomendasi dari Kepala BPPMKB bagi Lurah dan Aparat Kelurahan yang ingin meminjam
 - Persyaratan lain sesuai dengan kesepakatan kelurahan
- b. Survey lapangan untuk menilai
 - Tempat usaha
 - Kesesuaian usaha yang dilakukan dengan yang diusulkan dalam proposal
 - Kesesuaian penggunaan dana dengan kebutuhan usaha
 - Kebenaran dan nilai agunan yang diajukan
 - Kapasitas usaha dan kemampuan mengembalikan pinjaman
 - Karakter calon pemanfaat
- c. Rekomendasi yang ditentukan dengan skala prioritas :
 - Diberikan untuk masyarakat miskin (yang memiliki usaha) yang memenuhi syarat

- Masyarakat lainnya yang layak diberikan sesuai dengan : potensi usaha, nilai pinjaman, potensi penyerapan tenaga kerja, lokasi usaha, karakter calon pemanfaat, dan utang dengan pihak luar.

Adapun jumlah anggota dan dana yang telah bergulir dari tahun 2018 sampai 2020 yaitu dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel I.6: Jumlah Anggota dan Dana yang Telah Bergulir Dari Tahun 2019-2020

No	Tahun	Jumlah Anggota	Perguliran	Jumlah Dana
1.	2019	31 orang	109 s/d 128	Rp. 318.000.000
2.	2020	21 orang	129 s/d 140	Rp. 171.000.000

Sumber Data : Laporan UEK-SP Sidomulyo 2021

Dari Tabel I.6 diatas bisa dilihat bahwa adanya penurunan anggota yang terjadi di UEK-SP Sidomulyo sebanyak 10 orang yang mana pada tahun 2019 lebih tinggi daripada tahun 2020, yaitu tahun 2019 berjumlah 31 anggota sedangkan pada tahun 2020 berjumlah 21 orang dan otomatis jumlah dana yang bergulir lebih sedikit dari pada tahun sebelumnya.

Adapun jumlah gender pemanfaat yang meminjam di kantor UEK-SP Sidomulyo ini adalah sebagai berikut:

Table 1.7: Jumlah Gender Pemanfaat Yang Meminjam Di Kantor UEK-SP Sidomulyo Sampai September 2021

No	Gender	Persentase
1.	Laki-laki	74%
2.	Perempuan	53%

Sumber Data: Kantor UEK-SP Sidomulyo

Berdasarkan Tabel 1.7 diatas, bahwa jumlah peminjam laki-laki lebih banyak meminjam dana usaha kelurahan daripada jumlah peminjam

perempuan. Ini berdasarkan dari hasil keseluruhan SP2K dari 700 peminjam sampai dengan Oktober 2021.

Tabel I.8: Besaran Tunggakan UEK-SP Sidomulyo dari tahun 2019 - 2020

No	Bulan	2019	2020
1.	Januari	Rp.248.506.967	Rp.263.208.933
2.	Februari	Rp.254.019.600	Rp.278.591.689
3.	Maret	Rp.242.673.456	Rp.282.325.522
4.	April	Rp.249.317.511	Rp.293.387.744
5.	Mei	Rp.254.942.333	Rp.297.160.100
6.	Juni	Rp.261.118.933	Rp.297.097.000
7.	Juli	Rp.249.024.589	Rp.305.532.300
8.	Agustus	Rp.253.533.200	Rp.707.700.633
9.	September	Rp.256.030.233	Rp.314.347.856
10	Oktober	Rp.259.866.833	Rp.317.314.367
11.	November	Rp.262.849.711	Rp.325.955.367
12.	Desember	Rp.266.385.933	Rp.329.643.589

Sumber data: laporan UEK-SP Sidomulyo 2021

Berdasarkan pada Tabel 1.8 diatas, bisa dilihat bahwa nilai tunggakan tahun 2020 meningkat daripada tahun 2019. Ini diakibatkan masih banyaknya pemanfaat yang berkendala mengembalikan pinjaman dan juga adanya pemanfaat yang mengalami kegagalan dalam usahanya dikarenakan salah satunya yaitu terkendala karena covid 19 yang saat ini sedang terjadi di seluruh dunia termasuk Indonesia. Sistem perhitungan yang dilakukan oleh pengelola

UEK-SP Sidomulyo pada nilai tunggakan ini yaitu setiap bulan nya nilai tunggakan ditambah dengan nilai tunggakan bulan sebelumnya sehingga menghasilkan nilai tunggakan pada bulan selanjutnya. Berdasarkan hasil pengecekan buku laporan bulanan pada bulan September 2021 di kantor UEK-SP Sidomulyo bahwa 72% penunggakan yang terjadi di kantor UEK-SP Sidomulyo ini, hal berdasarkan jumlah penunggak pemanfaat keseluruhan yang ada pada SP2K sekitar 700 peminjam dan keseluruhan dari modal awal.

Berdasarkan hasil wawancara sementara penulis dengan salah satu pengelola UEK-SP Sidomulyo di Kelurahan Sidomulyo Barat ini yaitu dengan ibu Erlina Lubis selaku Tata Usaha dalam struktur pengelola UEK-SP mengatakan bahwa :

“Apabila pemanfaat yang menunggak sudah jatuh tempo maka sistem pembayaran semampunya dan ini berlaku pada masa covid-19. Jika pemanfaat belum jatuh tempo maka sistem pembayarannya boleh diangsur 2/3 kali dalam satu bulan. Dan untuk pemanfaat yang usahanya yang gagal maka sistem pembayarannya mereka tetap harus bayar tetapi ketika dan kapan mereka punya dana saja ini dikarenakan belum adanya penanggulangan mengenai pemanfaat yang gagal dalam usahanya. Dan di UEK-SP Sidomulyo Kelurahan Sidomulyo Barat ini belum memberlakukan surat peringatan (sp) untuk pemanfaat yang menunggak.”

(Wawancara: Rabu, 24 Maret 2021, Pukul 13.45 WIB).

Dijelaskan juga bahwa UEK-SP Sidomulyo di Kelurahan Sidomulyo Barat ini adanya melakukan kontrol/visit lapangan tetapi tidak menentu ketika pengelola ingin survey pemanfaat baru dan disempatkan mampir ke tempat usaha pemanfaat yang berdekatan. Dan melakukan sharing ketika pemanfaat

membayar angsuran di kantor UEK-SP Sidomulyo di Kelurahan Sidomulyo Barat.

Setelah penulis pra suvey dilapangan, adapun beberapa fenomena yang ditemukan yaitu :

1. Masih banyak masyarakat yang terkendala mengembalikan dana pinjaman tepat waktu salah satu faktornya usaha di kelola mengalami penurunan yang berakibat pada penunggakan.
2. Pengelola UEK-SP Sidomulyo di Kelurahan Sidomulyo Barat ini belum sepenuhnya tegas dalam menerapkan sanksi-sanksi yang berlaku terhadap pemanfaat yang telat dalam pembayaran maupun menunggak yang mengakibatkan terkendala pengembalian pinjaman.
3. Belum adanya pembinaan yang berikan pengelola UEK-SP Sidomulyo untuk mengontrol dan membina masyarakat terkait pengembalian dana usaha yang diberikan.
4. Belum adanya anggaran dana yang untuk tersedia untuk upah/gaji para pengelola UEK-SP Sidomulyo di Kelurahan Sidomulyo Barat ini.

Berdasarkan fenomena dapat dilihat bahwa ada beberapa dan penelitian yang penulis temukan dilapangan tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Sidomulyo Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Sidomulyo Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.

C. Tujuan dan Kegunaan Peneliti

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan penetapan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Sidomulyo Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru

2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan akademis sebagai bahan referensi atau bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang dilakukan penelitian yang sama.
2. Kegunaan teoritis untuk menambah pengetahuan bagi pihak yang ingin meneliti yang sama daerah yang berbeda.

3. Kegunaan praktis untuk meningkatkan keterampilan penelitian dalam mengarahkan dan menyediakan data dan fakta secara sistematis.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Dalam upaya memecahkan masalah penelitian ini, maka penulis mencoba mengemukakan dan menindak pada teori yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Sehingga dalam hal tersebut diharapkan dapat memberikan dasar dan arahan bagi penelitian yang dilakukan.

1. Konsep Administrasi

Secara *etimologis*, Wirman Syafri (2012:3) administrasi berasal dari bahasa Latin *ad* dan *ministrar*, yang berarti “membantu, melayani, atau memenuhi”, serta *administration* yang berarti “pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan, pengelolaan”.

Definisi administrasi yang secara implisit menggambarkan keseluruhan dimensi itu dirumuskan oleh The Liang Gie dalam (Zulkifli 2009:13) administrasi merupakan segenap rangkaian penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu.

Beddy Irawan (2017:25) mengatakan di Indonesia administrasi merupakan kegiatan dengan bantuan berbagai sumber daya untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sering didefinisikan dalam artian sempit. Oleh karena itu dijelaskan juga administrasi dalam arti “sempit” maupun “luas” sebagai berikut :

1. Adminstrasi dalam arti sempit

Adminsitration khususnya di Indonesia sering di maknai dengan kegiatan “*tulis-menulis*” “*catat-mencatat*” “*mengetik*” “*surat-menyurat*”, yaitu suatu proses kegiatan yang berkaitan dengan pengiriman informasi secara tertulis di mulai dari penyusunan, penulisan hingga pengiriman informasi dan sampai kepada pihak yang telah dituju.

2. Administrasi dalam arti luas

Sebagai proses kerja sama saat penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.

Menurut Sondang P. Siagian (Beddy Irawan (2017:28) administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Atmosudirdjo (Zulkifli 2009:10) terpaksa harus merumuskan ragam pengertian untuk menerangkan lingkup konsep adminsitration yaitu :

1. Administrasi sebagai fungsi atau kegiatan (activity) adalah seperangkat kagiatan-kegiatan yang tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin serta mengendalikan suatu organisasi modern yang menjadi wahana suatu urusan atau usaha dan sekaligus apa yang berlangsung di dalamnya.
2. Organisasi modern sevagai badan, adalah organisasi yang mempunyai konsultasi dan statula yang tertentu sehingga jenis apa yang menjadi maksud (*purpose*) dan tujuan-tujuannya

(*goals*), usahanya, sumber pendanaannya (*financial resource*), serta langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan-tujuannya.

3. Setiap organisasi modern dikepalai (yang bertugas dan bertanggungjawab) dan dipimpin (yang menggerakkan secara terarah dan bertujuan) administrator.
4. Administrator bisa perorangan bisa suatu dewan.
5. Administrator menunaikan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya melalui apa yang disebut administrasi.

Zulkifli (2009/:12-13) menjelaskan memandang kerjasama manusia mencapai tujuan sebagai objek studi ilmu administrasi, maka terdapat sepuluh dimensi penting yang perlu dipahami dalam konsep administrasi (Atmosudirjo:2003:51-53)

1. Administrasi merupakan suatu fenomena sosial, suatu perwujudan tertentu dalam masyarakat modern. Eksistensi daripada administrasi berkaitan dengan organisasi, artinya administrasi terdapat dalam suatu organisasi.
2. Administrasi merupakan suatu hayat atau kekuatan yang memberikan hidup atau gerak kepada suatu organisasi. Tanpa administrasi yang sehat maka organisasi tidak akan sehat pula. Pembangkit administrasi sebagai suatu kekuatan atau energy atau hayat adalah *administrator* yang harus pandai menggerakkan seluruh sistem yang terdiri atas para manajer, staffer, dan personil lainnya.
3. Administrasi merupakan suatu fungsi tertentu untuk mengendalikan, menggerakkan, mengembangkan, dan mengarahkan suatu organisasi yang dijalankan oleh *administrator* dibantu oleh bawahannya, terutama para manajer dan staffer.
4. Adminsitrasi merupakan suatu kelompok orang-orang yang secara bersama-sama merupakan 'badan pimpinan' dari pada suatu organisasi.
5. Administrasi merupakan suatu seni (*art*) yang memerlukan bakat, ilmu, pengetahuan, dan pengalaman.
6. Administrasi merupakan suatu proses penyelenggaraan bersama atau proses kerjasama antara sekelompok orang-orang tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditentukan dan direncanakan sebelumnya. Kerjasama orang-orang tersebut berlangsung secara dan melalui organisasi.

7. Administrasi merupakan suatu jenis tingkah laku atau sikap kelakuan sosial yang tertentu (*administrative behavior or administration as special type of social behavior*) yang memerlukan sikap dan mental tertentu serta merupakan suatu tipe tingkah laku manusia tertentu (*special type of human behavior*).
8. Administrasi merupakan suatu teknik atau praktek yang tertentu. Suatu tatacara yang memerlukan kemampuan atau mengerjakan sesuatu, yang memerlukan kemampuan, kemahiran, keterampilan (*skill*) yang hanya dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.
9. Administrasi merupakan suatu sistem tertentu, yang memerlukan input, transformasi, pengolahan dan output tertentu.
10. Administrasi merupakan suatu tipe manajemen tertentu yang merupakan “overall management” dari pada suatu organisasi. Pada hakikatnya manajemen merupakan pengendalian dari sumberdaya-sumberdaya menuju ketercapaian suatu prapta (*objective*) tertentu. Sumberdaya-sumberdaya (*resource*) dimaksud meliputi : orang-orang (*man*), uang (*money*), mesin-mesin (*machines*), bahan atau peralatan (*materials*), metode-cara-teknik (*methods-technology*), ruang (*space*).

2. Konsep Organisasi

Dalam bahasa latin Beddy Irawan (2017:35) organisasi adalah *organum* yang berarti alat, bagian bagian anggota badan. Pengertian lain, organisasi berasal dari kata *organizare* yang berarti mengatur atau menyusun. Pengertian dari organisasi tersebut, akan organisasi dapat dipahami sebagai tempat penyusunan dan pengaturan dari berbagai sehingga merupakan kesatuan kerja sama yang teratur untuk mencapai tujuan.

Secara sederhana dalam Zaidan Nawawi (2013:73) organisasi ialah suatu wadah atau tempat untuk melakukan kegiatan bersama, agar dapat

mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Dari definisi sederhana itu, maka sebuah organisasi minimal memiliki cirri antara lain terdiri daripada dua orang atau lebih, yang didalamnya terjadi berbagai hubungan kerja sama antar-individu maupun kelompok, baik didalam organisasi itu sendiri (internal) maupun ke luar (eksternal).

Menurut Dwight Waldo dalam Inu Kencana (2011:114) organisasi adalah sebagai sebuah struktur dari kewenangan-kewenangan dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan antar orang-orang pada suatu sistem administrasi.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa defines organisasi yaitu sebagai berikut ;

1. Wadah atau tempat terselenggaranya administrasi.
2. Di dalamnya terjadi hubungan antar individu maupun kelompok, baik dalam organisasi sendiri maupun keluar organisasi.
3. Terjadi kerja sama dan pembagian tugas dalam organisasi tersebut.
4. Berlangsung proses aktivitas berdasarkan kinerja masing-masing.

Zulkifli (2009:78) mengatakan organisasi dalam arti luas tidak sesederhana itu, sebagai locus dan fokus studi ilmu adminsitrasi, organisasi dapat banyak dijabarkan dari banyak sumberdaya serta faktor lingkungan yang melingkupinya. Terutama mereka yang memandang oragnisasi sebagai sistem, yaitu menilai adanya keterkaitan anatar dinamika organsasi dengan berbagai unsure yang melingkupinya.

Menurut Siagian (Zulkifli (2009:78) mendefinisikan organisasi sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang

bekerja bersama dan secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Pemahaman Stephen P. Robbins (Beddy Irawan (2017:38) organisasi diartikan sebagai kesatuan sosial yang di koordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

Menurut Kast dan Rosenzweigh (Beddy Irawan 2017:41) memahami organisasi sebagai suatu subsistem dari lingkungan yang lebih luas. Selanjutnya ia berpendapat bahwa suatu organisasi harus memuat sekurang-kurangnya lima unsur, yaitu

1. Tujuan organisasi adalah pernyataan tentang keadaan yang diinginkan dimana organisasi bermaksud untuk merealisasikan tujuan. Tujuan merupakan titik akhir dari apa yang diharapkan atau dicapai dalam organisasi.
2. Kerjasama organisasi dapat diartikan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang dan saling bantu-membantu dengan sesama anggota organisasi lainnya untuk mencapai tujuan bersama.
3. Struktur adalah susunan komponen-komponen (unit-unit) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda tersebut di koordinasikan. Struktur dalam organisasi formal dinyatakan dalam peta organisasi, posisi, dan uraian pekerjaan, serta di peraturan dan prosedur.
4. Teknik diartikan untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif makan orang-orang yang bekerja sama tersebut perlu dibekali pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan (dengan pendidikan dan latihan), serta peralatan

dan fasilitas (seperti gedung perkantoran, peralatan kantor, kendaraan, anggaran, tanah dan barang modal lainnya).

5. Psikososial atau jiwa sosial. Organisasi juga mempunyai subsistem psikososial yang terdiri dari orang-orang dan kelompok yang berinteraksi serta saling dipengaruhi oleh perasaan, nilai-nilai, sikap, harapan, dan aspirasi dari orang-orang dalam organisasi itu.

Menurut Siagian (Zulkifli (2009:81) minimal terdapat sepuluh faktor utama dari aspek lingkungan yang menuntut agar organisasi secara periodik dan sistematis melakukan peninjauan ulang (pembaharuan) setiap perihal pendekatan atau kebijakan yang telah ditetapkan, faktor-faktor yang dimaksud meliputi :

1. Tantangan utama masa depan
2. Perubahan konfigurasi keternagakerjaan
3. Tingkat pendidikan para pekerja
4. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
5. Situasi ekonomi
6. Berbagai kecenderungan sosial
7. Faktor geopolitik
8. Persaingan
9. Dinamika kebijakan penguasa
10. Pelestarian lingkungan.

Ilmu administrasi bertujuan untuk mendukung upaya para administrator meningkatkan efektifitas dan efisiensi pencapaian setiap tujuan yang telah ditetapkan. Berhubung organisasi merupakan salah satu aspek studi administrasi, maka dapat ditafsirkan bahwa prinsip-prinsip administrasi dan prinsip-prinsip organisasi ibarat dua sisi mata uang. Yang artinya untuk mencapai hasil kerja yang optimal, para administrator harus mengimplementasikan prinsip-prinsip administrasi dan prinsip-prinsip organisasi secara terintegrasi dan berimbang.

3. Konsep Manajemen

Menurut George R. Terry & Leslie W. Rue (Beddy Iriawan 2017:79) manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. “*managing*” mengelola sedang pelaksanaannya disebut *manager* atau pengelola.

Menurut Donnely, *et.al* (Beddy Iriawan 2017:79) “*management is the process undertaken by one or more individuals to coordinate the activities of other achieve results not achieve by one individual acting alone*” (manajemen dipahami sebagai proses yang dilakukan oleh satu atau beberapa individu untuk mengoordinasikan kegiatan orang lain untuk mencapai hasil yang tidak dapat dicapai ole satu individu bertindak sendirian).

Manajemen dapat disimpulkan bahwa suatu proses kegiatan, yaitu merupakan suatu rangkaian aktivitas pengelola yang dilakukan terus-menerus oleh manajer atau administrator, yang dimulai dari kegiatan merencanakan, melaksanakan serta mengoordinasikan apa yang telah direncanakan sampai kepadakegiatan pengawasan agar bekerja sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Menurut Beishline (Manullang 2001:19:20) ada tiga cara memecahkan persoalan, maka dari itu manajemen digolongkan kedalam tiga kelas, yaitu :

1. Manajemen konvensional, yaitu manajemen tradisional atau manajemen untung-untungan, maksudnya bahwa manajer dalam menghadapi suatu persoalan, dengan cara mendasarkan diri kepada tindakan-tindakan yang diambil di zaman lampau, jadi selalu mendasarkan dirinya atas tradisi.
2. Manajemen sistematis, yaitu dapat dianggap sebagai langkah pertengahan antara manajemen konvensional dan manajemen yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Disini, manajer memecahkan suatu persoalan bukan medasar pada pengalaman tetapi pada pengalaman orang lain yang menghadapi masalah serupa.
3. Manajemen ilmu pengetahuan, yaitu harus menetapkan langkah-langkah sebelum mengambil keputusan yaitu dengan mengumpulkan data-data, menganalisa data-data, mempertimbangkan tujuan dengan hubungan dari data-data yang sudah terkumpul, kemudian menetapkan apa yang menjadi keputusan.

Menurut Rue dan Byars, Fremont E. Kast dan James E. Rosenzweig, bahwa Henri Fayol adalah orang pertama yang mengidentifikasi fungsi manajemen yang merupakan hal penting dalam keberhasilan berorganisasi, yaitu terdiri dari :

1. Planning (perencanaan) adalah kegiatan-kegiatan penetapan rencana yang dapat dicapai organisasi
2. Organizing (pengorganisasian) adalah kegiatan memobilisasikan sumber-sumber daya manusia dan material organisasi
3. Commanding (kepemimpinan) adalah kegiatan memotivasi dan memengaruhi para pekerja dalam melakukan pekerjaannya.
4. Coordinating (koordinasi) adalah kegiatan menyerasikan sumber daya dan kegiatan-kegiatan organisasi
5. Controlling (pengawasan) adalah kegiatan memonitor, apakah kegiatan yang sudah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut The Liang Gie (Zulkifli (2009:18) manajemen suatu sub konsep tata pimpinan merupakan rangkaian kegiatan penataan yang berupa penggerakkan orang-orang dan pengerahan fasilitas kerja agar tujuan

kerjasama benar-benar tercapai. Diajuga mengemukakan bahwa manajemen sebagai suatu proses memiliki eman fungsi utama yaitu :

1. Perencanaan adalah kegiatan yang menentukan hal-hal yang harus dikerjakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan serta bagaimana cara-cara mengerjakannya.
2. Pembuatan keputusan adalah kegiatan yang melakukan pemilihan diantaranya berbagai kemungkinan untuk menyelesaikan masalah, perselisihan, keraguan yang timbul dalam kerjasama.
3. Pengarahan, adalah kegiatan membimbing bawahan dengan jalan memberikan perintah, memberikan petunjuk, mendorong semangat kerja, menegakkan disiplin, memberikan teguran, dan lain usaha semacam itu agar mereka dalam melakukan pekerjaan mengikuti arah yang telah ditetapkan.
4. Pengkoordinasian adalah kegiatan menghubungkan orang-orang dan tugas-tugas sehingga terjamin adanya kesatuan atau keselarasan keputusan, kebijaksanaan, tindakan, langkah, sikap serta mencegah timbulnya pertentangan, kekacauan, kekembaran, dan kekosongan tindakan
5. Pengontrolan adalah kegiatan yang mengusahakan agar pelaksanaan pekerja serta hasil kerja sesuai dengan rencana, perintah, petunjuk atau ketentuan-ketentuan ditetapkan.
6. Penyempurnaan adalah kegiatan memperbaiki segenap segi penataan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien.

Dari batasan manajemen tersebut diisyaratkan bahwa manajemen terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan yang terintegritas sebagai satu kesatuan utuh. Untuk menjabarkan secara baik dari setiap fungsi tersebut dalam suatu kerjasama mencapai sasaran organisasi. Maka kepada setiap perumusan kebijakan dan pelaksanaanya juga dituntut memiliki pengetahuan dan keahlian yang spesifik.

Siagian (Zulkifli (2009:19-20) merumuskan batas manajemen sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Manajemen sebagai motor dari suatu sistem administrasi, secara eksplisit terlihat dalam pendapat Waldo (1986:27) manajemen adalah suatu tindakan dengan maksud untuk mencapai hubungan kerjasama yang rasional dalam suatu sistem administrasi.

4. Konsep Kebijakan Publik

Istilah kebijakan seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan, dan rencana-rencana besar. Dalam Zainal&Raden (2015:3).

Versi formal yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Solichin Abdul Wahab (2012:9) memberikan makna pada kebijakan sebagai kebijakan ialah pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu, atau suatu rencana.

Menurut Widodo dalam Zainal&Raden (2015:10) mengatakan bahwa kebijakan publik dibentuk untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang diinginkan serta berkaitan

dengan apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah bukan sekedar apa yang ingin dilakukan.

Dijelaskan dalam Edi Suharto (2015:44-45) untuk memahami berbagai definisi kebijakan publik, ada baiknya kita membahasa beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik yaitu :

1. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan di implementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.
2. Sebuah rekasi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan konkrit yang berkembang di masyarakat.
3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial.
5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan.

Sementara itu Laswell dalam Dwiyanto (2017:18) menginginkan ilmu kebijakan publik mencakup 1) metode penelitian proses kebijakan, 2) hasil dari studi kebijakan, 3) hasil temuan penelitian memberikan kontribusi paling penting untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan integensi era kita sekarang. Selain itu Laswell juga menggerakkan dan mendorong agar para analis kebijakan menjadi lebih kreatif dalam mengidentifikasi masalah-masalah kebijakan.

Menurut pakar inggris W.I. Jenkins dalam Solichin Abdul Wahab (2012:15) merumuskan kebijakan publik yaitu serangkaian yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor.

Menurut Thomas R. Dye dalam Azam Awang (2010:26) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Disamping itu, kebijakan publik dapat juga merupakan serangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak berbuat) yang dibuat oleh badan-badan atau kantor-kantor pemerintah, diformulasikan dalam bidang-bidang isu (issue areas), yaitu arah tindakan aktual atau potensial dari pemerintah yang didalamnya terkandung konflik diantara kelompok masyarakat.

Definisi lain mengenai kebijakan publik ditawarkan oleh Carl Friedrich dalam Leo (2014:7) adalah serangkaian tindakan/ kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

5. Konsep Implementasi

Menurut Pressman dan Wildavky dalam Zainal&Raden (2015:50) mengemukakan bahwa “implementasi as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete”. Maksudnya membawa, menyelesaikan, mengisi, dan menghasilkan.

Secara etimologi dalam Zainal&Raden (2015:50) implementasi itu dapat dimaksud sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan menggunakan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.

Sedangkan menurut A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Zainal&Raden (2015:51) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program, dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadminitrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Pendapat Ripley dalam Zainal&Raden (2015:53) mengatakan bahwa implementasi dapat dilihat dari dua prespektif sebagaimana iya jelaskan “*implementation studies have two major foci, “complete” and “what happening?”*”. Perspektif pertama (*compliance perpective*) memahami keberhasilan implementasi dalam arti sempit yaitu sebagai kepatuhan

implementer dalam melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam dokumen kebijakan (dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah atau program). Perspektif kedua memandang keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya dilihat dari aspek kepatuhan implementer (arti sempit) dalam melaksanakan kebijakan berdasarkan *standart operating procedure* (SOP) semata. Perspektif kedua ini memandang bahwa kepatuhan implementer dalam mengimplementasikan kebijakan merupakan suatu kondisi yang harus dilalui (*necessary condition*) agar tujuan kebijakan dapat diwujudkan, bukan tujuan akhir dari implementasi.

Dalam Agustino Leo (2014:138) Studi implementasi adalah merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktik implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan.

6. Konsep Implementasi Kebijakan

Dalam Azam Awang (2010:25) implementasi kebijakan merupakan bagian dari kebijakan publik dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari kegiatan administrasi di suatu institusi dan dapat pula sebagai lapangan studi administrasi sebagai ilmu. Implementasi kebijakan adalah satu aktifitas dari kegiatan administrasi sebagai suatu institusi dimaksudkan sebagai salah satu proses kegiatan yang dilakukan oleh unit administratif atau unit birokrasi.

Kajian klasik Mazmanian & Sabatier dalam Leo (2020:146) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan biasa dalam bentuk undang-undang, tapi dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya.

Diungkapkan oleh Lester & Stewart dalam Leo (2020:146-147) keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Hal ini tak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Grindle yaitu pengukuran keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan apa yang telah ditentukan, yaitu melihat pada action program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

a. Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III dalam Dwiyanto (2017:31-32) menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi.

Empat variabel tersebut yaitu :

1. Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok

sasaran (target group). Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga mendapamenghindari adanya distorsi atau kebijakan dan program.

2. Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh anggota kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atau sebuah program/kebijakan.
3. Diposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis.
4. Struktur birokrasi, yaitu menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, pertama adalah mekanisme dan struktur organisasi pelaksanaan sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating prosedur (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program/kebijakan. Kedua yaitu struktur organisasi pelaksanaan pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang, dan kompleks.

Dijelaskan juga dalam Dwiyanto (2017:33) bahwa keempat variabel diatas dalam model yang dibangun Edward memiliki ketertarikan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan. Semuanya saling bersinergi dalam mencapai tujuan dan satu variabel akan sangat mempengaruhi variabel yang lain.

Model implementasi dari Edward ini dapat digunakan sebagai alat mencitra implementasi program di berbagai tempat dan waktu. Artinya, empat variable yang tersedia dalam model dapat digunakan untuk mencitra fenomena implementasi kebijakan publik.

b. Model implementasi kebijakan Donald Van Metter & Carl Van Horn dalam Leo (2016:133-136) yaitu model pendekatan to-down yang dirumuskan oleh van Metter & van Horn disebut dengan istilah *A Model of The Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abraksi atau performasi dari suatu pelaksana kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel. Ada enam variabel menurut van Metter dan van Horn yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, yaitu :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan, kinerja kebijakan dapat di ukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realitis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.
2. Sumber Daya, keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang ditetapkan secara apolitik. Sumber daya yang lain yang perlu diperhatikan yaitu sumber daya finansial dan waktu. Ini karena mau-tidak-mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju. Demikian juga dengan sumber daya waktu.
3. Karakteristik agen pelaksana, hal ini sangat penting karena kinerja kebijakan implementasi kebijakan akan sangat banyak

dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah manusia secara radikal, maka agen pelaksana haruslah berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang ditetapkan.

4. Sikap atau kecenderungan (*disposition*) para pelaksana, sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan dilaksanakan adalah kebijakan “dari atas” (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.
5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksanaan, koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi, dan begitu pula sebaliknya.
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik, menurut van Metter & van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

- c. Model implementasi kebijakan model Merilee S. Grindle dalam Leo (2016:142-145) menjelaskan pendekatan yang dikenal dalam model Merilee S. Grindle bernama *Implementasi As A Political And Administrative Process*. Menurut Grindle keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian

outcomes (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih) yang mana hal tersebut dilihat dari dua hal, yaitu

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksana kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor yaitu:
 - a. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok
 - b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut

Grindle juga amat ditentukan oleh tingkat *implementability* yang terdiri dari

Content Of Policy & Context Of Policy yaitu :

1. *Content Of Policy* menurut Grindel adalah
 - a. *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi), yaitu yang berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini beragumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal ini yang ingin diketahui lebih lanjut.
 - b. *Type of Benefits* (tipe manfaat), pada point ini berupaya untuk ,menunjukkan atau menjelaskan bahwa suatu kebijakan harus terdapat berbagai jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
 - c. *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai), setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of Policy* yang ingin dijelaskan pada point ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.
 - d. *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan), pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang ingin di implementasikan.

- e. *Program Impementor* (pelaksana program), dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksanaan kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.
- f. *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan), pelaksana suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

2. *Context of Policy* menurut Grindle adalah

- a. *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat), dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila tidka diperhitungkan secara matang sangat besar kemungkinan program yang hendak di impementasikan akan jauh aranf dari api.
- b. *Institution and Rigme Characterristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa), lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilan, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.
- c. *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana), hal yang lain dirasa pentig dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan da respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Sedangkan pendekatan *bottom up* memandang impelemntasi kebijakan dirumuskan tidak oleh lembaga tang tersentralisasi dari pusat. Pendekatan ini berpangkal dari keputusan-keputusan yang ditetapkan di level warga atau masyarakat yang merasakan sendiri persoalan-persoalan dan masalah yang mereka alami. Jadi intinya pendekatan *bottom up* adalah model impelemntasi kebijakan dimana formulasi kebijakan berada ditingkat warga, sehingga mereka dapat lebih memahami dan mampu

menganalisis kebijakan-kebijakan apa yang cocok dengan sumberdaya yang tersedia di daerahnya, sistem sosiokultur yang ada agar kebijakan tidak bersifat kontraproduktif, yang dapat menunjang keberhasilan kebijakan itu sendiri.

Menurut Grindle dalam Leo (2016:129) keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

d. Model implementasi kebijakan Thomas R. Dye,

Dalam Leo (2016:152-154) Menjelaskan bahwa model ini sering disebut dengan istilah “Model Implementasi Interaktif”. Model ini menganggap pelaksan akebijakan sebagai proses yang dinamis, karena setiap pihak yang terlibat dapat mengusulkan perubahan dalam berbagai tahap pelaksanaan. Hal ini dilakukan ketika program dianggap kurang memenuhi harapan *stakeholder*. Ini berarti bahwa berbagai tahap implementasi program atau kebijakan publik akan dianalisis dan dievaluasi oleh setiap pihak sehingga potensi, kekuatan dan kelemahan setiap fase pelaksanaannya diketahui dan segera diperbaiki untuk mencapai tujuannya. Meskipun persyaratan *input* sumber daya merupakan keharusan dalam proses implementasi kebijakan, tetapi hal itu tidak menjamin suatu kebijakan akan dilaksanakan dengan baik. Input sumber daya dapat digunakan secara optimum jika dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan terjadi interaksi positif dan dinamis antara pengambil

kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pengguna kebijakan (masyarakat) dalam suasana dan lingkungan yang kondusif.

Jika model interaktif ini disandingkan dengan model implementasi program atau kebijakan yang lain, khususnya model proses politik dan administrasi dari Grindle, terlihat adanya kesamaan dan representasi elemen yang mencirikannya. Tujuan kebijakan, program aksi, dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai menurut Grindle menunjukkan urgensi lini implementasi kebijakan.

e. Model implementasi kebijakan Charles O. Jones, dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksana kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara seksama, yaitu :

1. Organisasi : pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit, dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak.
2. Interpretasi : menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
3. Penerapan : ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Secara lebih rinci mengenai organisasi, interpretasi, dan penetapan, penulis memaknai sebagai berikut. Pertama aktivitas perorganisasian merupakan suatu upaya menetapkan dan menata kembali sumber daya, unit-unit dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan (merealisaikan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan). Kedua, aktivitas penjelasan substansi dan suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah diterima

para pelaku dan sasaran kebijakan. Terakhir, ketiga, aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada. Bertumpu kepada apa yang dikatakan Jones di atas, maka masalah implementasi kebijakan publik atau implementasi program semakin lebih jelas dan luas. Dimana implementasi merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis dari pengorganisasian, interpretasi, aplikasi.

f. Model implementasi kebijakan Daniel H. Mazmanian & Paul A. Sabatier, yaitu dalam Leo (2016:146-151) model implementasi kebijakan yang ditawarkan oleh Daniel Mazmanian & Paul A. Sabatier disebut *A Framework for Policy Implementation Analysis*. Kedua ahli kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuan dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Dan variabel-variabel yang dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu :

1. Mudah atau tidaknya masalah yang digarap, meliputi :
 - a. Kesukaran-kesulitan teknis, yaitu tercapai atau tidaknya suatu kebijakan akan tergantung pada sejumlah persyaratan teknis, termasuk diantaranya : kemampuan untuk mengembangkan indikator-indikator pengukur prestasi kerja yang tidak terlalu mahal serta pemahaman mengenai prinsi-prinsip hubungan kausal yang mempengaruhi masalah. Disamping itu, tingkat keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi juga oleh tersedianya atau telah dikembangkan teknik-teknik tertentu.
 - b. Keberagaman perilaku yang diatur, semakin beragam perilaku yang diatur, maka asumsinya semakin beragam pelayan yang diberikan sehingga semakin sulit untuk

membuat peraturan yang tegas dan jelas. Dengan demikian semakin besar kebebasan bertindak yang harus di control oleh para pejabat pada pelaksana (aparatur, administrator, atau birokrat) dilapangan.

- c. Persentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran, yaitu semakin kecil dan semakin jelas kelompok sasaran yang perilakunya akan diubah (melalui implementasi kebijakan), maka semakin besar peluang untuk memobilisasikan dukungan politik terhadap sebuah kebijakan atau dengannya akan leboh terbuka peluang bagi pencapaian tujuan kebijakan.
2. Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang di kehendaki, yaitu semakin besar jumlah perubahan perilaku yang dikehendaki oleh kebijakan, maka semakin sukar atau sulit para pelaksana mencapai keberhasilan. Artinya,ada sejumlah masalah yang jauh lebih dapat kita kendalikan jika tingkat dan ruanglingkup perubahan yang dikehendaki tidaklah terlalu besar.
 3. Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat, para pembuat kebijakan mendatagunakan wewenang yang dimiliki untuk menstruktur proses implementasi secara tepat melalui beberapa cara :
 - a. Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai, yaitu semakin mampu suatu peraturan memberikan petunjuk-petunjuk yang cermat dan disusun secara jelas skala prioritas atau urutan kepentingan bagi para pejabat pelaksana dan aktor lainnya, maka semakin besar pula kemungkinan bahwa output kebijakan dari badan-badan pelaksana akan sejalan dengan petunjuk tersebut.
 - b. Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan, memuat suatu teori kausalitas yang menjelaskan bagaimana kira-kira

tujuan usaha pembaharuan yang akan dicapai melalui implementasi kebijakan

- c. Ketetapan alokasi sumber dana, tersedianya dana pada tingkat batas ambang tertentu sangat diperlukan agar terbuka peluang untuk mencapai tujuan-tujuan formal.
- d. Keterpaduan hirarki di dalam lingkungan dan antara lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana, salah satu ciri penting yang harus dimiliki oleh setiap peraturan perundangan yang baik ialah kemampuannya untuk memadukan hirarki badan-badan pelaksana. Ketika kemampuan untuk menyatupadukan dinas, badan, dan lembaga alpa dilaksanakan, maka koordinasi anatar-instansi yang bertujuan mempermudah jalannya implementasi kebijakan justru akan membuyarkan tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan.
- e. Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana, selain dapat memberikan kejelasan dan konsistensi tujuan, memperkecil-kecil jumlah titik-titik veto, dan insentif yang memadai bagi kepatuhan kelompok sasaran, suatu undang-undang harus pula dapat mempengaruhi lebih lanjut proses implementasi kebijakan dengan cara menggariskan secara formal aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana.
- f. Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-undang, para pejabat pelaksana memiliki kesepakatan yang diisyaratkan demi tercapainya tujuan. Hal ini sangat signifikan halnya, oleh karena *top-down policy* bukanlah perkara yang mudah untuk diimplikasikan para pejabat pelaksana di level lokal.
- g. Akses formal pihak-pihak luar, faktor lainnya juga dapat mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sejauh mana peluang-peluang yang terbuka bagi partisipasi para aktor diluar badan pelaksana dapat mendukung tujuan resmi. Ini maksudnya agar control pada para pejabat pelaksana yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dapat berjalan sebagaimana mestinya.

4. Variabel-variabel di luar undang-undang yang mempengaruhi implementasi

- a. Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi, perbedaan waktu dan perbedaan wilayah-wilayah hukum pemerintah dalam hal kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi sangat signifikan berpengaruh terhadap upaya pencapaian tujuan yang digariskan dalam suatu undang-undang. Karena itu, eksternal

faktor juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan guna keberhasilan suatu upaya pengejawantahan suatu kebijakan publik.

- b. Dukungan publik, hakikat perhatian publik yang bersifat sesaat menimbulkan kesukaran-kesukaran tertentu, karena untuk mendorong tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat dibutuhkan adanya sentuhan dukungan dari warga. Karena itu mekanisme partisipasi publik sangat penting artinya dalam proses pelaksanaan kebijakan publik dilapangan.
- c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat, perubahan-perubahan yang hendak dicapai oleh suatu kebijakan publik akan sangat berhasil apabila di tingkat masyarakat, warga memiliki sumber-sumber dan sikap-sikap masyarakat yang kondusif terhadap kebijakan yang ditawarkan pada mereka. Ada semacam *local genius* (kearifan lokal) yang dimiliki oleh warga yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan implementasi kebijakan. Dan hal tersebut sangat dipengaruhi oleh sikap dan sumber yang dimiliki oleh warga masyarakat.
- d. Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana, kesepakatan para pejabat instansi merupakan fungsi dari kemampuan undang-undang untuk melembagakab penagruh-pengaruh nya pada badan-badan pelaksana melalui penyeleksian institusi-institusi dan pejabat-pejabat terasnya. Selain itu, kemampuan berinteraksi antarlembaga atau individu di dalam lembaga untuk menyukseskan implementasi kebijakan menjadi hal penting di atas keberhasilan kinerja kebijakan publik.

Dalam Leo (2014:140) mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. Hal ini diperjelas oleh Chief J. O. Udoji dengan mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang sangat penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuat kebijakan.

Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

7. Konsep Pemberdayaan

Menurut Djohani dalam Anwas (2013:49) pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*), dan mengurangi kekuasaan (*disempowered*) kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerful*) sehingga terjadi keseimbangan.

Menurut Parsons dalam Anwas (2013:49) pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang yang menjadi perhatiannya.

Secara rinci Slamet dalam Anwas (2013:49-50) menekankan bahwa hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah mampu di sini mengandung makna: berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat, dan memanfaatkan peluang, benergi, mampu bekerjasama, tahu sebagai alternatif, mampu menganbil keputusan, nerani mengambi resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai inisiatif.

Hulme & Turner dalam Effendi (2009:169) berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk

memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional. Oleh karena itu pemberdayaan sifatnya individu sekaligus kolektif. Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang mengangkat hubungan kekuasaan/kekuatan yang berubah antara individu, kelompok, dan lembaga sosial.

Dalam buku Anwas (2013:28-60) pemberdayaan ditujukan agar klien/sasaran mampu meningkatkan kualitas kehidupan untuk berdaya, memiliki daya saing, dan mandiri. Dalam melaksanakan pemberdayaan khususnya kepada masyarakat, agen pemberdayaan perlu memegang prinsip-prinsip pemberdayaan. Mengacu pada hakikat dan konsep pemberdayaan, maka dapat diidentifikasi beberapa prinsip pemberdayaan masyarakat sebagai berikut :

1. Pemberdayaan dilakukan dengan cara demokrasi dan menghindari unsur paksaan. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk berdaya. Setiap individu juga memiliki kebutuhan masalah, bakat, minat, dan potensi yang berbeda. Unsure-unsur pemaksaan melalui berbagai cara perlu dihindari karena bukan menunjukkan ciri dari pemberdayaan.
2. Kegiatan pemberdayaan didasarkan pada kebutuhan, masalah, dan potensi klien/sasaran. Proses pemberdayaan dimulai dengan menumbuhkan kesadaran kepada sasaran akan potensi dan kebutuhannya yang dapat dikembangkan dan diberdayakan unkm mandiri.
3. Sasaran pemberdayaan adalah sebagai subjek atau pelaku dalam kegiatan pemberdayaan. Oleh karena itu sasaran menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan tujuan, pendekatan, dan bentuk aktivitas pemberdayaan
4. Pemberdayaan berarti menumbuhkan kembali nilai, budaya, dan kearifan-kearifan lokal yang memiliki nilai luhur dala masyarakat.
5. Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang memerlukan waktu, sehingga dilakukan secara bertahap dan

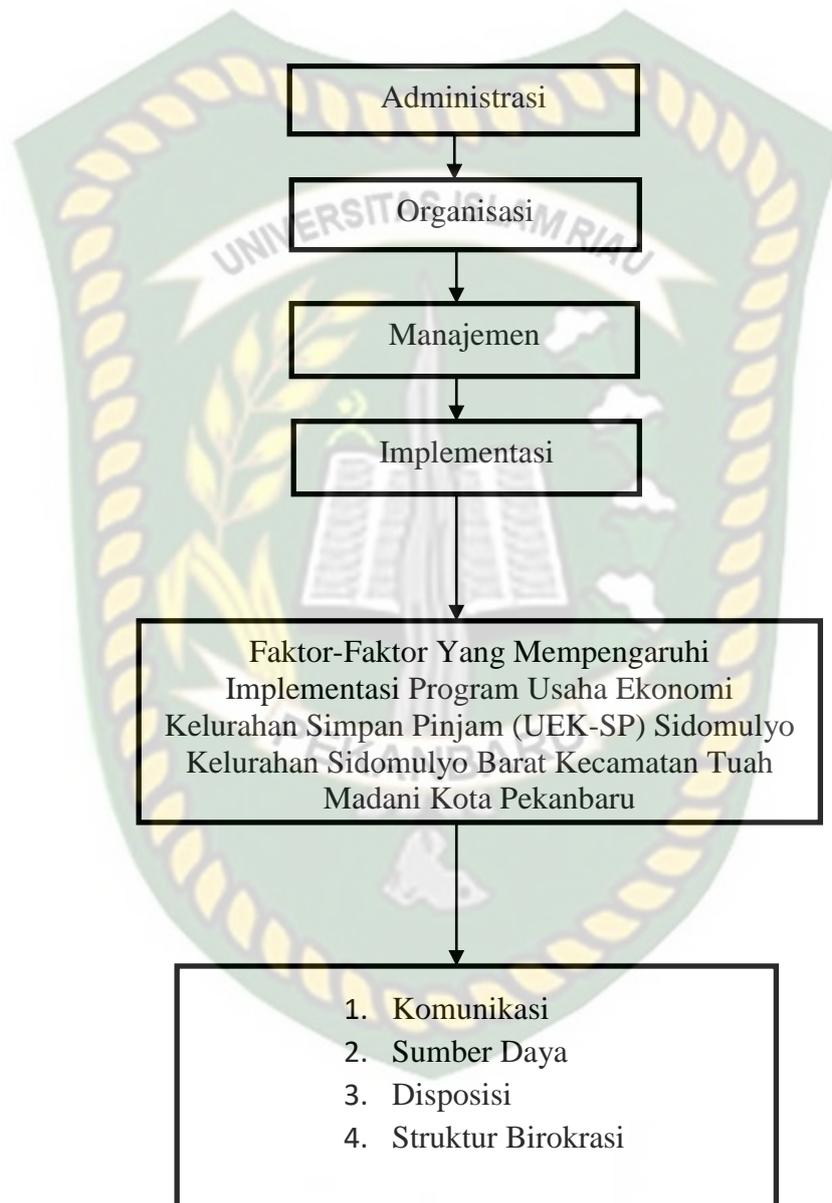
berkesinambungan. Tahapan ini dilakukan secara logis dari sifatnya sederhana menuju yang kompleks.

6. Kegiatan pendampingan atau pembinaan perlu dilakukan secara bijaksana, bertahap, dan berkesinambungan. Kesabaran dan kehati-hatian dari agen pemberdayaan perlu dilakukan terutama dalam menghadapi keragaman karakter, kebiasaan, dan budaya masyarakat yang sudah tertanam lama.
7. Pemberdayaan tidak bisa dilakukan dari salah satu aspek saja, tetapi perlu dilakukan secara holistic terhadap semua aspek kehidupan yang ada dalam masyarakat.
8. Pemberdayaan perlu dilakukan terhadap kaum perempouan terutama remaja dan ibu-ibu muda sebagai potensi besar dalam mengdongkrak kualitas kehidupan keluarga dan pengentasan kemiskinan.
9. Pemberdayaan dilakukan agar masyarakat memiliki kebiasaan untuk terus belajar, belajar sepanjang hayat.
10. Pemberdayaan perlu memperhatikan adanya keragaman budaya. Oleh karena itu diperlukan berbagai metode dan pendekatan pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi dilapangan.
11. Pemberdayaan diarahkan untuk menggerakkan partisipasi aktif individu dan masyarakat seluas-luasnya. Partisipasi ini dimulai dari tahapan perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, termasuk partisipasi dalam menikmati hasil dari aktivitas pemberdayaan.
12. Klien/sasaran pemberdayaan perlu ditumbuhkan jiwa kewirausahaan sebagai bekal menuju kemandirian.
13. Agen pemberdayaan atau tugas yang melaksanakan pemberdayaan perlu memiliki kemampuan (kompetensi) yang cukup, dinamis, fleksibel dalam bertindak, serta dapat mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat. Agen pemberdayaan ini lebih berperan sebagai fasilitator.
14. Pemberdayaan perlu melibatkan berbagai pihak yang ada dan terkait dalam masyarakat, mulai dari unsure pemerintah, tokoh, guru, kader, ulama, pengusaha, LSM, relawan dan anggota masyarakat lainnya. Semua pihak tersebut dilibatkan sesuai peran, potensi, dan kemampuannya.

B. Kerangka Pikir

Kerangka pikir ini semua yang termasuk dalam cakupan kajian, baik secara teoritis, konsep, maupun lingkup bahasan kajian Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan

Pinjam (UEK-SP) Sidomulyo Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, sehingga kerangka pikir penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar II.1: Kerangka Pikir Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Sidomulyo Kelurahan Sidomulyo

Sumber: Data olahan penulis 2021

C. Konsep Operasional

Konsep merupakan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau alami. Untuk memudahkan penganalisaan dan tidak mengaburkan konsep agar tujuan penelitian dapat tercapai maka penulis merasa perlu membatasi dan mengoprasionalkan konsep-konsep yang dipakai, konsep-konsep tersebut antara lain yaitu :

1. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Organisasi adalah wadah untuk memfasilitasi proses kerja sama untuk pencapaian suatu tujuan tertentu
3. Manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok
4. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun dengan cermat dan rinci
5. Program adalah sebuah paket intruksi dalam berbagai bentuk misalnya skema, kode dan bahasa
6. Usaha Ekonomi Kelurahan adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dibentuk Kelurahan melalui musyawarah untuk mengelola Dana Usaha Kelurahan (DUK) dan dana yang berasal dari kegiatan simpan pinjam masyarakat.

7. Simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan.
8. Komunikasi adalah alat untuk menyampaikan informasi agar hal yang disampaikan dimengerti dengan cukup baik.
9. Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsure tertentu dalam kehidupan.
10. Disposisi adalah instruksi singkat tentang tindak lanjut (penyelesaian) suatu atau surat masuk.
11. Struktur Organisasi adalah susunan berbagai komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi yang ada dimasyarakat.
12. Kota adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undang serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan cirri kehidupan perkotan.

D. Operasional Variabel

Operasional Variabel dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk tabel, uraian konsep, variabel, indikator, item penilaian, dan skala yang direncanakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat. Konsep variabel dari Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.1: Operasionalisasi Variabel penelitian tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Sidomulyo Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
<p>model ini memiliki ketertarikan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan. Semuanya saling bersinergi dalam mencapai tujuan dan satu variabel akan sangat mempengaruhi variabel yang lain. Edward III dalam Dwiyanto (2017:33).</p>	<p>Implementasi</p>	1. Komunikasi	<p>b. Transmisi/Penyaluran Komunikasi</p> <p>c. Kejelasan / Tujuan Program</p> <p>d. Konsistensi/Penyampaian informasi program</p>
		2. Sumber Daya	<p>a. Sumber Daya Manusia</p> <p>b. Sumber Daya Finansial/Anggaran Dana</p> <p>c. Sumber Daya Peralatan/Fasilitas</p>
		3. Disposisi	<p>a. Karakteristik Pelaksana Program</p> <p>b. Pengaturan Birokrasi</p>
		4. Struktur Birokrasi	<p>a. Ketersediaan <i>Standar Operational Procedur (SOP)</i></p> <p>b. Struktur Organisasi Pelaksana</p>

Sumber: Data Olahan Penulis 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena yang sedang terjadi secara alamiah (natural) dalam keadaan-keadaan yang sedang terjadi secara alamiah. Penulis melakukan penelitian langsung di Kantor Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Sidomulyo Kelurahan Sidomulyo Barat yang bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta atau bukti sesuai dengan permasalahan yang ada

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang secara utuh atau menyeluruh bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, baik itu perilakunya, persepsi, motivasi maupun tindakannya, dan secara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Sidomulyo Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian yaitu dilihat pada Tabel I.1 jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di Kota Pekanbaru pada tahun 2020 meningkat.

Dan dari wawancara sementara penulis dengan pengelola UEK-SP Sidomulyo penulis menemukan beberapa fenomena-fenomena yang dijelaskan pada bab I halaman 28 yang terjadi di program UEK-SP Sidomulyo tersebut. Dengan ini penulis ingin melaksanakan penelitian di tempat tersebut untuk melihat Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.

C. Informant dan Key Informant

Subjek penelitian atau responden/informan merupakan orang yang diminta untuk memberikan keterangan sesuai dengan fakta ataupun pendapat sebagaimana yang dijelaskan oleh Anikunto subjek penelitian adalah objek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti.

Penentuan subjek penelitian atau responden dalam penelitian ini dilakukan dengan cara purposive sampling. Subjek penelitian adalah sumber ataupun orang yang memberikan informasi mengenai fakta-fakta yang ada dilapangan, subjek penelitian merupakan objek yang dituju untuk diteliti oleh penulis. Penulis menganggap bahwa informan ini mengetahui bagaimana kondisi dilapangan mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Sidomulyo Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru.

Tabel III.1: Informant dan Key Informant

No	Subjek penelitian	Informan	Key Informan
1	Bapak Lurah Sidomulyo Barat	-	1
2	Pendamping Kelurahan Sidomulyo	-	1
3	Ketua UEK-SP Sidomulyo	-	1
4	Pegawai/pengelola UEK-SP Sidomulyo		3
5	Pemanfaat/Masyarakat	11	

Sumber : data penelitian 2021

Adapun subjek penulis dalam penelitian ini yaitu terdiri dari Lurah, Pendamping Desa/Kelurahan, Ketua UEK-SP, Pegawai pengelola UEK-SP yang terdiri dari Tata Usaha, Kasir, dan Staf Analisis Kredit (SAK), dan yang terakhir yaitu pemanfaat/masyarakat sebanyak 11 orang yang mengikuti program ini mereka dari jenis usaha 6 orang dari jenis usaha perdagangan, 4 orang dari jenis usaha jasa, dan 1 orang dari jenis usaha industry yang saat ini ada di UEK-SP Sidomulyo ini.

D. Teknik Penarikan Sampling

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik *Porpositive Sampling*, dalam buku Husain&Purnomo (2009:45-46) mengatakan teknik ini digunakan apabila anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya. Keuntungan menggunakan teknik ialah murah, cepat, dan mudah, serta relevan dengan tujuan penelitiannya.

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dan hasil data dari hasil lapangan, ataupun observasi. yang mana data tersebut mencakup dan berkenaan dengan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Sidomulyo.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan suatu data dari informasi yang dikumpulkan dan didapatkan dari suatu kantor/instansi. Data yang penulis dapatkan adalah terdiri dari gambaran umum Kantor Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Sidomulyo Kelurahan Sidomulyo Barat

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*) (Bungin, 2011:134).

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara terencana tidak terstruktur. Wawancara terencana tidak terstruktur adalah apabila peneliti/pewawancara menyusun rencana wawancara yang mantap,

tetapi tidak menggunakan format dan urutan yang baku (Yusuf, 2014: 377).

2. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data-data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Suatu kegiatan pengamatan baru dikategorikan sebagai kegiatan pengumpulan data penelitian apabila memiliki kriteria sebagai berikut (Bungin, 2011: 118) :

- a. Pengamatan digunakan dalam penelitian dan telah terencana secara serius
- b. Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan
- c. Pengamatan harus dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proporsi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu yang hanya menarik perhatian
- d. Pengamatan dapat dicek dan dikontrol mengenai keabsahannya

Pengamatan dan pencatatan suatu objek dengan sistematis fenomena yang diselidiki. Observasi dapat dilakukan sesaat ataupun mungkin dapat diulang. Oleh sebab itu observasi hendaknya dilakukan oleh orang yang tepat. Dalam observasi melibatkan dua komponen, yaitu si pelaku observasi yang dikenal sebagai *observer*, dan objek yang akan diobservasi yang dikenal dengan *observee* (Sukandarmudi, 2004: 69).

3. Dokumentasi

Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyalin data-data atau arsip yang tersedia pada *interview* atau instansi yang berhubungan dengan penelitian.

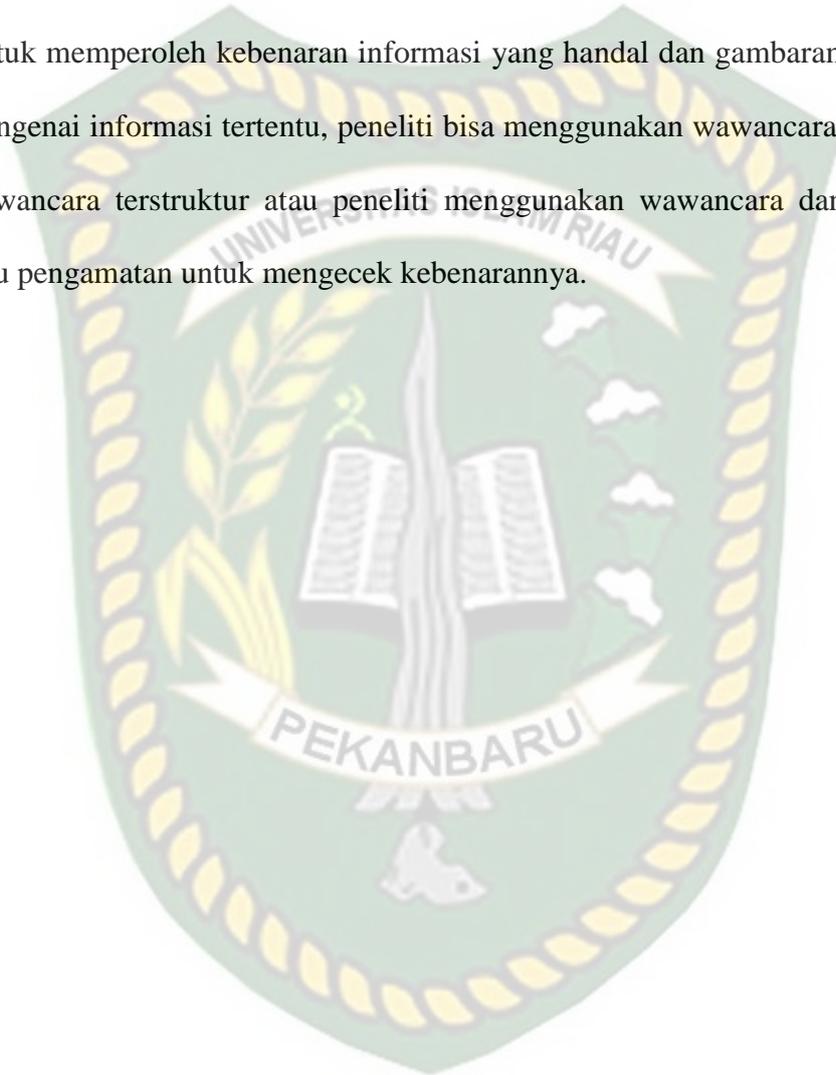
Menurut Sugiyono (2008: 82) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang, bisa berbentuk catatan harian, foto, gambar, dan sejarah kehidupan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyalin data-data atau arsip yang tersedia pada *interview* yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, bentuk dokumentasi yang peneliti ambil adalah arsip seperti struktur organisasi Sanggar, serta foto dan video yang peneliti ambil ketika observasi.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh, dikumpulkan kemudian diolah secara sistematis yaitu dimulai dari observasi, wawancara, mengklasifikasi, selanjutnya menyajikan serta menyimpulkan data.

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan analisis secara deskriptif dan menggunakan metode Triangulasi. Analisis deskriptif yaitu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan atau fakta-fakta dilapangan dan hasilnya akan

disajikan dan dilengkapi dengan uraian-uraian serta keterangan yang mendukung untuk dapat ditarik kesimpulan. Metode Triagulasi dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan wawancara bebas atau wawancara terstruktur atau peneliti menggunakan wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas Lokasi Penelitian

i. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan salah satu daerah yang ada di Provinsi Riau yang menyandang predikat sebagai Ibukota Provinsi Riau. Sehingga dengan demikian Kota Pekanbaru adalah salah satu kegiatan perekonomian dan administrasi Provinsi Riau.

Kota Pekanbaru terletak antara $101^{\circ} 14' - 101^{\circ} 34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ} 25' - 0^{\circ} 45'$ Lintang Utara. Berdasarkan peaturan pemerintah No 19 tahun 1987 tanggal 7 September 1987 Daerah Kota pekanbaru diperluas dari $\pm 62,96 \text{ Km}^2$ menjadi $446,50 \text{ Km}^2$ yang terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan. Kota pekanbaru berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara ; Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Secara geologi, kota pekanbaru memiliki keadaan daerah yang relatif datar dengan ciri-ciri struktur tanah pada umumnya terdiri dari jenis aluvial dengan pasir dan daerah pinggiran kota pada umumnya terdiri dai jenis tanah organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa yang bersifat asam dan sangat kerosif untuk besi.

Kota Pekanbaru dibelah oleh sungai siak yang mengalir dari barat ke timur. Sungai ini memiliki beberapa anak sungai, yaitu : Sungai Umban Sari,

Air Hitam, Sibam, Ukai, Sago, Senapelan, Mintan dan Tampan. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta rakyat dari daerah ke lainnya.

ii. Keadaan Geografi dan Iklim

Luas wilayah Kota Pekanbaru meliputi 632.26 Km². Kecamatan Tenayan Raya, Rumbai Pesisir, dan Rumbai merupakan tiga Kecamatan terluas di Kota Pekanbaru, dengan persentase luas wilayah terhadap total wilayah Pekanbaru masing-masing adalah 27,09% 24,88% dan 20,38%. Dilihat dari ketinggian wilayah tiap Kecamatan Tenayan Raya merupakan Kecamatan dengan wilayah tertinggi yakni mencapai 43 meter diatas permukaan laut. Sebaliknya Kecamatan Limapuluh merupakan Kecamatan dengan wilayah terendah yang hanya berkisar 4 meter di atas permukaan laut.

Sedangkan keadaan iklim di Kota Pekanbaru suhu udara maksimum di Kota Pekanbaru pada tahun 2020 mencapai 36,00°C yang terjadi dibulan April, Mei, dan Agustus sedangkan suhu udara minimum mencapai 22,00°C yang terjadi pada bulan Oktober. Curah hujan maksimum di Kota Pekanbaru pada tahun 2020 mencapai 432,80 mm³ dengan jumlah hari 23 hari yang terjadi pada bulan November, sedangkan curah hujan minimum terjadi pada bulan Februari sebesar 30,20 mm³ dengan jumlah hari hujan 14 hari.

iii. Keadaan Demografi

1. Kependudukan

Jumlah penduduk Kota Pekanbaru pada tahun 2020 bersumber dari hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020), yaitu sebesar 983.356 jiwa, yang terdiri dari 495.239 penduduk perempuan dengan rasio 488.239 penduduk perempuan, dengan rasio jenis kelamin 101. Persentase penduduk jika dirinci menurut kecamatan, memperlihatkan bahwa Kecamatan Tampan, Tenayan raya dan Marpoyan damai adalah wilayah dengan jumlah penduduk paling banyak. Jika dibagi menjadi luas wilayah, terlihat bahwa Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru Kota, dan Limapuluh memiliki kepadatan penduduk paling besar dibandingkan Kecamatan lainnya.

Tabel IV.1: Jumlah Kecamatan dan Persentase Penduduk yang ada di Kota Pekanbaru

No.	Kecamatan	Persentase Penduduk
1.	Tampan	20,67
2.	Payung Sekaki	9,79
3.	Bukit Raya	9,51
4.	Marpoyan Damai	12,98
5.	Tenayan Raya	15,69
6.	Limapuluh	3,93
7.	Sail	2,07
8.	Pekanbaru Kota	2,3
9.	Sukajadi	4,36
10.	Senapelan	3,6
11.	Rumbai	7,95
12.	Rumbai Pesisir	7,17

Sumber : Kota Pekanbaru Dalam Angka 2021

Berdasarkan tabel diatas, berikut adalah nama kecamatan dan persentase penduduk yang ada di Kota Pekanbaru yang ada pada data Kota Pekanbaru Dalam Angka 2021. Nama kecamatan diatas tersebut belum termasuk kedalam pemekaran kecamatan yang dilakukan oleh Wali Kota Pekanbaru.

iv. Pemerintahan Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau telah berkembang dengan pesat seiring dengan kemajuan pembangunan dewasa saat ini. Dalam pembangunan roda pemerintahan dan pembangunan Kota Pekanbaru menjadi harapan untuk dapat menjawab setiap permasalahan dan tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi, politik, dan lainnya dalam masyarakat.

Keberadaan Kota Pekanbaru merupakan dasar dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Perda Kota Pekanbaru No.4 Tahun 2016, bahwa kota pekanbaru dibagi atas 12 Kecamatan dan terdiri dari 83 kelurahan.

Pemerintahan suatu daerah merupakan unsure penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, karena pemerintah merupakan penentu kebijakan pembangunan daerah tersebut. Oleh karena itu, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintahan Kota Pekanbaru pada tahun 2020 sebanyak 7.417 orang yang tersebar di 45 instusi pada ruang lingkup kabupaten dan kecamatan.

Realisasi penerimaan keuangan kota pekanbaru hingga Desember 2020 berjumlah 1,6 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, 27,24 persen berdasar dari Pendapatn Asli Daerah (PAD), sedangkan sisanya 62,13 persen bersala dari Dana Perimbangan dan 10,63 persen berasal dari Pendapatn Lain-lain yang Sah. Sedangkan realisasi belanja daerah pemerintah kota pekanbaru hingga akhir Desember 2020 berjumlah 1,3 triliun rupiah, dengan komposisi 52,93 persen dari komponen belanja tidak langsung, dan 47,07 persen dari komponen belanja langsung.

B. Sejarah Ringkas Kecamatan Tuah Madani

Kecamatan Tuah Madani ini dulunya dikenal dengan Kecamatan Tampan. Adanya pemekaran Kecamatan yang dilakukan oleh walikota pekanbaru menjadikan Kecamatan Tampan berubah nama menjadi Kecamatan Tuah Madani. Hal ini dilakukan pemerintah untuk guna mengurangi beban pelayanan di kantor pemerintahan di Kecamatan dan kelurahan.

Diberitakan sebelumnya bahwa, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kecamatan telah disahkan DPRD Pekanbaru pada 1 September 2019 lalu. Perda ini telah ditetapkan oleh Wali Kota Pekanbaru Dr. H. Firdaus, ST, MT dan Sekretaris Daerah M. Noer Mbs pada tanggal 13 September 2019 lalu. Walikota Kota Pekanbaru Dr. H. Firdaus, ST, MT. mengatakan bahwa :

“pemekaran wilayah itu guna mempermudah rentang kendali dalam pelaksanaan pelayanan pemerintahan di berbagai aspek. Dalam pemekaran Kecamatan tentunya akan ada perubahan alamat, nama kelurahan, nama kecamatan, dan lainnya sebagainya”.

(diakses melalui pekanbaru.go.id 24 September 2021. 18.16 WIB).

Adapun Pekanbaru sudah dimekarkan menjadi 15 Kecamatan sejak 1 Januari 2021, termasuk juga Kecamatan Tampan dimekarkan menjadi dua kecamatan yaitu Kecamatan Tuah Madani dan Kecamatan Binawidya. Adapun lokasi Kecamatan Tuah madani ini sendiri yaitu jalan HR Soebrantas KM 14.5

Nama Kecamatan Tampan ini dihilangkan karena awal nama Kecamatan ini berasal dari nama Kelurahan Tampan di Kecamatan Payung Sekaki. Adapun Kelurahan yang berada dikawasan Kecamatan Tuah Madani ini yaitu :

- a. Kelurahan Tuah Karya
- b. Kelurahan Tuah Madani
- c. Kelurahan Air Putih
- d. Kelurahan Sialang Munggu
- e. Kelurahan Sidomulyo Barat

Proses penanggarannya sudah masuk dalam APBD murni tahun 2021 Kota Pekanbaru. anggarannya dititipkan diKecamatan induk dari pemekaran dikarenakan Kecamatan pemekaran belum ada punya anggaran sendiri. Anggaran Kecamatan masih fokus pada operasional. Mereka menggunakannya untuk sewa kantor, alat tulis kantor, dan pembayaran listrik.*(diakses melalui riau.suara.com 24 September 2021, pukul 18:59 WIB).*

C. Sejarah Ringkas Kelurahan Sidomulyo Barat

Kelurahan Sidomulyo Barat adalah salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Tampan yang saat ini berganti nama menjadi Kecamatan Tuah

Madani. Dibentuk berdasarkan Perda Pekanbaru No.4 Tahun 2016 yang diubah menjadi Perda No.10 Tahun 2019.

1. **Visi Misi dan Moto Kelurahan Sidomulyo Barat**

Adapun visi dan misi dari Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani ini yaitu :

Visi Kelurahan Sidomulyo Barat :

“Terwujudnya Kelurahan Sidomulyo Barat Sebagai Tempat Pemukiman Yang Bersih, Tertib, Aman Dan Harmonis”

Misi Kelurahan Sidomulyo Barat:

- a. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat
- b. Memberdayakan masyarakat dalam kerjasama organisasi dan kelembagaan di lingkungan kelurahan Sidomulyo Barat
- c. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Produktif, Kreatif dan Inovatif
- d. Menciptakan dan menumbuh kembangkan iklim usaha yang kondusif berbasis ekonomi kerakyatan
- e. Terwujudnya lingkungan Bersih, Indah, tertib dan Hijau.

Moto Kelurahan Sidomulyo Barat:

“Kami tidak akan puas sebelum pelayanan yang kami berikan membuat anda tersenyum”

Adapun jumlah penduduk yang saat ini berada di Kelurahan Sidmulyo Barat Kecamatan Tuah Madani ini yaitu sebanyak :

Tabel IV.2: Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani

No	Penduduk Laki-Laki	Penduduk Perempuan
1.	Laki-Laki	19.558 jiwa
2.	Perempuan	19.823 jiwa

Sumber: Kelurahan Sidomulyo Barat 2021

Dari Tabel diatas, bisa dilihat bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada penduduk laki-laki yang ada saat ini di Kelurahan Sidomulyo Barat. Adapun jumlah penduduk yang ada saat ini di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani sebanyak 39.381 jiwa. Memiliki jumlah KK sebanyak 10.875 KK dan memiliki 28 RW dan 126 RT yang tersebar di Kelurahan Sidomulyo Barat.

Luas wilayah yang dimiliki oleh Kelurahan Sidomulyo Barat yaitu \pm 17,80 KM bujur sangkar dan sebelum pemekaran seluas \pm 20 KM bujur sangkar. Memiliki ketinggian 5-10 M dari permukaan laut dan memiliki curah hujan 38,6 – 435,0 mm/tahun, memiliki suhu 23,0 – 35,6 ° C dan memiliki jenis tanah Aluvial. Letak Kelurahan Sidomulyo Barat ini berbatasan dengan :

- a. Utara : berbatasan dengan jalan subrantas
- b. Selatan : berbatasan dengan jalan teropong
- c. Barat : berbatasan dengan jalan ciptak arya/ kel. Sialang munggu
- d. Timur : berbatasan dengan jalan soekarno hatta/ kel sdm/ pemberhentian marpoyan.

Masyarakat Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru ini mempunyai bermacam suku dan budaya serta hidup rukun dan

damai. Perbedaan suku dan golongan bahkan agama tidak menjadikan mereka sulit dalam bersosialisasi satu sama lain. Adapun tempat ibadah di kelurahan sidomulyo barat yaitu :

Tabel IV.3: Jumlah Tempat Ibadah Yang Berada Dilingkungan Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru

No	Nama Tempat Ibadah	Jumlah Tempat Ibadah
1.	Mesjid	35
2.	Mushola	34
3.	Gereja	-

Sumber : Kelurahan Sidomulyo Barat 2021

Berdasarkan tabel diatas, tempat ibadah mesjid memiliki tempat yang lebih banyak daripada mushola dan gereja. Bahkan di kelurahan sidomulyo barat ini tidak memiliki gereja, sehingga bisa menarik kesimpulan bahwa penduduk muslim lebih banyak daripada penduduk non muslim.

D. Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Sidomulyo

Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Sidomulyo ini merupakan salah satu program pemerintah yang mengurangi dan pengentas kemiskinan, yaitu melalui pemberian dana pinjaman modal bagi pengusaha menengah kebawah.

Tujuan didirikannya usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) ini adalah sabagai bentuk tindak lanjut dari kebijakan dan program pemerintah dalam upaya proses mempercepat tingkat pertumbuhan dan peningkatan ekonomi masyarakat dengan memebrikan pinjaman modal usaha bagi usaha ekonomi masyarakat kebawah, dari dan oleh masyarakat.

1. Visi dan Misi dari Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Sidomulyo

Visi Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP)

Sidomulyo:

“Memberikan Pinjaman Ke Masyarakat Agar Bisa Membantu Usaha Kecil Dan Menengah”

Misi Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP)

Sidomulyo :

- a. Meningkatkan perekonomian masyarakat
- b. Menghindari pinjaman ke rentenir
- c. Membantu masyarakat untuk mendapatkan modal usaha

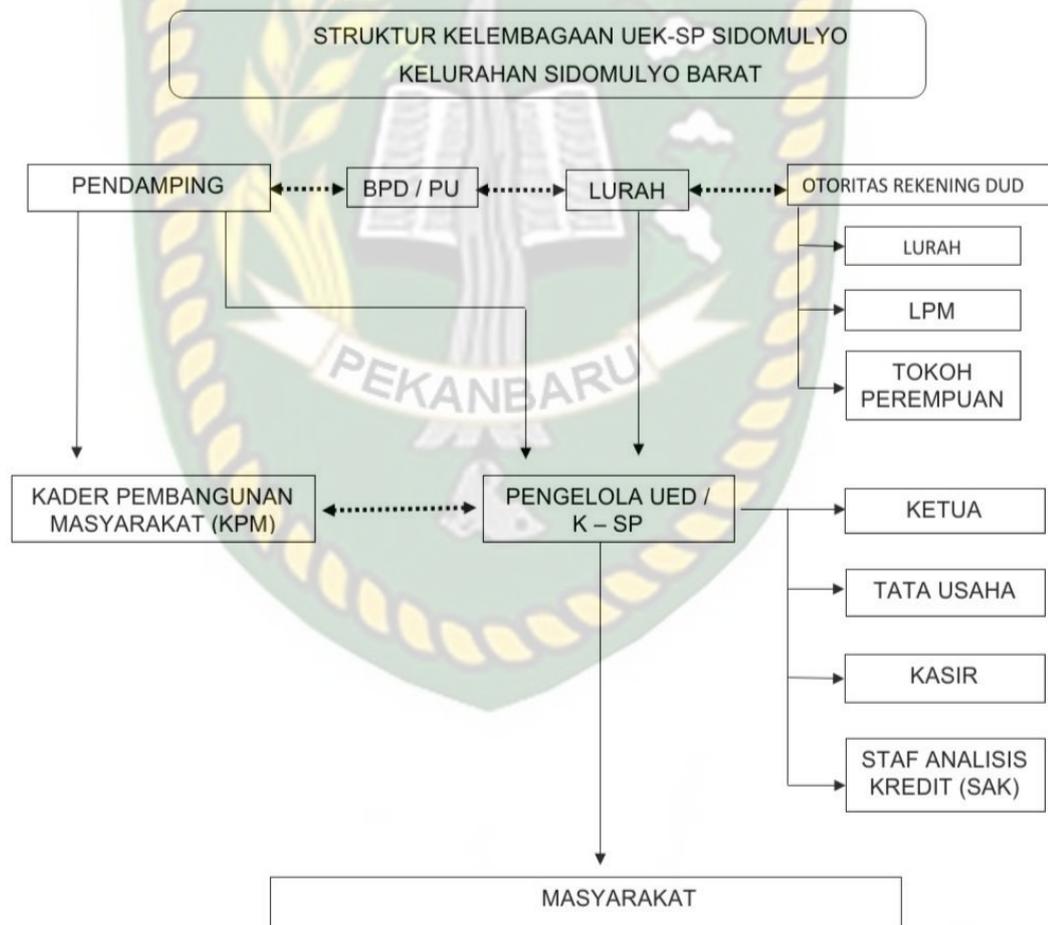
2. Struktur Organisasi Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Sidomulyo Kelurahan Sidomulyo Barat

Adapun yang menduduki struktur kelembagaan didalam usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Sidomulyo Kelurahan Sidomulyo Barat ini adalah yaitu :

- a. Lurah
 - Otoritas Rekening DUK (Dana Usaha Kelurahan)
 1. Lurah
 2. Lpm (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)
 3. Tokoh Perempuan
- b. Pendamping Kelurahan
- c. BPU/PU (Badan Pengawas Umum)
- d. Pengelola UEK-SP
 1. Ketua
 2. Tata Usaha

3. Kasir
4. Staf Analisis Kredit (SAK)
5. Kader Pembangunan Masyarakat (KPM)
6. Masyarakat / Pemanfaat

Adapun gambar dari struktur organisasi dari Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Sidomulyo Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani adalah sebagai berikut :



Gambar IV.1: Stuktur Organisasi Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Sidomulyo Kelurahan Sidomulyo Barat

Sumber Gambar: Kantor UEK-SP Sidomulyo 2021

3. Tugas dan Fungsi Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Sidomulyo

Sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknik Program Pemberdayaan Kelurahan Kota Pekanbaru melalui usaha ekonomi kelurahan. Adapun tugas dan fungsi Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Sidomulyo sebagai berikut:

a. Lurah

Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan PPK dan pelastarian Program PPK, Lurah bertugas dan berkewajiban:

- Menyelenggarakan musyawarah kelurahan dalam rangka pelaksanaan PPK dan menyebarluaskan kepada seluruh masyarakat kelurahan
- Mengesahkan daftar calon pemanfaat Dana Usaha Kelurahan
- Menandatangani Dokumen Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3)
- Memantau realisasi penyaluran dan pengembalian pinjaman Dana Usaha Kelurahan.
- Bersama-sama dengan ketua LPM, Wakil Perempuan yang dipilih melalui musyawarah, membuka rekening dana usaha kelurahan pada bank yang ditetapkan
- Mendorong dan mengupayakan penyelesaian permasalahan yang terjadi di kelurahan bersangkutan
- Membuat laporan bulanan kepada camat tentang perkembangan pelaksanaan PPK di kelurahan bersangkutan.

b. Pendamping Kelurahan

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan program, pendamping kelurahan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu mendampingi pengelola

dalam membuat laporan, survey lapangan serta mengikuti rapat menyangkut jalannya program UEK-SP ini. Dan beberapa tugas dan tanggung jawab Pedamping Kelurahan sebagai berikut :

- Melapor dan melakukan koordinasi dengan Camat dan Lurah
- Melakukan sosialisasi PKK kepada aparat keluraha, tokoh masyarakat dan masyarakat
- Melakukan kajian identifikasi, potensi kelurahan dan karakteristik (sumberdaya manusia, kelembagaan, dan ekonomi), kelurahan selanjutnya dilaporkan kepda coordinator Daerah
- Memfasilitasi forum musyawarah kelurahan dan forum pertemuan kelompok/ RT/RW.
- Memberi bantuan teknis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Dana Usaha Kelurahan
- Memeriksa dan memberikan masukan terhadap kualitas teknis dan kelayakan ekonomi usulan kegiatan serta proses verifikasi
- Membantu menyiapkan dan menyempurnakan dokumen kegiatan Dana Usaha Kelurahan
- Melakukan verifikasi terhadap pinjaman dan peminjam
- Melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi kepada pemanfaat dana UEK-SP
- Mambat laporan kegiatan harian (absensi, realisasi dan rencana kerja) yang disampaikan kepada Kordinator Daerah setiap bulan.
- Mengikuti kegiatan tertentu yang didakan oleh BPPMKB Kota Pekanbaru

c. BPU/PU (Badan Pengawas Umum)

Bertugas mengawasi jika terjadi permasalahan di lingkungan ataupun permasalahan di UEK-SP tersebut. pengawas umu mengontrol secara umum.

d. Pengelola UEK-SP

Secara umum tugas dan tanggung jawab dari pengelola UEK-SP ini adalah mensosialisasikan dan mengumpulkan aspirasi masyarakat. Tugas lainnya yaitu mengelola Dana Usaha Kelurahan serta simpan pinjam masyarakat. Pengelola UEK-SP memiliki

1. Ketua UEK-SP

Ketua UEK-SP memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Memimpin LKM UEK-SP
- Memberikan pinjaman yang diajukan calon pendaat kepada UEK-SP berdasarkan hasil keputusan musyawarah kelurahan atau perguliran yang memenuhi syarat-syarat kelayakan usulan
- Melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pinjaman dan pengembalian pinjaman dana UEK-SP
- Mengangkat tenaga Administrasi bila dibutuhkan sesuai dengan kemampuan keuangan UEK-SP
- Melaporkan posisi keuangan dengan membuat laporan rutin bulanan bersama kasir tepat waktu diserahkan kepada Pendamping Kelurahan dengan tembusan kepada Camat dan Lurah
- Melakukan koordinasi dengan Lurah, Pendamping Kelurahan, dan Koordinator daerah
- Membangun jaringan kerja terhadap pihak-pihak terkait dalam rangka pengembangan lembaga UEK-SP
- Melakukan prinsip transparansi dalam pengelolaan kegiatan Dana Usaha Kelurahan kepada masyarakat
- Melakukan pembinaan rutin terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat Dana Usaha Kelurahan difasilitasi oleh Pendamping Kelurahan
- Melakukan pertanggungjawaban tahunan melalui musyawarah kelurahan pertanggungjawaban tahunan (MKPT)

- Bertanggung jawab terhadap pengelola dana UEK-SP sesuai aturan Jukdis dan aturan berlaku
- Melakukan penangihan terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat Dana Usaha Kelurahan dan didampingi oleh Pendamping Kelurahan

2. Tata Usaha UEK-SP

Tata Usaha UEK-SP memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Berfungsi sebagai sekretaris
- Membantu dibidang keuangan
- Melakukan penangihan terhadap pemanfaat Dana Usaha Kelurahan dan didampingi oleh Pedamping Kelurahan
- Membantu dibidang administrasi umu UEK-SP
- Menginformasikan laporan keuangan dan perkembangan pinjaman dana usaha kelurahan pada papan informasi secara rutin dan mutakhir
- Menyusun laporan perkembangan keuangan bulanan dan permasalahan tepat waktu serta disampaikan kepada Ketua UEK-SP
- Melakukan pengarsipan dan dokumentasi seluruh data administrasi dan data yang berkaitan dengan keuangan kegiatan dana usaha kelurahan
- Melakukan pembinaan rutin terhadap pemanfaat dana usaha kelurahan difasilitasi oleh pendamping kelurahan
- Bertanggung jawab terhadap administrasi kegiatan dan keuangan UEK-SP serta administrasi lainnya.

3. Kasir UEK-SP

Kasir UEK-SP memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Menerima, menyimpan dan membayar uang berdasarkan bukti-bukti dan pembayaran yang sah
- Melakukan pembukuan administrasi keuangan UEK-SP

- Melaporkan posisi keuangan kepada Ketua UEK-SP dan rekening Simpan Pinjam kepada bank yang ditunjuk
- Melakukan pembinaan administrasi keuangan kepada kelompok-kelompok pemanfaat dana usaha kelurahan dan difasilitasi oleh pendamping kelurahan
- Bertanggung jawab terhadap pengelola uang yang ada di kas dan dana yang tersedia di bank
- Melakukan penagihan terhadap pemanfaat dana usaha kelurahan dan didampingi oleh pendamping kelurahan

4. Staff Analisis Kredit (SAK) UEK-SP

Staff Analisis Kredit (SAK) UEK-SP memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Melakukan pemeriksaan administrasi dan kelengkapan dokumen proposal dari pemanfaat dalam mengajukan pinjaman pada UEK-SP
- Melakukan penilaian kelayakan usulan dengan melakukan kunjungan lapangan meliputi :
 - Cek fisik kelayakan usaha (tempat usaha)
 - Cek fisik kelayakan agunan
 - Mencari informasi kepada masyarakat tentang calon peminjam
 - Mencari informasi kepada masyarakat tentang pinjaman dengan pihak ketiga lainnya yang bersangkutan
- Mengisi formulir verifikasi usulan saat kunjungan lapangan
- Melakukan umpan balik kepada calon peminjam
- Membuat rekomendasi awal hasil kunjungan lapangan
- Melakukan rekomendasi akhir untuk dibahas dalam musyawarah khusus yang terdiri dari Otoritas DUK, Kader Pemberdayaan Masyarakat, Pengelola UEK-SP, dan Pendamping Kelurahan

e. Kader Pembangunan Masyarakat (KPM)

Kader pembangunan/pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Mensosialisasikan Program Dana Usaha Kelurahan kepada semua masyarakat kelurahan khususnya dalam tahap penyiapan masyarakat
- Membantu Pendamping Kelurahan dan pelaku lainnya di kelurahan melakukan identifikasi potensi kelurahan dan penggali gagasan serta tugas lain yang diberikan oleh Pendamping Kelurahan
- Bersama Pendamping Kelurahan melakukan fasilitasi terhadap forum Musyawarah Kelurahan
- Bersama Pendamping Kelurahan membantu pelaksanaan kegiatan verifikasi usulan oleh Analisis Kredit
- Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh program atau pihak lainnya
- Membuat laporan kegiatan secara berkala, tepat waktu dan disampaikan kepada Pendamping Kelurahan dan tembusannya disampaikan Lurah.

f. Masyarakat/pemanfaat

Masyarakat/ pemanfaat ini adalah masyarakat/warga yang memanfaatkan program UEK-SP ini untuk membantu usaha mereka. Masyarakat yang wajib memiliki KK/KTP atau yang berdomisili di Kelurahan Sidmomulyo Barat.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identifikasi Responden

Dalam melakukan penelitian tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Sidomulyo Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru. penulis melakukan wawancara dengan tujuan memperoleh hasil yang akurat. Adapun identitas responden yang ditemukan penulis adalah sebagai berikut :

Tabel V.1: Identifikasi Key Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Jabatan	Pendidikan
1.	H. Edi Susanto, S.H	Laki-Laki	44 Tahun	Lurah Sidomulyo Barat	S2
2.	Novita Elia Sari, S.E	Perempuan	38 Tahun	Pendamping Kelurahan	S1
3.	Mariati	Perempuan	55 Tahun	Ketua UEK-SP	SLTA
4.	Erlina Lubis	Perempuan	47 Tahun	Tata Usaha UEK-SP	SLTA
5.	Sumiati	Perempuan	54 Tahun	Kasir UEK-SP	SMEA
6.	Marsan	Laki-Laki	70 Tahun	Staff Analisis Kredit UEK-SP	SMP

Sumber: Olahan Penulis, 2021

Berdasarkan tabel diatas, yang menjadi *keyinforman* dari kantor Kelurahan Sidomulyo Barat itu ada satu orang yaitu lurah dari kelurahan sidmuto barat itu sendiri. Dikarenakan Lurah merupan pemegang ototritas tertinggi dan juga memiliki kekuasaan memegang Rekening Dana Usaha

Kelurahan (DUK). Dari kantor UEK-SP Sidomulyo nya itu sendiri terdiri dari 5 orang *keyinforman* yaitu 1 orang Pendamping Kelurahan UEK-SP Sidomulyo dan 4 orang pengelola UEK-SP Sidomulyo yang terdiri dari Ketua, Tata Usaha, Kasir , dan Staff Analisis Kredit UEK-SP Sidomulyo di Kelurahan Sidomulyo Barat.

Untuk mengetahui apakah pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Sidomulyo ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan, maka peneliti melakukan wawancara dengan informan atau pemanfaat yang mengikuti program ini. Berikut daftar infoman/pemanfaat yang diwawancarai oleh peneliti :

Tabel V.2 :Identifikasi Informan Pemanfaat UEK-SP

No	Nama	Jenis Kelamin	Tamatan	Jenis Usaha	Nama Usaha	Alamat
1.	Refni	Perempuan	Sma	Jasa	Cahaya Laundry	Jl. Gelora
2.	Emi Suharti	Perempuan	Smp	Jasa	Koveksi Celana Pendek	Jl. Datk Tunggul
3.	Slamet Siam	Laki-Laki	Smp	Jasa	Hafizah Laundry	Jl. Bunga Inem
4.	Andayani Lubis	Perempuan	Smk	Jasa	Samara Laundry	Jl. Melur
5.	Ajman Satibera	Laki-Laki	Sma	Industri	Ajiba Sablon & Konveksi	Jl. Prodadi
6.	Indra	Laki-Laki	Slta	Perdagangan	Salon Lampu Padang Motor	Jl. Teratai Indah
7.	Lisnawati	Perempuan	Smp	Perdagangan	Sarapan Pagi Bude Lis	Jl. Arengka Indah
8.	Elfa Elita	Perempuan	Sma	Perdagangan	Kedai Harian	Jl. Bangau
9.	M. Bambang Sukri	Laki-Laki	Smk	Perdagangan	Toko Harian Duk Datuk	Jl. Matoa
10.	Watiyem	Perempuan	Smp	Perdagangan	Jamu Keliling	Jl. Karyawan
11.	Dimas Riyanto	Laki-Laki	Slta	Perdagangan	Putra Minang Photo Copy	Jl. Prodadi

Sumber: olahan penulis, 2021

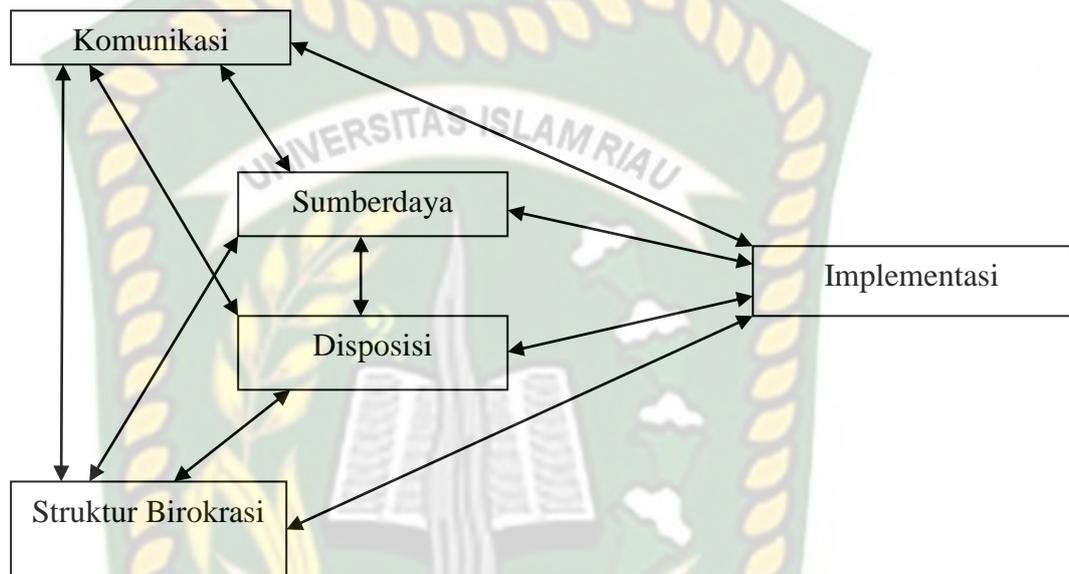
Berdasarkan tabel diatas, peneliti memberikan pertanyaan seputar program UEK-SP yang selama ini pemanfaat ikuti. Peneliti wawancara dengan menanyakan satu pertanyaan setiap sub indicator kepada responden.

B. Pembahasan Peneliti Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Impelemntasi Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Sidomulyo Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru

Dalam penelitian ini, adapun *keyinforman* yang terlibat yaitu 1 orang dari Kelurahan Sidmulyo Barat yaitu bapak H. Edi Susanto, S.H selaku Lurah Sidomulyo Barat dan 5 orang yang berada di kantor UEK-SP Sidomulyo yaitu terdiri dari ibuk Novita Elia Sari, S.E selaku Pendamping Kelurahan, pengelola UEK-SP yaitu ada ibuk Mariati selaku Ketua, ibuk Erlina Lubis selaku Tata Usaha, ibuk Sumiati selaku Kasir, dan bapak Marsan selaku Staff Analisis Kredit. Dan terdiri dari 11 orang pemanfaat atau masyarakat yang telah mengikuti program ini baik yang mengikuti ptogram ini sudah lama maupun yang baru mengikuti program UEK-SP ini. Data yang didapat oleh peneliti melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang peneliti lakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam penelitian ini.

Menurut George C. Edward III menjelaskan bahwa terdapat empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Keempat variabel ini memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam

mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan. Semuanya saling sinergi dalam mencapai tujuan dan satu variabel akan mempengaruhi variabel yang lain.



V. 1: Gambar Model Implementasi Edward III

Sumber : Dwiyanto, 2017:33

Keempat variabel tersebut terdiri dari Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Organisasi

1. Komunikasi
 - a. Transmisi/penyaluran komunikasi
 - b. Kejelasan/tujuan program
 - c. Konsistensi/penyampaian informasi program
2. Sumber daya
 - a. Sumber daya manusia
 - b. Sumber daya finansial/anggaran dana
 - c. Sumber daya peralatan/fasilitas
3. Disposisi
 - a. Karakteristik pelaksana program
 - b. Pengaturan birokrasi
4. Struktur Birokrasi
 - a. Ketersediaan standar operatonal procedur (SOP)

b. Struktur organisasi pelaksana

1. Komunikasi

Komunikasi yaitu menunjukkan bahwa setiap kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program dengan para kelompok sasaran. Tujuan dan sasaran dari program / kebijakan dapat disosialisasikan dengan baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini semakin penting, karena semakin tinggi tingkat pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.

Jika dilihat, maka pelaksana program ini adalah para pengelola UEK-SP yang ada di Kelurahan Sidomulyo Barat dan kelompok sasarannya yaitu masyarakat atau pemanfaat yang akan atau sudah mengikuti program ini. Perlunya komunikasi antara pihak pengelola dengan calon pemanfaat tentunya sangat mempengaruhi kelanjutan program UEK-SP ini. Semakin jenis dan terpercaya para pengelola mengkomunikasikannya program ke pemanfaat, maka akan semakin berkembang program ini.

Tentunya didalam komunikasi itu adanya adanya transmisi/ penyaluran komunikasi supaya kebijakan atau aturan itu tidak hanya sampai di para pelaksana saja tetapi juga kepada kelompok sasaran itu atau pemanfaat itu dan juga pihak lainnya yang berkepentingan secara langsung maupun tidak. Selanjutnya kejelasan atau tujuan program agar kebijakan atau aturan yang

sampaikan kepada para pelaksana, pemanfaat atau pihak lainnya disampaikan dengan jelas sehingga diantara mereka mengetahui maksud, tujuan, sasaran, serta aturan yang telah ada sehingga bisa mengsucceskan dalam melaksanakan program UEK-SP tersebut. konsistensi diperlukan juga didalam komunikasi supaya kebijakan aturan yang ada sesuai sehingga tidak membingungkan para pelaksana juga para masyarakat atau pemanfaat.

- a. Transmisi / penyaluran komunikasi, merupakan bagaimana program atau kebijakan publik itu tidak hanya disampaikan oleh pelaksana tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran ataupun pihak lainnya. Yaitu seperti adanya calon pemanfaat yang mendapatkan informasi mengenai program ini, kemudian datang langsung ke kantor maupun dapat pemberitahuan dari RW setempat ataupun dapat informasi dari teman yang telah mengikuti terlebih dahulu.

Dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan key informan yaitu ibu Mariati selaku Ketua UEK-SP Sidomulyo menjelaskan komunikasi terkait transmisi/ penyaluran komunikasi yang terjadi dan terjalin dengan pemanfaat, sebagai berikut :

“Bentuk komunikasi yang kami jalin dengan pemanfaat bagus, tidak ada permasalahan, bentuk komunikasi yang kami lakukan bisa melalui langsung artinya datang langsung ke kantor UEK-SP ini atau juga via telepon untuk para pemanfaat yang sudah lama menjadi anggota. untuk menyampaikan informasi terkait program ini langsung kami kasih tau ke RW nya dan kadang-kadang dipertemuan. Juga ketika kelurahan ada acara yang mengundang masyarakat kami menginformasikan kembali sekalian mempromosikan bahwa ada adanya Program peminjaman dana usaha yaitu UEK-SP gitu”

(Wawancara : Rabu, 8 September 2021, pukul 12.16 WIB)

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan kepada key informan yaitu bapak H. Dedi Susanto, S.H selaku Lurah Sidomulyo menjelaskan komunikasi terkait transmisi/penyaluran komunikasi yang terjadi dan terjalin dengan pemanfaat, sebagai berikut :

“Komunikasi yang terjalin bagus. Kayaknya tidak ada kendala sih soalnya komunikasi mereka lancar aja”
(Wawancara : Senin, 30 Agustus 2021, Pukul 09.48 WIB)

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan kepada informan juga salah satu warga atau pemanfaat yaitu ibuk Lisnawati yang memiliki usaha Sarapan Pagi Bude Lis yang telah mengikuti program UEK-SP ini menjelaskan komunikasi terkait transmisi/penyaluran komunikasi terhadap Program UEK-SP ini, sebagai berikut :

“Selama ibuk meminjam ini Alhamdulillah komunikasinya baik, ibuk udah ikut program ini dari tahun 2010 kalau tidak salah,ibuk taunya dari RW diperumahan ibuk sudah cukup lama juga dan selama ini lancar-lancar aja komunikasinya”
(Wawancara : Kamis, 9 September 2021, Pukul 12.41 WIB)

Hasil wawancara yang dilakukan kepada informan yaitu bapak Ajman Satibera yang memiliki usaha Ajiba Sablon dan Konveksi yang telah mengikuti program ini menjelaskan komunikasi terkait transmisi/penyaluran komunikasi, terhadap Program UEK-SP ini yaitu :

“Menurut saya sudah terjalin dengan baik. Saya taunya dari teman saya yang kebetulan ikut program ini juga. Lancar-lancar saja komunkasinya selama ini ”
(Wawancara : Kamis, 9 September, Pukul 11.10 WIB)

Hasil wawancara yang dilakukan kepada informan yaitu ibuk Elfa Elita yang memiliki usaha Kedai Harian yang mengikuti program ini menjelaskan komunikasi terkait transmisi/penyaluran komunikasi terhadap program UEK-SP ini yaitu :

“menurut saya sudah bagus, karna saya kenal juga dengan ibuk-ibuk ini kan, jadi lancar-lancar saja komunikasinya juga”.

(Wawancara : Kamis, 9 September 2021, Pukul 10.15 WIB)

Dari kutipan wawancara di atas dapat dilihat bahwa tanggapan ibuk Mariati selaku Ketua UEK-SP Sidmulyo dan bapak H. Dedi Susanto, S.H selaku Lurah Sidomulyo Barat terhadap indikator Komunikasi pada sub indikator Transmisi / Penyaluran Komunikasi yang mana hal tersebut sudah dilakukan untuk menyukseskan dan mengembangkan Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Sidomulyo. Kemudian dilihat dari tanggapan wawancara para informan yaitu ibuk Lisnawati yang memiliki usaha Sarapan Pagi Bude Lis dan bapak Ajman Satibera yang memiliki usaha Ajiba Sablon & Konveksi, ibuk Elfa Elita yang memiliki usaha Kedai Harian yang mereka lontarkan sudah dilakukannya komunikasi ataupun penyaluran komunikasi antara pengelola dengan pemanfaat.

Dan melihat hasil observasi yang peneliti lakukan selama berada dilapangan menjelaskan bahwa komunikasi yang pengelola lakukan dengan pemanfaat ataupun calon pemanfaat terjalin dengan baik karena yang peneliti lihat bahwa pengelola UEK-SP Sidomulyo ini dalam melayani pemanfaat ramah-ramah sehingga pemanfaat ataupun calon pemanfaat nyaman

berkomunikasi terkait program ini. Adapun penyaluran komunikasi yang terjadi di UEK-SP Sidomulyo ini yaitu penyampaian informasi langsung ke RW-RW yang ada di Kelurahan Sidomulyo Barat mengenai program ini yang nantinya RW tersebut akan menginformasikan dan mengkomunikasikan kembali ke warganya tentang adanya program UEK-SP di Kelurahan Sidomulyo Barat dan ketika saya ingin mewawancarai pengelola UEK-SP tersebut kebetulan salah satu RW yang ada di Kelurahan Sidomulyo Barat ada dan pengelola langsung memberikan tahu lagi mengenai program ini dan memberitahukan gagasan program baru yang akan pengelola UEK-SP Sidomulyo lakukan dalam waktu dekat. Sehingga terjadinya penyaluran komunikasi program UEK-SP ini dari RW ke masyarakat. Sehingga indikator Komunikasi pada sub indikator Transmisi/Penyaluran Komunikasi Sudah Terlaksana Dengan Baik.

- b. Kejelasan/tujuan program merupakan hal yang penting, agar para pelaksana dan kelompok sasaran atau pihak lainnya dapat mengetahui dengan jelas mengenai tujuan yang ingin dicapai demi mengsucceskan program ini salah satunya dengan adanya pelatihan, pembinaan atau sosialisasi yang dilakukan baik itu untuk para pelaksana maupun para kelompok sasaran atau pemanfaat.

Dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan key informan yaitu ibuk Novita Elia Sari, S.E selaku Pendamping Kelurahan UEK-SP Sidomulyo menjelaskan komunikasi terkait kejelasan/tujuan program yaitu pelatihan, sosialisasi maupun pembinaan , sebagai berikut :

“awal pembentukan sosialisasi ada, pembentukan UEK nya namun setelah berjalannya waktu mereka lebih paham sendiri aja. Pelatihan untuk para pegawai ada sampai sekarang selama saya menjadi pendamping pasti ada , setiap hari karena pendampingnya juga selalu memberi pengarahan jika ada masalah pasti lapornya sama pendamping, jika tidak selesai dengan pendamping kita rapatkan di forum ada Lurah, LPM dan lainnya. Untuk seminar gitu ada biasanya itu sekali setahun”

(Wawancara : Jum'at, 10 September 2021, Pukul 11.12 WIB)

Dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan key informan yaitu bapak H. Dedi Susanto, S.H selaku Lurah di Kelurahan Sidomulyo Barat menjelaskan tentang Komunikasi pada bagian Kejelasan/Tujuan Program yaitu seperti pelatihan, sosialisasi, maupun pembinaan, sebagai berikut :

“mereka langsung turun ke rumah-rumah untuk melakukan sosialisasi, kalau untuk pihak UEK-SP pastinya ada dan kalau untuk sekarang saya lihat 3 bulan sekali dalam bentuk pelatihan”

(Wawancara : Senin, 30 Agustus 2021, Pukul 09.48 WIB)

Dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan key informan yaitu ibu Mariati selaku Ketua UEK-SP di Kelurahan Sidomulyo Barat menjelaskan tentang Komunikasi pada bagian Kejelasan/Tujuan Program yaitu seperti pelatihan, sosialisasi, maupun pembinaan, sebagai berikut :

“dulu ada, tetapi beberapa tahun terakhir ini dari tahun 2019 sampai 2021 ini sudah tidak lagi. pemerintahnya tidak memberi keterangan”.

(Wawancara : Rabu, 8 September 2021, Pukul 12.16 WIB)

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan kepada informan yaitu bapak Indra yang memiliki usaha Salon Lampu Padang Motor yang mengikuti program ini menjelaskan Komunikasi terkait Kejelasan/Tujuan Program seperti sosialisasi, penyuluhan maupun pembinaan, yaitu :

“ untuk sosialisasi atau penyuluhan terhadap program itu ada perorangan. Pembinaan terhadap pengembalian dana ada juga seperti tadi juga perorangan itu ketika kita mau meminjam itu mereka menjelaskan termasuk menjelaskan syarat-syaratnya.”

(Wawancara : Kamis, 9 September 2021, Pukul 11.32 WIB)

Hasil wawancara yang dilakukan kepada informan yaitu ibuk Emi Suharti yang memiliki usaha Konveksi Celana Pendek yang mengikuti program ini menjelaskan komunikasi terkait kejelasan/tujuan program seperti sosialisasi, penyuluhan maupun pembinaan, yaitu :

“ ada. Personal. bukan yang ada seminar atau pelatihan gitu. ketika kita mau meminjam disitu juga mereka menjelaskannya”

(Wawancara: Jum'at, 10 September 2021, Pukul 09.10 WIB)

Hasil wawancara yang dilakukan kepada informan yaitu ibuk Elfa Elita yang memiliki usaha Kedai Harian yang mengikuti program ini menjelaskan komunikasi terkait kejelasan/tujuan program seperti sosialisasi, penyuluhan maupun pembinaan, yaitu :

“ada. Peorangan. Ketika kita mau meminjam itu mereka menjelaskannya. Juga kumpul sebelum pencairan”

(Wawancara : Kamis, 9 September 2021, Pukul 10.15 WIB)

Dari hasil kutipan diatas, dapat dilihat bahwa tanggapan Novita Elia Sari, S.E selaku Pendamping Kelurahan UEK-SP Sidomulyo dan bapak H. Dedi Susanto, S.H Selaku Lurah Sidomulyo Barat, dan ibuk Mariati selaku Ketua UEK-SP Sidomulyo menjelaskan terhadap indikator Komunikasi pada sub indikator Kejelasan/Tujuan Program yaitu adanya bentuk pembinaan atau sosialisasi untuk meningkatkan kualitas daripada pelaksana program tersebut

tetapi beberapa tahun terakhir sudah tidak dilaksanakan. Kemudian dilihat dari tanggapan wawancara para informan yaitu bapak Indra yang memiliki usaha salon Lampu Padang Motor, ibuk Emi Suharti yang memiliki usaha Konveksi Celana Pendek, dan ibuk Elfa Elita yang memiliki usaha Kedai Harian yang mereka luncurkan yaitu bentuk pengarahan atau sosialisasinya hanya dalam bentuk personal atau perorangan saja.

Dan melihat hasil observasi yang peneliti lakukan selama berada dilapangan menjelaskan bahwa bentuk sosialisasi atau penyuluhan terhadap pengembalian dana kepada pemanfaat atau calon pemanfaat itu ada tetapi dalam bentuk pengarahan yang diberikan kepada pemanfaat ketika mereka meminjam dana. Tidak adanya pembinaan yang dilakukan dengan mengundang narasumber profesional atau berpengalaman untuk pemanfaat supaya pemanfaat lebih bijak dalam pengembalian dana usaha dan tidak terjadinya penunggakan. Bentuk kejelasan dalam program ini harus sudah dipahami dengan baik oleh para pemanfaat ataupun para pelaksana program supaya tidak terjadinya hal yang tidak diinginkan. Dilihat masyarakat atau pemanfaat yang mengikuti program UEK-SP ini terkait pembinaan terhadap pengembalian dana usaha, dan dilihat dari para pengelola program sendiri terhadap bentuk pembinaan, sosialisasi, ataupun seminar itu perlu dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas daripada pelaksana program. Indikator komunikasi pada sub indikator Kejelasan/Tujuan Program Sudah Terlaksana Tetapi Belum Optimal.

- c. Konsistensi/Penyampaian Informasi Program, sesuatu yang diperlukan dalam komunikasi supaya kebijakan atau aturan sesuai dengan semestinya demi melancarkan dan mengukuhkan program UEK-SP ini. Seperti menyampaikan bagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi, bagaimana kebijakan atau aturan dalam meminjam dana ataupun membahas bagaimana sanksi-sanksi yang ada kepada peminjam ketika ada peminjam yang tidak membayar angsuran perbulannya.

Dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan key informan ibu Mariati selaku Ketua UEK-SP dan ibu Erlina Lubis selaku Tata Usaha UEK-SP menjelaskan Komunikasi terkait Konsistensi/Penyampaian Informasi Program sebagai berikut :

“biasanya ketika ada pertemuan atau wirid mereka itu bertanya- tanya mengenai program ini dan ada juga secara langsung datang ke kantor. Mengenai sanksi, sanksinya berupa denda keterlambatan, kita buat per-10 hari misalnya batas bayarnya tanggal 1-15 jatuh tempo, lewat dari itu kita kenakan RP. 10.000 walaupun lewat satu hari dari jatuh tempo itu. dan sanksi lain, jika sudah sedemikian sulitnya yaudah kita blacklist. ada yang kita blacklist karena kita disini jugakan cari nyaman daripada ada permasalahan pribadi yaudah, karna mereka untuk diketahui kadang ada kami yang membayarkan angsurannya tentu kami blacklist lagi, ngak mungkin kami gulirkan lagi. Kalau sudah tidak bisa diajak komunikasi lagi sudah tidak bisa di ajak berdiskusi lagi ya kita blacklist.”

(Wawancara : Rabu, 8 September 2021, Pukul 12.16 WIB & Wawancara : Rabu, 8 September 2021, Pukul 11.24 WIB)

Dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan key informan yaitu ibu Erlina Lubis selaku Tata Usaha UEK-SP Sidomulyo menjelaskan Komunikasi terkait Konsistensi/Penyampaian Informasi Program sebagai berikut :

“kalau untuk menyampaika informasi terkait peminjaman dana di UEK ini sudah yaa,waktu ambil formulir kita terangkan apa-apa yang perlu

disiapkan untuk meminjam dana ini, seperti dokumen apa aja, jaminannya gitu”.

(Wawancara : Rabu, 8 September 2021, Pukul 11.24 WIB)

Dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan key informan yaitu ibuk Sumiati selaku Kasir UEK-SP Sidomulyo menjelaskan Komunikasi terkait Konsistensi/Penyampain Informasi Program sebagai berikut :

“ada, kami menerangkan kepada pemanfaat ataupun orang yang mau bertanya bagaimana cara peminjaman UEK-SP, nah saya jelaskan pertama kita ambil formulir, isi formulir, trus usahanyaapa, tempat tinggalnya dimana, yang penting pemanfaat itu tinggal dan KK dan KTP nya Sidomulyo Barat”.

(Wawancara : Rabu, 8 September 2021, Pukul 11.40 WIB)

Dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan key informan yaitu ibuk Novita Elia Sari, S.E selaku Pendamping Kelurahan UEK-SP Sidomulyo menjelaskan sebagai berikut :

“Hambatan dalam melaksanakan program ini yang terjadi yaitu tunggakan. Setiap yang berhubungan dengan simpan pinjam pasti kendalanya tunggakan dan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan itu yaitu penangihan dan surat peringatan SP1, 2, dan 3”

(Wawancara : Jum'at. 10 September 2021, Pukul 11.12 WIB)

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada informan yaitu ibuk Andayani Lubis yang memiliki usaha Laundry Samara yang mengikuti program ini menjelaskan sebagai berikut :

““saya pertama kali tau dari teman trus besoknya saya datang kekantor untuk bertanya-tanya lebih lagi. Mereka juga menjelaskan syarat-syarat apa saja yang perlu di lengkapi. Ketika saya mendapat informasi ini tentunya saya senang karena sangat membantu saya sekali. Ada faktor terhambat dalam pengembalian pinjamannya karna usahanya apalagi semenjak covid. Dulu peminjam pertama jahit dek trus ke Laundry sudah 2

tahun cuman semenjak covid, anak sekolah tak, ada orang bekerja dari rumah, maka penghasilan kita pun sedikit menurun makanya pembayaran menunggak.”

(Wawancara : Jum'at, 10 September 2021, Pukul 09.55 WIB)

Kemudian ditambahkan dengan ibuk Mariati selaku Ketua UEK-SP Sidomulyo mengatakan :

“kita bukak aja ya buk, karna usahanya udah jatuh kami beri keringanan mengangsur. Seandainya dia ada Rp.100.000 dikasinya segitu dulu, dikasih keringanan dan bungapun sudah tidak kami ambil lagi. Biasanya tiap bulan bayar Rp.800.000 perbulan kalau cuma adanya Rp.100.000 kami terima. Jika sudah jatuh kali kami kasih keringanan.”

(Wawancara : Jum'at, 10 September 2021, Pukul 09.55 WIB)

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada informan yaitu bapak Ajman Satibera yang memiliki usaha Ajiba Sablon & Konveksi yang mengikuti program ini menjelaskan sebagai berikut :

“ada mereka menjelaskan syarat-syaratnya. Kalau telat bayar pernah, iya kena sanksi namanya orang melanggar ada sanksi lah dek”

(Wawancara : Kamis, 9 September, Pukul 11.10 WIB)

Hasil wawancara yang dilakukan kepada informan yaitu ibuk Refni yang memiliki usaha Cahaya Laundry yang mengikuti program ini menjelaskan yaitu :

“tidak kena sanksi karna pengembalian lancar, cuma usaha aja yang kurang karena covid ini “

(Wawancara : Kamis, 9 September 2021, Pukul 10.30 WIB)

Dari hasil kutipan diatas, dapat dilihat bahwa tanggapan ibuk Mariati selaku Ketua UEK-SP Sidomulyo, ibuk Erlina Lubis selaku Tata Usaha UEK-

SP Sidomulyo, ibuk Sumiati selaku Kasir UEK-SP Sidomulyo dan ibuk Novita Elia Sari, S.E selaku Pendamping Kelurahan terhadap indikator Komunikasi pada sub indikator Konsistensi/Penyampaian Informasi Program yang mana seperti yang dikatakan bahwa penyampaian mengenai syarat-syarat, aturan, ataupun sanksi selama meminjam ini sudah dilaksanakan. Kemudian dilihat dari tanggapan wawancara para informan yaitu ibuk Andayani Lubis yang memiliki usaha Laundry Samara, bapak Ajman Satibera yang memiliki usaha Ajiba Sablon & Konveksi, dan ibuk Refni yang memiliki usaha Cahaya Laundry dan yang mereka lontarkan mengenai penyampaian informasi program terhadap syarat-syarat atau aturan peminjaman sudah dilaksanakan dan diberitahukan kepada pemanfaat ketika pertama kali ingin meminjam.

Melihat hasil pengumpulan data dan hasil obeservasi peneliti dilapangan indikator Komunikasi pada sub indkator Konsistensi/Penyampaian Informasi Program yaitu pengelola memang sudah memberitahukan mengenai aturan, sanksi-sanksi, dan syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk meminjam dana usaha disini tetapi ketika peneliti lihat dalam data besaran nilai tunggakan UEK-SP Sidomulyo tahun 2019-2020 terdapat pada halaman 26, menjelaskan bahwa masih meningkatnya nilai tunggakan yang terjadi diakibatkan masih banyaknya pemanfaat yang terkendala mengembalikan dana usaha yang berujung pada penunggakan. Masih tinggi nya nilai tunggakan yang terjadi di UEK-SP Sidomulyo. Dan yang peneliti lihat selama berada dilapangan yaitu pengelola UEK-SP Sidomulyo belum sepenuhnya tegas dalam mengambil sikap terhadap pemanfaat dikarenakan ada beberapa pemanfaat yang terkendala

pengembalian dana usaha sehingga para pengelola memberikan keringanan seperti mengangsur semampunya dan penghapusan bunga pinjaman, hal ini memberikan efek yang kurang bagus dikarenakan jika ketahuan dengan pemanfaat lain maka akan timbulnya ketidakadilan dan UEK-SP akan mengalami kerugian. Indikator Komunikasi pada sub indikator Konsistensi/Penyampaian Informasi Program Sudah Terlaksana Tetapi Belum Optimal.

2. Sumber Daya

Menunjukkan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas para pelaksana yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran atau pemanfaat. Sumber daya finansial yaitu kecukupan modal atas program atau kebijakan. Kaduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan para implementor, kebijakan menjadi kurang enerjik dan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan, sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Jika dilihat, maka program UEK-SP yang dijalankan ini harus didukung dengan sumber daya manusia dan finansial yang memadai. Seperti ketercukupan para pelaksana dalam menjalankan program, hal tersebut akan menentukan bagaimana kualitas dari program itu sendiri. Selain dengan sumber

daya manusia yang harus tercukupi ada juga sumber daya finansial yang artinya ini menjadi penting untuk keberlangsungan suatu program. Baik itu segi anggaran untuk gaji/upah para pelaksananya maupun keberlanjutan program UEK-SP ini kedepannya. Didalam sumber daya ini tidak hanya ada sumber daya manusia dan finansial ada juga bentuk sumber daya peralatan atau fasilitas untuk meningkatkan kualitas program UEK-SP ini.

- a. Sumber Daya Manusia adalah sesuatu yang sangat diperlukan dalam menjalankan suatu program. Tanpa adanya Sumber Daya Manusia baik itu pengelola program ataupun para pemanfaat yang mengikuti program ini tersebut tidak mungkin bisa berjalan. Dengan adanya Sumber Daya Manusia yang memadai akan mempengaruhi keberhasilan program tersebut baik secara kualitas maupun kuantitas dari sumber daya manusia tersebut.

Dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan key informan yaitu ibuk Sumiati selaku Kasir pada UEK-SP Sidomulyo ini menjelaskan tentang Sumber Daya pada bagian Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

“insya Allah cukup, karna disini kami kan saling kerjasama walaupun saya kasir, dibantu dengan ibuk ketua ataupun ibuk tata usaha”

(Wawancara : Rabu, 8 September 2021, Pukul 11.40 WIB)

Dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan key informan yaitu ibuk Erlina Lubis selaku Tata Usaha pada UEK-SP Sidomulyo ini menjelaskan tentang Sumber Daya pada bagian Sumber Daya Manusia sebagai berikut:

“memang tata usaha untuk UEK-SP emang satu, kita saling bantu saja”

(Wawancara : Rabu, 8 September 2021, Pukul 11.24 WIB)

Dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan key informan yaitu bapak Marsan selaku Staff Analisis Kredit di UEK-SP Sidomulyo menjelaskan tentang Sumber Daya pada bagian Sumber Daya Manusia sebagai berikut:

“sudah cukup. Kita itu saling kerjasama satu sama lain”
(Wawancara : Rabu, 8 September 2021, Pukul 12.16 WIB)

Melihat hasil kutipan diatas, dapat dilihat bahwa tanggapan ibu Sumiati selaku Kasir UEK-SP Sidomulyo, Erlina Lubis selaku Tata Usaha UEK-SP Sidomulyo, dan bapak Marsan selaku Staff Analisis Kredit terhadap indikator Sumber Daya pada sub indikator Sumber Daya Manusia/Staff yang mana seperti yang dikatakan bahwa sumber daya manusia yang ada di UEK-SP Sidomulyo ini sudah mencukup untuk melakukan tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan program ini dan melakukan bentuk kerjasama antara satu dengan yang lain. dan dilihat dari sumber daya manusia para pemanfaat yang mengikuti program ini bisa dilihat pada halaman 26 pada tabel 1.6 yaitu jumlah anggota yang mengikuti program UEK-SP ini dari tahun 2019-2020.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan mengenai sumber daya manusia pada pengelola UEK-SP Sidomulyo ini yaitu masih kurangnya kualitas para pengelola program yang ada untuk menyukkseskan program ini dikarenakan selama peneliti melakukan kunjungan ke kantor UEK-SP ini yang peneliti lihat hanya 3 orang yang *stay* atau tetap berada dikantor selama ini yaitu ketua, tata usaha dan kasir. Pendamping kelurahan hanya sesekali datang

dan staff analisis kredit tidak pernah datang kecuali ketika peneliti ingin mengwawancara bapak tersebut. Karena hal itu butuh pembinaan terhadap sumber daya manusia pada pengelola UEK-SP Sidomulyo untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari program tersebut sehingga para pengelola bisa fokus kepada tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Dan menurunnya anggota pemanfaat pada tahun 2020 ini sebabkan salah satunya yaitu pandemic, pemanfaat takut untuk meminjam dana dan tidak bisa mengembalikan dana usaha dan para pelaksana lebih selektif ketika ingin meminjamkan Dana Usaha Kelurahan tersebut. Maka indikator Sumber Daya pada sub indikator Sumber Daya Manusia Sudah Terlaksana Tetapi Belum Optimal

- b. Sumber Daya Finansial/Anggaran Dana ini merupakan hal yang sangat penting karena tanpa adanya anggaran dana program ini tidak bisa berjalan dikarena semua hal yang dilakukan membutuhkan anggaran dana, seperti anggaran dana untuk penyaluran kepada pemanfaat dan anggaran dana dalam memenuhi fasilitas dan juga membutuhkan anggaran dana untuk para staff atau pelaksana seperti gaji atau insentif lainnya.

Dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan ibuk Mariati selaku Ketua UEK-SP Sidomulyo dan ibuk Erlina Lubis selaku Tata Usaha UEK-SP Sidomulyo menjelaskan tentang indikator Sumber Daya pada bagian Sumber Daya Finansial/Anggaran Dana yaitu :

“sebetulnya dana itu kalau dibilang tercukupi tidak pernah tercukupi, cuman pemanfaat itu takut meminjam, masih ada uang itu di rekening kita dan kita selektif juga dimasa covid ini, mereka takut kitapun juga takut. Kalau dulu kami pernah kekurangan dana sehingga terjadi

tunggu menunggu dulu, kalau sekarang tidak ada antrian mulai dari tahun 2020-2021 ini tidak ada antrian. Kalau untuk gaji pegawai itu tidak ada bantuan dari pemerintah, kalau ada yang mau kasih kami terima dan juga insentif khusus nya tidak ada”

(Wawancara : Rabu, 8 September 2021, Pukul 12.16 WIB & Wawancara : Rabu, 8 September 2021, Pukul 11.24 WIB)

Dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan ibuk Sumiati selaku Kasir pada UEK-SP Sidomulyo ini menjelaskan tentang indikator Sumber Daya pada bagian Sumber Daya Finansial/Anggaran Dana sebagai berikut :

“ bantuan gaji dari pemerintah untuk para pelaksana ohh no.. itu tidak ada. Insentif kami dari jasa disini tergantung peminfaat peminjam, kalau lancar dia besarlah gajinya, sejahtera dia sejahtera juga kami disini”.

(Wawancara : Rabu, 8 September 2021, Pukul 11.40 WIB)

Dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan ibuk Novita Elia Sari, S.E selaku Pendamping Kelurahan Sidomulyo ini menjelaskan tentang indikator Sumber Daya pada bagian Sumber Daya Finansial/Anggaran Dana sebagai berikut :

“pendanaan disini maksudnya penggajian, gaji disini tidak ada bantuan dari pihak lain, pendapatan yang didapat dari UEK dan dari laba yang didapat”.

(Wawancara : Jum'at. 10 September 2021, Pukul 11.12 WIB)

Dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan key informan yaitu bapak H. Dedi Susanto, S.H selaku Lurah di Kelurahan Sidomulyo Barat menjelaskan tentang Sumber Daya pada bagian Sumber Daya Finansial/Anggaran Dana yaitu sebagai berikut :

“salah satu faktor penghambatnya ya itu, dana yang disediakan untuk UEK-SP ini terbatas ya, terkadang jumlah pemohon dengan jumlah dana yang tersedia emang tidak mencukupi”.

(Wawancara : Senin, 30 Agustus 2021, Pukul 09.48 WIB)

Hasil wawancara yang dilakukan kepada informan yaitu bapak Dimas Riyanto yang memiliki usaha Photocopy Putra Minang yang mengikuti program ini menjelaskan yaitu :

“faktor penghambatnya karna pandemi jadinya telat dalam pembayaran”

(Wawancara : Jum'at, 10 September 2021, Pukul 12.41)

Hasil wawancara yang dilakukan kepada informan yaitu bapak Slamet Siam yang memiliki usaha Hafizah Laundry yang mengikuti program ini menjelaskan yaitu :

“pernah menunggak yaa karna pandemi ini dek”

(Wawancara : Jum'at, 10 September 2021, Pukul 09.28 WIB)

Hasil wawancara yang dilakukan kepada informan yaitu ibuk Emi Suharti yang memiliki usaha Konveksi Celana Pendek yang mengikuti program ini menjelaskan yaitu :

“karena pendemi ini jadinya beberapa hari pernah tersendat dalam pembayaran”

(Wawancara: Jum'at, 10 September 2021, Pukul 09.10 WIB)

Hasil wawancara yang dilakukan kepada informan yaitu ibuk Andayani Lubis yang memiliki usaha Samara Laundry yang mengikuti program ini menjelaskan yaitu :

“pernah menunggak, karena pandemi ini dek. Pembayaran jadi terhambat karena usahanya lagi turun apalagi semenjak covid ini, anak sekolah tidak ada, orang kerjapun sekarang udah dari rumah makanya penghasilan kitapun sedikit menurun makanya pembayarannya menunggak”.

(Wawancara : Jum’at, 10 September 2021, Pukul 09.55 WIB)

Hasil wawancara yang dilakukan kepada informan yaitu bapak Ajman Sitaberu yang memiliki usaha Ajiba Sablon & Konveksi yang mengikuti program ini menjelaskan yaitu :

“pernah telat bayar, kalau di zaman corona ini dek semuanya menurun”.

(Wawancara : Kamis, 9 September, Pukul 11.10 WIB)

Melihat dari kutipan diatas, bahwa tanggapan ibuk Mariati selaku Ketua UEK-SP Sidomulyo, Erlina Lubis selaku Tata Usaha UEK-SP Sidomulyo, ibuk Sumiati selaku Kasir UEK-SP Sidomulyo, ibuk Novita Elia Sari, S.E selaku Pedamping Kelurahan Sidomulyo, dan bapak H. Dedi Susanto, S.H selaku Lurah di Kelurahan Sidomulyo Barat terhadap indikator Sumber Daya pada sub indikator Sumber Daya Finansial/Anggaran Dana yaitu mengatur supaya dana yang ada itu mencukupi untuk program ini, dan untuk insentif para pengelola tidak adanya bantuan dari pemerintah untuk menunjang dan membantu para pelaksana dalam menerima hak nya yaitu berupa gaji/upah. Kemudian dilihat dari tanggapan wawancara para informan bapak Dimas

Riyanto yang memiliki usaha Photocopy Putra Minang, bapak Slamet Siam yang memiliki usaha Hafizah Laundry, ibuk Emi Suharti yang memiliki usaha Konveksi Celana Pendek, ibuk Andayani Lubis yang memiliki usaha Samara Laundry, dan bapak Ajman Sitaberu yang memiliki usaha Ajiba Sablon & Konveksi masih banyaknya pemanfaat yang telat dalam pembayaran angsuran dana usaha ini yang mengakibatkan pada penunggakan.

Melihat dari pengumpulan data yang peneliti lakukan dan observasi dilapangan, para pengelola semakin selektif dalam memberikan pinjaman dana usaha kepada pemanfaat dikarenakan pada masa pandemic ini yang menyebabkan penurunan pemasukan dari usaha pemanfaat dan masih banyaknya pemanfaat yang menunggak dikarena usaha mereka terkendala pandemic sehingga pembayaran pinjaman tidak bisa dikembalikan tepat waktu . Terkait anggaran dana untuk insentif seperti gaji/upah pengelola, penggunaan sarana kendaran ketika ada keperluan di luar kantor para pengelola di UEK-SP Sidomulyo ini belum ada bantuan dari pemerintah sehingga para pengelola hanya bergantung pada pengembalian pemanfaat pinjaman. Hal ini membuat para pengelola harus puas dengan gaji mereka yang tidak menentu setiap bulannya dan tetap harus menjalankan program ini walaupun tidak ada bantuan atau dukungan dari pemerintah terkait anggaran dana untuk upah/gaji para pengelola. Indikator Sumber Daya pada sub Indikator Sumber Daya Finansial/Anggaran Dana ini Sudah Terlaksana Tetapi Belum Optimal.

- c. Sumber Daya Peralatan/Fasilitas, merupakan hal yang penting karena digunakan untuk operasionalisasi kebijakan baik itu dari segi penyediaan alat tulis kantor, maupun lainnya untuk keberlangsungan program tersebut.

Dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan ibuk Mariati selaku Ketua UEK-SP Kelurahan Sidomulyo ini menjelaskan tentang indikator Sumber Daya pada bagian Sumber Daya Peralatan/Fasilitas sebagai berikut :

“kalau untuk fasilitas dan sarana prasarana sudah tercukupi untuk saat ini. Kalau untuk penyediaan sarana atau prasarana ke pemanfaat seperti surat, dan lainnya sudah kami siapkan juga, kebutuhannya sudah disiapkan pihak UEK-SP”.

(Wawancara : Rabu, 8 September 2021, Pukul 12.16 WIB)

Dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan ibuk Erlina Lubis selaku Tata Usaha UEK-SP Kelurahan Sidomulyo ini menjelaskan tentang indikator Sumber Daya pada bagian Sumber Daya Peralatan/Fasilitas sebagai berikut :

“kalau sarananya kendaraan kita sendiri, kalau di bilang cukup yaa dicukup-cukupi kalau ada yang mau kasih ngakpapa, kasih yang baru. Sebenarnya computer kami sudah cukup lama tu jadi kalau ada yang berbaik hati yang beri, ya kami terima tapi untuk sekarang ada 1laptop yang bagus”.

(Wawancara : Rabu, 8 September 2021, Pukul 11.24 WIB)

Dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan ibuk Sumiati selaku Kasir UEK-SP Kelurahan Sidomulyo ini menjelaskan tentang indikator Sumber Daya pada bagian Sumber Daya Peralatan/Fasilitas sebagai berikut :

“Alhamdulillah sudah cukup, seperti buku besar atau slip gitu sudah tercukupi”

(Wawancara : Rabu, 8 September 2021, Pukul 11.40 WIB)

Hasil wawancara yang dilakukan kepada informan yaitu bapak Ajman Sitaberu yang memiliki usaha Ajiba Sablon & Konveksi yang mengikuti program ini menjelaskan yaitu :

“menurut saya sudah cukup tapi satu ini cuman dek, ruangnya belum ber ac”.

(Wawancara : Kamis, 9 September, Pukul 11.10 WIB)

Hasil wawancara yang dilakukan kepada informan ibuk Watiyem yang memiliki usaha Jamu Keliling yang mengikuti program ini menjelaskan yaitu :

“Alhamdulillah sudah bagus, sudah memadai lah”

(Wawancara : Jum'at, 10 September 2021, Pukul 10.20 WIB)

Melihat dari kutipan diatas, bahwa tanggapan ibuk Mariati selaku Ketua UEK-SP Sidomulyo, Erlina Lubis selaku Tata Usaha UEK-SP Sidomulyo, ibuk Sumiati selaku Kasir UEK-SP Sidomulyo, terhadap indikator Sumber Daya pada sub indikator Sumber Daya Peralatan/Fasilitas yaitu sudah tercukupi nya fasilitas atau sarana prasan yang ada untuk menjalankan program ini. Kemudian dilihat dari tanggapan wawancara para informan yaitu bapak Ajman Sitaberu yang memiliki usaha Ajiba Sablon & Konveksi, ibuk Watiyem yang memiliki usaha Jamu Keliling memberi tanggapan terhadap fasilitas atau saran prasaran yang ada di kantor UEK-SP Sidomulyo ini mengatakan bahwa sudah bagus dan memadai.

Melihat dari observasi peneliti dilapangan bahwa bentuk fasilitas ataupun sarana yang ada di kantor UEK-SP Sidomulyo sudah memadai dalam menjalankan program ini walaupun bentuk dari sarana komputer yang ada di

kantor UEK-SP Sidomulyo itu sudah dalam versi yang lama dan biaya kendaraan seperti bensin atau perbaikannya masih menggunakan uang pribadi, itu tidak terlepas dari anggaran dana dari pemerintah belum ada, dan ruangan kantor para pengelola UEK-SP ini belum ber-ac, hal ini perlu menjadi perhatian pihak atas lainnya untuk memperhatikan supaya meningkatkan semangat dan memberikan yang terbaik untuk program ini, didukung dengan seperti memberikan ruangan yang nyaman untuk pengelola . Indikator Sumber Daya pada sub indikator Sumber Daya Peralatan/Fasilitas Sudah Terlaksana Dengan Baik.

3. Disposisi

Menunjukan karakteristik yang menempel erat kepada pelaksana kebijakan/program. Karakter yang penting yang harus dimiliki oleh para pelaksana yaitu kejujuran, komitmen dan demokratis. Dengan adanya komitmen, kejujuran dan pengaturan birokrasi yang baik akan membawanya para pelaksana senantiasa dalam melaksanakan tahapan-tahapan program secara konsisten. Seperti melihat bagaimana komitmen yang dimiliki para pelaksana program UEK-SP dan melihat bagaimana tingkat kejujuran pelaksana di mata pemanfaat serta melihat bagaimana pengaturan birokrasi di kantor UEK-SP ini supaya para pengelola bekerja sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan aturan yang berlaku.

- a. Karakteristik Pelaksana Program, Para pelaksana yang memiliki komitmen dan tingkat kejujuran yang tinggi akan senantiasa bertahan pada hambatan-hambatan yang ditemui dalam program. Seperti melihat bagaimana

komitmen yang dimiliki oleh para pengelola untuk program ini dan bagaimana sikap atau tinggak kejujuran yang dimiliki penelora dilihat dari pemanfaat

Dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan ibuk Mariati selaku Ketua UEK-SP Kelurahan Sidomulyo ini menjelaskan tentang indikator Disposisi pada bagian Karakteristik Pelaksana Program sebagai berikut :

“komitemen kami, kami ingin lebih baik lagi kedepannya dan didukung oleh Rt/Rw maupun pemerintah supaya UKE-SP ini lebih meningkat dan baik lagi kedepannya”.

(Wawancara : Rabu, 8 September 2021, Pukul 12.16 WIB)

Dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan ibuk Novita Elia Sari, S.E selaku Pendamping Kelurahan ini menjelaskan tentang indikator Disposisi pada bagian Karakteristik Pelaksana Program sebagai berikut :

“komitemen kami, kami ingin lebih memberikan yang terbaik kepada masyarakat kelurahan sidomulyo barat untuk mengembangkan atau meningkatkan taraf hidup mereka sendiri dengan cara mereka mengembangkan usaha mereka, dengan itu kita berikan pinjaman berupa bantuan modal untuk mengembangkan usaha dia. Tapi tidak habis juga, pinjamannya ada pengembalian.

(Wawancara : Jum'at. 10 September 2021, Pukul 11.12 WIB)

Dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan bapak H. Dedi Susanto, S.H selaku Lurah Kelurahan Sidomulyo Barat ini menjelaskan tentang indikator Disposisi pada bagian Karakteristik Pelaksana Program sebagai berikut :

“ya mereka tentunya, saya sebagai pemegang otoritas daripada UEK-SP tentu saya minta komitmen dan tanggung jawab mereka, terutama tentunya dalam menganalisa setiap permohonan pinjaman, harus dilakukan analisa dulu, turun kelapangan, survey kepada pemanfaat

layak atau tidak menerima, kemudian kita niali agunannya yang dijaminakan dengan kondisi usaha yang mereka lakukan”.

(Wawancara : Senin, 30 Agustus 2021, Pukul 09.48 WIB)

Hasil wawancara yang dilakukan kepada informan yaitu bapak Ajman Sitaberu yang memiliki usaha Ajiba Sablon & Konveksi yang mengikuti program ini menjelaskan yaitu :

“jujur, sepengathuan saya sudah bagus”.

(Wawancara : Kamis, 9 September, Pukul 11.10 WIB)

Hasil wawancara yang dilakukan kepada informan yaitu ibuk Andayani Lubis yang memiliki usaha Laundry yang mengikuti program ini menjelaskan, yaitu :

“dari yang saya ihat selama mengikuti program ini jujur yaa, ibuk-ibuk nya juga baik baik”

(Wawancara : Jum'at, 10 September 2021, Pukul 09.55 WIB)

Hasil wawancara yang dilakukan kepada informan yaitu ibuk Lisnawati yang memiliki usaha Sarapan Pagi Bude Lis yang mengikuti program ini menjelaskan, yaitu :

“Alhamdulillah jujur, ibuk nya juga sopan, ramah baik baik juga”.

(Kamis, 9 September 2021, Pukul 12.41 WIB)

Dari kutipan sebelumnya dapat dilihat bahwa tanggapan ibuk Mariati selaku Ketua UEK-SP Sidomulyo, ibuk Novita Elia Sari, S.E selaku Pendamping Kleurahan dan bapak H. Dedi Susanto, S.H selaku Lurah Kelurahan Sidomulyo Barat menyatakan bahwa bentuk komitmen yang ada di

para pelaksana mengenai program ini tentunya ingin lebih baik lagi kedepannya dengan bantuan pemerintah ataupun pihak lain dan dengan hati-hati dalam memberikan pinjaman modal kepada peminfaat dengan melihat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dan melihat tanggapan yang dilontarkan para informan yaitu bapak Ajman Sitaberu yang memiliki usaha Ajiba Sablon & Konveksi, ibu Andayani Lubis yang memiliki usaha Laundry, dan yaitu ibu Lisnawati yang memiliki usaha Sarapan Pagi Bude Lis menjelaskan bahwa sikap pelaksana kepada peminfaat itu baik, sopan dan jujur dari yang mereka lihat selama mengikuti program UEK-SP ini.

Maka di lihat dari observasi peneliti selama berada di lapangan semangat yang ada di diri pengelola UEK-SP Sidomulyo ini tidak pernah habis untuk menjalankan program ini walaupun gaji/upah mereka seadanya dan fasilitas secukupnya. Dan melihat bagaimana kedekatan para pengelola dengan para peminfaat membuat peminfaat yakin bahwa pengelola UEK-SP ini memiliki sikap yang jujur dalam menjalankan program ini. Walaupun kurangnya sikap tegas dari pengelola untuk peminfaat yang terkendala dengan pembayaran pinjaman tetapi selain dari itu para pengelola menjalankan program ini dengan baik, jujur, sopan dengan berkomitmen ingin lebih baik lagi kedepannya. Maka indikator Disposisi pada sub indikator Karakteristik Pelaksana Program Sudah Terlaksana Dengan Baik

b. Pengaturan Birokrasi, merupakan hal yang penting karena melihat bagaimana program ini berjalan kedepannya. Keterampilan yang dimiliki oleh pelaksana akan mengembangkan kualitas dari para pelaksana, supaya

pelaksana sesuai dengan tupoksi dan mencapai tujuan dari program tersebut.

Dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan ibuk Mariati selaku Ketua UEK-SP Kelurahan Sidomulyo ini menjelaskan tentang indikator Disposisi pada bagian pengangkatan Birokrasi sebagai berikut :

“dulu ibuk ini sebelum menjadi ketua UEK ibuk juga merupakan anggota dari pelaksana program UEK-SP ini. Awal-awal dulu UEK-SP ini lagi masa jatuh ya tapi semenjak masa jabatan ibuk alhamdulillah sedikit demi sedikit mengalami perkembangan Untuk tupoksi nya kami sudah melakukan sesuai dengan tupoksi masing-masing dan kami juga saling bekerja sama.

(Wawancara : Rabu, 8 September 2021, Pukul 12.16 WIB)

Dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan ibuk Erlina Lubis selaku Tata Usaha UEK-SP Kelurahan Sidomulyo ini menjelaskan tentang indikator Disposisi pada bagian Karakteristik Pelaksana Program sebagai berikut :

“kalau untuk pengaturan masa jabatan itu, Pendamping Kelurahan tidak bisa kita pastikan ya karna itu langsung dan tergantung dari atas yaitu PPK(Program Pemberdayaan Kelurahan) kalau untuk Lurah itu menyesuaikan dengan masa periode lurah tersebut, Lpm, dan Penasehat juga menyesuaikan, kpm itu 1 tahun, dan kalau untuk pengelola sendiri itu 3 tahun dimana kalau tidak ada permasalahan/masalah yang terjadi itu diperpanjang otomatis ada juknis juga, kalau dia bermasalah, baru adanya pergantian karna kalau ngurus duit-duit ini susah juga diganti-ganti. Awal pembentukan pengelola itu adanya musyawarah khusus dan setelah itu baru di MKPT.”

(Wawancara : Kamis, 21 Oktober 2021, Pukul 10.02 WIB)

Hasil wawancara yang dilakukan kepada informan yaitu ibuk Lisnawati yang memiliki usaha Sarapan Pagi Bude Lis yang mengikuti program ini menjelaskan, yaitu :

“ibuk sudah lumayan lama ikut ini ya, Alhamdulillah program ini semakin baik kedepannya. kalau yang dari ibuk lihat sudah sesuai ya dengan tugas mereka”

(Kamis, 9 September 2021, Pukul 12.41 WIB)

Hasil wawancara yang dilakukan kepada informan yaitu ibuk Emi Suharti yang memiliki usaha Konveksi Celana Pendek yang mengikuti program ini menjelaskan, yaitu :

“setau ibuk sudah sesuai dan program ini sangat membantu menambah dana modal usaha ibuk”

(Wawancara: Jum'at, 10 September 2021, Pukul 09.10 WIB)

Dari kutipan sebelumnya dapat dilihat bahwa tanggapan ibuk Mariati selaku Ketua UEK-SP Sidomulyo dan ibuk Erlina Lubis selaku Tata Usaha UEK-SP Sidomulyo menyatakan bahwa para pelaksana yang ada di kantor UEK-SP sudah sesuai dengan tupoksi nya masing-masing dan aturan juknis yang ada untuk meningkatkan program UEK-SP ini. Dan melihat tanggapan yang dilontarkan para informan yaitu ibuk Lisnawati yang memiliki usaha Sarapan Pagi Bude Lis, yaitu ibuk Emi Suharti yang memiliki usaha Konveksi Celana Pendek menyatakan bahwa dari sepengetahuan dan menurut mereka UEK-SP ini semakin baik dan semakin bagus.

Dan melihat dari observasi lapangan yang peneliti lakukan adanya peningkatan keberlangsungan maupun fasilitas program UEK-SP Sidomulyo di Kelurahan Sidomulyo Barat ini, sehingga pengaturan birokrasi terhadap program dan pengelola program tentunya mengalami peningkatan. Ketika tahun 2018 peneliti berkunjung ke UEK-SP Sidomulyo kantor nya saat itu masih berada dan

menyatu dengan kepengurusan Kelurahan Sidomulyo Barat lainnya, selang beberapa tahun kemudian peneliti datang kembali ke UEK-SP Sidomulyo tersebut, mereka sudah memiliki kantor sendiri dan fasilitas yang lebih baik. Hal ini melihat bagaimana peningkatan pengaturan birokrasi yang terjadi di UEK-SP Sidomulyo. Dan tentunya sudah sesuai dengan juknis dan aturan yang berlaku. Maka indikator Disposisi pada sub indikator Pengaturan Birokrasi Sudah Terlaksana Dengan Baik.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi merupakan dimensi yang terakhir yang mempunyai dampak terhadap penerapan kebijakan yang di ukur dari *Standard Operasional Procedures (SOP)* dan fragmentasi yakni pembagian tanggung jawab untuk sebuah bidang kebijakan di antara unit-unit organisasi.

- a. Ketersediaan *Standard Operasional Procedures (SOP)*, bagaimana setiap organisasi mempunyai *standard operasinal procedures (SOP)* untuk pelaksanaan program dapat dilakukan tanpa prosedur-prosedur yang berbelit-belit dan disesuaikan dengan tindakan-tindakan yang seharusnya ada dalam aturan dari pelaksana.

Dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan bapak H. Dedi Susanto, S.H selaku Lurah Sidomulyo Barat ini menjelaskan tentang indikator Struktur Birokrasi pada sub indikator Ketersediaan *Standard Operasional Procedures (SOP)* sebagai berikut :

“sudah, tentunya tata cara dan syarat-syarat dari peminjam UEK-SP itu, kalau tidak sesuai dengan tata cara dan syarat yang berlaku kita tolak. Tidak ada pengecualian.

(Wawancara : Senin, 30 Agustus 2021, Pukul 09.48 WIB)

Dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan ibuk Mariati selaku Ketua UEK-SP Sidomulyo ini menjelaskan tentang indikator Struktur Birokrasi pada sub indikator Ketersediaan *Standard Operasional Procedures* (SOP) sebagai berikut :

“untuk SOP para pelaksananya adaa, seperti masuk jam set 9 sampai jam 15.00 WIB, ada absen kehadiran juga dan juga ada bentuk izin jika para pengelola yang lain ada kendala ketika masuk kerja atau ada halangan yang mendesak itu harus diinformasikan supaya masih adanya kabar dari pengelola tersebut”.

(Wawancara : Rabu, 8 September 2021, Pukul 12.16 WIB)

Dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan ibuk Erlina Lubis selaku Tata Usaha UEK-SP Sidomulyo ini menjelaskan tentang indikator Struktur Birokrasi pada sub indikator Ketersediaan *Standard Operasional Procedures* (SOP) sebagai berikut :

“adaa, sebelum pencairan itu kita buat kan sp2k atau surat perjanjiannya, sebelum meminjam itu ada formulir proposal pinjaman, dia mengajukan terlebih dahulu setelah itu kita verifikasi awal serta melihat kelayakan dokumennya dan segala macamnya, setelah lengkap baru kita kelapangan kita suvei layak atau tidak dan nanti setelah suvei kita rapatkan lagi disini bersama otoritas, pengelola, dan pendamping kelurahan, setelah rapat disetujui berapa baru setelah itu sp2k dan tanda tangan sp2k baru setelah itu cair dan input laporan keuangan”.

(Wawancara : Rabu, 8 September 2021, Pukul 11.24 WIB)

Dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan key informan yaitu ibuk Sumiati selaku Kasir UEK-SP Sidomulyo ini menjelaskan tentang indikator

Struktur Birokrasi pada sub indikator Ketersedian *Standard Operasional Procedures* (SOP) sebagai berikut :

“sudah, dibayar trus dicatat di buku kas harian . kalau orang mau ngambil kita keluarkan juga buku besar ditambah dengan slip tanda buku, sudah dicatat di kas harian baru input ke laptop laporan keuangan”.

(Wawancara : Rabu, 8 September 2021, Pukul 11.40 WIB)

Hasil wawancara yang dilakukan kepada informan yaitu ibuk Refni yang memiliki usaha Cahaya Laundry yang mengikuti program ini menjelaskan tentang indikator Struktur Birokrasi pada sub indikator Ketersedian *Standard Operasional Procedures* (SOP) yaitu :

“ada, mereka memberitahukan apa aja surat-surat yang dibutuhkan”.

(Wawancara : Kamis, 9 September 2021, Pukul 10.30 WIB)

Hasil wawancara yang dilakukan kepada informan yaitu ibuk Waliyem yang memiliki usaha Jamu Keliling yang mengikuti program ini menjelaskan tentang indikator Struktur Birokrasi pada sub indikator Ketersedian *Standard Operasional Procedures* (SOP) yaitu :

“insyaAllah yang selama ini kami jalankan tidak ada”

Hasil wawancara yang dilakukan kepada informan yaitu bapak Dimas Riyanto yang memiliki usaha Photocopy Putra Minang yang mengikuti program ini menjelaskan tentang indikator Struktur Birokrasi pada sub indikator Ketersedian *Standard Operasional Procedures* (SOP) yaitu :

“ada, mereka menjelaskan syarat-syarat dan aturan selama meminjam dana usaha disini”.

(Wawancara : Jum'at, 10 September 2021, Pukul 12.41)

Hasil wawancara yang dilakukan kepada informan yaitu bapak Indra yang memiliki usaha Salon Lampu Padang Motor yang mengikuti program ini menjelaskan tentang indikator Struktur Birokrasi pada sub indikator Ketersediaan *Standard Operasional Procedures* (SOP) yaitu :

“ada, sebelum peminjaman mereka menjelaskan mengenai program ini bagaimana serta syarat-syarat apa saja yang diperlukan”.

(Wawancara : Kamis, 9 September 2021, Pukul 11.32 WIB)

Dari kutipan sebelumnya dapat dilihat bahwa tanggapan bapak H. Dedi Susanto, S.H selaku Lurah Sidomulyo Barat, ibuk Mariati selaku Ketua UEK-SP Sidomulyo, ibuk Erlina Lubis selaku Tata Usaha UEK-SP Sidomulyo, ibuk Sumiati selaku Kasir UEK-SP Sidomulyo menyatakan bahwa adanya Ketersediaan *Standard Operasional Procedures* (SOP) di kantor UEK-SP Sidomulyo untuk memastikan pemanfaat yang menerima dana usaha sesuai dengan tujuan program dan mendisiplin pelaksana atas aturan yang ada. Dan berdasarkan hasil wawancara dengan informan yaitu ibuk Refni yang memiliki usaha Cahaya Laundry, ibuk Waliyem yang memiliki usaha Jamu Keliling, bapak Dimas Riyanto yang memiliki usaha Photocopy Putra Minang dan bapak Indra yang memiliki usaha Salon Lampu Padang Motor menjelaskan bahwa sudah ada nya para pelaksana memberitahukan apa-apa saja yang perlu disiapkan ketika ingin meminjam dana usaha.

Dan berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan bahwa peneliti melihat dalam melakukan peminjaman dana para pengelola sudah melakukan

SOP seperti apa saja syarat-syarat dan berkas-berkas yang perlu disiapkan dan bagaimana sistematika dalam program UEK-SP ini. Para pengelola menjelaskan langsung bagaimana sistematika dari program ini sehingga calon pemanfaat memahami maksud dan tujuan dari program UEK-SP ini. Dan yang peneliti lihat adanya papan struktur organisasi dari UEK-SP Sidomulyo di kantor tersebut. Maka indikator Struktur Birokrasi pada sub indikator Ketersediaan *Standard Operational Procedures* (SOP) Sudah Terlaksana Dengan Baik.

- b. Struktur Organisasi Pelaksana yaitu pembagian tanggung jawab untuk sebuah bidang kebijakan yang akan mempengaruhi pencapaian tujuan program.

Dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan ibu Mariati selaku Ketua Sidomulyo dan ibu Erlina Lubis selaku Tata Usaha UEK-SP Sidomulyo ini menjelaskan tentang indikator Struktur Birokrasi pada sub Struktur Organisasi Pelaksana sebagai berikut :

“sudah, ya tadi kami melakukan sesuai dengan jabatan masing-masing tapi juga saling kerjasama, kami nggak kaku doh pokoknya tugas kasir harus ini ajaa yaa enggak suatu saat jika butuh bantuan yaa dibantu yaa itu tadi kerjasama tim”.

(Wawancara : Rabu, 8 September 2021, Pukul 12.16 WIB)

Dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan bapak H. Dedi Susanto, S.H Lurah Sidomulyo Barat ini menjelaskan tentang indikator Struktur Birokrasi pada sub Struktur Organisasi Pelaksana sebagai berikut :

“sudah, mereka sudah melaksanakan sesuai dengan struktur organisasi yang ada dan bertanggung jawab sesuai dengan tupoksinya masing-

masing. Komitmen dan tanggung jawab dari pelaksana untuk memajukan UEK-SP di Kelurahan Sidomulyo Barat ini”.

(Wawancara : Senin, 30 Agustus 2021, Pukul 09.48 WIB)

Hasil wawancara yang dilakukan kepada informan yaitu ibuk Waliyem yang memiliki usaha Jamu Keliling yang mengikuti program ini menjelaskan tentang indikator Struktur Birokrasi pada sub indikator Struktur Organisasi Pelaksana yaitu :

“insyaAllah sudah sesuai dengan struktur organisasinya dan sebenarnya ini udah bagus dan mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi”.

(Wawancara : Jum'at, 10 September 2021, Pukul 10.20 WIB)

Hasil wawancara yang dilakukan kepada informan yaitu bapak Slamet Siam yang memiliki usaha Hafizah Laundry yang mengikuti program ini menjelaskan tentang indikator Struktur Birokrasi pada sub indikator Struktur Organisasi Pelaksana yaitu :

“setau saya sudah dan untuk UEK nya udah bagus”

(Wawancara : Jum'at, 10 September 2021, Pukul 09.28 WIB)

Hasil wawancara yang dilakukan kepada informan yaitu bapak M. Bambang Sukri yang memiliki usaha Toko Harian Tuk Datuk yang mengikuti program ini menjelaskan tentang indikator Struktur Birokrasi pada sub indikator Struktur Organisasi Pelaksana yaitu :

“setau saya sudah sesuai dengan strukturnya seperti yang jemput uang bulannya ibuk sumiati, ibunya kan menjabat sebagai kasir kan gitu, udah sesuai lah”.

(Wawancara : Kamis, 9 September 2021, pukul 13.17 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan key informan yaitu ibuk Mariati selaku Ketua Sidomulyo dan ibuk Erlina Lubis selaku Tata Usaha UEK-SP Sidomulyo dan bapak H. Dedi Susanto, S.H selaku Lurah Sidomulyo Barat menjelaskan bahwa bentuk tanggung jawab dari para pelaksana sudah sesuai dengan struktur organisasi dan ada bentuk kerjasama antara pengelola untuk membantu kendala yang dihadapi. Dan berdasarkan hasil wawancara dengan informan yaitu ibuk Waliyem yang memiliki usaha Jamu Keliling, bapak Slamet Siam yang memiliki usaha Hafizah Laundry, dan bapak M. Bambang Sukri yang memiliki usaha Toko Harian Tuk Datuk menjelaskan bahwa para pengelola sudah melakukan tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

Melihat dari hasil observasi peneliti selama dilapangan bahwa pengelola di UEK-SP Sidomulyo sudah melakukan tugasnya sesuai dengan struktur organisasi yang ada, tetapi mereka juga menerapkan sistem kerjasama atau saling membantu satu dengan yang lain dikarenakan kualitas Sumber Daya Manusia/staff yang kurang dan jumlah para pengelola program yang terbatas. Seperti waktu pengutipan bulanan yang pergi kelapangan Ketua dan Kasir dan yang tinggal di kantor cuma ibuk Tata Usaha saja, sementara bapak Marsan selaku Staff Analisis Kredit lagi izin sakit dan tidak bisa datang selama beberapa hari, ini mengakibatkan cuma satu orang tetap berada di kantor, hal ini kurang efektif untuk mengatasi situasi atau hal yang terjadi di kantor, maka dari itu penambahan Sumber Daya Manusia sangat di butuh di UEK-SP

Sidomulyo ini, dan ini tidak terlepas dari perlu nya anggaran dana gaji/upah kepada pengelola dan butuh perhatian khusus dari pemerintah. Dan juga didalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Kelurahan Kota Pekanbaru bahwa pada tugas dan tanggung jawab dari Ketua UEK-SP ini point terakhir mengatakan bahwa melakukan penagihan terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat dana usaha kelurahan dan di damping oleh pendamping kelurahan, dalam UEK-SP Sidomulyo yang peneliti liat bahwa hanya Ketua dan Kasir yang turun kelapangan melakukan penagihan terhadap kelompok ataupun anggota pemanfaat. Dapat dikatanya indikator Struktur Birokrasi pada sub indikator Struktur Organisasi Pelaksana Sudah Terlaksana Tetapi Belum Optimal.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang sudah dilakukan penulis, bahwa meskipun pelaksanaan program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Sidomulyo sudah terlaksana, tetapi fakta yang ditemukan dilapangan yaitu masih banyaknya pemanfaat yang telat mengembalikan angsuran pinjaman yang mengakibatkan pada besarnya nilai tunggakan yang terjadi, belum tegasnya pengelola dalam menerapkan sanksi-sanksi telat mengembalikan dana usaha, belum adanya pembinaan/sosialisasi khusus yang lakukan untuk pemanfaat terakit pengembalian dana usaha, dan belum adanya anggaran dana dari pemerintah untuk insentif seperti gaji/upah yang diberikan kepada pengelola pelaksana. Adapun faktor yang paling dominan atau paling pengaruh yaitu faktor komunikasi dan sumber daya karena tanpa adanya komunikasi antara pengelola dengan pemanfaat dan tanpa adanya sumber daya manusia ataupun anggaran program ini tidak akan bisa berjalan.

Maka dari itu penulis menarik kesimpulan mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Sidomulyo Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk indikator Komunikasi, sudah terjalin baiknya komunikasi yang dilakukan oleh pelaksana dengan pemanfaat walaupun begitu, indikator

komunikasi Sudah Terlaksana Tetapi Belum Optimal karena bentuk pembinaan/sosialisasi pengembalian dana usaha untuk pemanfaat belum dilaksanakan, hanya dalam bentuk pengarahan yang dilakukan oleh para pelaksana program. Dan dalam penyampaian informasi program, penyampaian syarat-syarat dan kebijakan serta sanksi sudah dilaksanakan tetapi dalam pelaksanaan sanksi belum sepenuhnya dilaksanakan karena para pelaksana memberi keringanan kepada pemanfaat yang tidak mengembalikan dana usaha tepat pada waktunya.

2. Untuk indikator Sumber Daya, dilihat dari kantor UEK-SP Sidomulyo itu sendiri Sudah Terlaksana Tetapi Belum Optimal dikarenakan masih kurangnya kualitas dan jumlah para sumber daya manusia yaitu para pengelola UEK-SP untuk menjalankan program ini, juga masih kurangnya sumber daya anggaran yang tersedia baik itu untuk insentif pelaksana ataupun penambahan/pembaharuan fasilitas yang ada.
3. Untuk indikator Disposisi, para pengelola UEK-SP sudah melakukan tugas dan fungsi nya masing-masing. Sehingga dapat dikatakan bahwa indikator Disposisi Sudah Terlaksana Dengan Baik.
4. Untuk indikator Struktur Birokrasi, dalam kantor UEK-SP Sidomulyo ini sudah penerapan SOP sesuai dengan SOP yang ada, walaupun begitu indikator dari struktur birokrasi ini Sudah Terlaksana Tetapi Belum Optimal dikarenakan pada struktur organisasi masih kurangnya sumber daya manusia yaitu pengelola UEK-SP yang mengakibatkan pengerjaan

tugas dan tanggung jawab dari pengelola dikerjakan secara bentuk kerjasama.

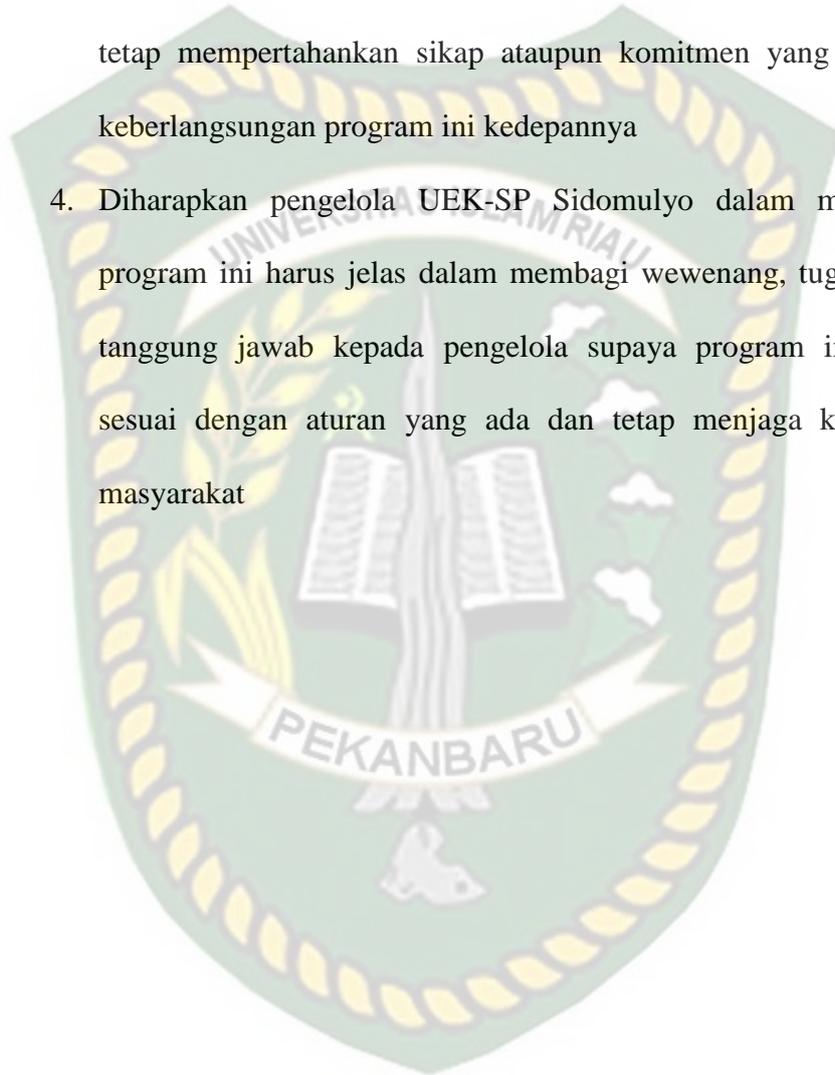
B. SARAN

Adapun saran yang dikemukakan sehubungan dengan hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Diharapkan pengelola UEK-SP Sidomulyo agar tetap menjalin komunikasi yang baik dengan pemanfaat untuk kelancaran program ini, juga tetap diadakannya pembinaan untuk pengelola supaya kualitas dari pengelola terus berkembang dan lebih baik kedepannya dan sosialisasi kepada masyarakat supaya modal usaha yang dipinjam bisa kembali sesuai dengan ketentuannya dan tidak disalah gunakan untuk yang lain dan juga dilakukannya pembinaa untuk pengelola supaya kualitas dan kuantitas pengelola lebih baik kedepannya. Dan untuk penyampaian informasi agar lebih dikembangkan lagi dan tetap konsisten dalam menerapkan sanksi-sanksi yang ada supaya program ini tetap terlaksana dengan baik.
2. Diharapkan pengelola UEK-SP Sidomulyo supaya melakukan penambahan sumber daya manusia agar pelaksanaan program ini lebih baik kedepannya, dalam sumber daya anggaran supaya pemerintah memperhatikan para pengelola seperti dimasukkannya anggaran gaji/upah untuk pengelola supaya pengelola semangat dalam melaksanakan program ini. dan untuk fasilitas supaya adanya mempabaharui fasilitas yang telah lama seperti computer atau

lainnya supaya pengelola lebih baik dan lancar dalam melaksanakan program UEK-SP ini.

3. Diharapkan para pengelola program UEK-SP Sidomulyo ini supaya tetap mempertahankan sikap ataupun komitmen yang ada untuk keberlangsungan program ini kedepannya
4. Diharapkan pengelola UEK-SP Sidomulyo dalam menjalankan program ini harus jelas dalam membagi wewenang, tugas ataupun tanggung jawab kepada pengelola supaya program ini berjalan sesuai dengan aturan yang ada dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat



DAFTAR PUSTAKA

Buku ;

- Agustino, Leo. 2020. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA,cv.
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA,cv.
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA,cv.
- Ali, Zaini dan Raden Imam Al Hafis. 2015. *Teori Kebijakan Publik*. Pekanbaru: Marpotan Tujuh.
- Anwas. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung: ALFABETA,cv.
- Awang, Azam. 2010. *IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN PEMERINTAH DESA Studi Kajian Pemberdayaan Berdasarkan Kearifan Lokal di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Guntur, M. Effendi. 2009. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Transformasi Perekonomian Rakyat Menuju Kemandirian Dan Keadilan*. Jakarta: CV Sagung Seto.
- Indiahono, Dwiyanto. 2016. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Irawan, Beddy. 2017. *Dasar-Dasar Administrasi Publik*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Manullang. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *SISTEM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA REPUBLIK INDONESIA (SANKRI)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Suharto, Edi. 2015. *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial*. Bandung: ALFABETA,cv.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Zulkifli & Moris Adidi Yogia. 2014. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.

Jurnal :

- Arlisa. 2015. Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, *Jom Fisip* Vol. 2 No. 2
- Harapan, dkk. 2018. Implementasi Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam Harapan Bersama, *jurnal administrasi administrasi Negara*, Volume 15, Nomor 1.
- Meirina, Dia. Yogia, Moris. 2020. Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan, *SOSIO KONSEPSIA* Vol. 9, No. 03.
- Nurmasari. Dia Meirina Suri. 2018. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Pekanbaru (Studi Usaha Ekonomi Kelurahan). *Jurna Wedana*, Volume IV No 1.

Website :

- Portal Resmi Pemerintahan Kota Pekanbaru Provinsi Riau. 2021. *UEK-SP Bersama Perdana Laksanakan MKPT se-Pekanbaru*. Pekanbaru.Go.Id.
5 Januari 2021: Pekanbaru. diakses 13 Maret 2021.